



**PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

P-RKPD 2022

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022**

Tema :

**Pemantapan Ekonomi Kerakyatan, Reformasi Sosial, dan
Pembangunan Berkelanjutan**

Arah Kebijakan :

- 1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19**
- 2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)**
- 3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19**
- 4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup**

Scan disini



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN,
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo, Temanggung 56221
Telepon : (0293) 492154 Faximile : (0293) 491801



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 71 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan dan perubahan lokasi kegiatan, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 71) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun atas dasar hasil evaluasi RKPD Tahun 2022 Triwulan II.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam:
 - a. penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022;
 - b. penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022; dan
 - c. penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.
- (3) Narasi Perubahan Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022;
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD;
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
- f. BAB VI : PENUTUP

3. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 29 Juli 2022

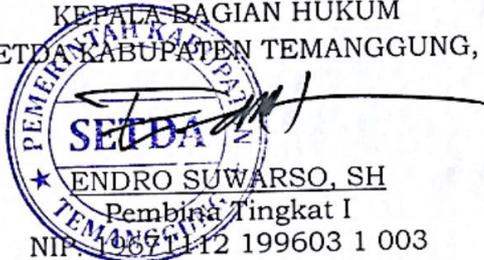
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,


★ ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	II-1
2.1 Evaluasi Kinerja Utama.....	II-1
2.2 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-3
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	II-3
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	II-7
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-15
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	II-18
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	II-19
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	II-24
2.3 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-27
1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.....	II-27
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-30
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	II-32
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan.....	II-33
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.....	II-34
6. Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-39
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-41
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-44
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.....	II-46
10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	II-49
11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-50
12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	II-52
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.....	II-55
14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.....	II-56
15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	II-57
16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	II-58
17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	II-60
18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	II-62
2.4 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-63

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	II-64
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.....	II-65
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.....	II-68
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.....	II-72
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	II-74
6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	II-75
2.5 Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-75
1. Sekretariat Daerah	II-76
2. Sekretariat DPRD	II-81
2.6 Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-83
1. Perencanaan	II-83
2. Keuangan.....	II-85
3. Kepegawaian	II-88
4. Pendidikan dan Pelatihan.....	II-91
5. Penelitian dan Pengembangan	II-92
2.7 Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-95
2.8. Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan	II-98
2.9. Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum	II-107
2.10 Identifikasi Permasalahan.....	II-112

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional.....	III-1
3.1.2 Kondisi Perekonomian Jawa Tengah.....	III-2
3.1.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Temanggung.....	III-3
3.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi	III-3
3.1.3.2 Struktur Ekonomi.....	III-5
3.1.3.3 PDRB Perkapita	III-7
3.1.3.4 Inflasi	III-7
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-9
3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-11
3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah	III-14
3.2.2.1 Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah	III-17
3.2.2.2 Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah	III-17
3.2.2.3 Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah	III-18
3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-18
3.3 Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	III-21

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....	IV-1
4.1.1 Visi Pembangunan Daerah	IV-1
4.1.2 Misi Pembangunan Daerah.....	IV-2
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas,	

Berkarakter, dan Berdaya.....	IV-2
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan.....	IV-2
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	IV-3
4.1.3 Tujuan dan Sasaran	IV-3
4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022	IV-12
4.2.1 Tema Pembangunan Tahun 2022	IV-12
1. Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022	IV-12
2. Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	IV-12
3. Tema Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2023	IV-12
4.2.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2022	IV-12
1. Prioritas Nasional dalam RKP 2022	IV-12
2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	IV-13
3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2022	IV-13
4.3 Kontribusi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 pada Tahun 2022	IV-21
4.4 Pembangunan Infrastruktur Pada Tahun 2022	IV-22
4.5 Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	IV-22
4.6 Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim.....	IV-23
4.6.1 Membentuk Desa Tangguh Bencana.....	IV-23
4.6.2 Membentuk Desa Mitigasi pada Desa Rawan Bencana.....	IV-24
4.6.3 Fasilitasi Perubahan Iklim	IV-31
4.6.3.1 Inventarisasi Gas Rumah Kaca	IV-31
4.6.3.2 Sabuk Gunung	IV-31
4.7 Kebijakan dan Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-32
4.7.1 SPM Pendidikan	IV-33
4.7.2 SPM Kesehatan	IV-34
4.7.3 SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	IV-36
4.7.4 SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	IV-37
4.7.5 SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	IV-38
4.7.6 SPM Sosial	IV-39
 BAB V	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1 Rencana Kerja Daerah.....	V-1
5.1.1 Deskripsi Program Pembangunan dari Kerangka Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS)	V-27
5.2 Pendanaan Daerah.....	V-47
5.2.1 Kegiatan Prioritas Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang.....	V-47
5.2.2 Pagu Indikatif Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang.....	V-67

5.3 Kebijakan Belanja Daerah	V-109
BAB VI	
PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN.....	I-1
------------------	-----

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2022	II-1
Tabel 2.1 Simbol dan Status Capaian Kinerja RPJMD.....	II-1
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-2
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-3
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-8
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-15
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-18
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-20
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-22
Tabel 2.9 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-24
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-28
Tabel 2.11 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-30
Tabel 2.12 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-32
Tabel 2.13 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-34
Tabel 2.14 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II.....	II-35
Tabel 2.15 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-39
Tabel 2.16 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-41
Tabel 2.17 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-44

Tabel 2.18	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-47
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-49
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-51
Tabel 2.21	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-53
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II.....	II-55
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-57
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-58
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-59
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-60
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-62
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-64
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-66
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-68
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-72
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-74
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-75
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-76
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-81
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II.....	II-83
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Keuangan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II.....	II-86
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Kepegawaian Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-88
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	

	Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-91
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-92
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-94
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Fungsi Kecamatan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-96
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-108
 BAB III		
	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Makro Nasional 2022	III-2
Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Makro Jawa Tengah 2022.....	III-2
Tabel 3.3	Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022	III-4
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2017-1022	III-5
Tabel 3.5	PDRB Kabupaten Temanggung Atas HDasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2022	III-6
Tabel 3.6	PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung tahun 2022	III-7
Tabel 3.7	Inflasi dan Proyeksi Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022	III-8
Tabel 3.8	Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Temanggung Perubahan RKPD Tahun 2022.....	III-13
Tabel 3.9	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Perubahan RKPD tahun 2022	III-14
Tabel 3.10	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Perubahan RKPD Tahun 2022.....	III-15
Tabel 3.11	Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2022.....	III-17
Tabel 3.12	Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2022.....	III-17
Tabel 3.13	Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2022.....	III-18
Tabel 3.14	Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung Perubahan RKPD Tahun 2022	III-20
Tabel 3.15	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.....	III-21
 BAB IV		
	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Tujuan Sebagai Indikator Kinerja Utama Kabupaten Temanggung Tahun 2022	IV-3
Tabel 4.2	Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, indikator tujuan,	

	indikator sasaran per Misi dengan urusan/Bidang.....	IV-6
Tabel 4.3	Keterkaitan antara Visi, Misi, Janji Politik Kepala Daerah, dan Prioritas Kabupaten Temanggung Tahun 2022	IV-16
Tabel 4.4	Keterkaitan Prioritas kabupaten Temanggung, Strategi Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten, Prioritas RKPD Provinsi Jateng, dan Prioritas Nasional Tahun 2022	IV-18
Tabel 4.5	Perencanaan Pembangunan Mendukung Perpres 79 Tahun 2019	IV-21
Tabel 4.6	Desa Mitigasi Bencana s.d 2022 Triwulan II	IV-26
Tabel 4.7	Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022 Triwulan II	IV-33
Tabel 4.8	Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022 Triwulan II	IV-34
Tabel 4.9	Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022 Triwulan II.....	IV-37
Tabel 4.10	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022 Triwulan II.....	IV-37
Tabel 4.11	Realisasi Pelaksanaan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 Triwulan II.....	IV-38
Tabel 4.12	Realisasi Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Tahun 2022 Triwulan II	IV-39
 BAB V		
	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
Tabel 5.1	Dukungan Program Pritoritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional RKP Tahun 2022.....	V-2
Tabel 5.2	Dukungan Program Pritoritas Daerah Terhadap Agenda Prioritas Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Tahun 2022	V-3
Tabel 5.3	Dukungan Program Pritoritas Daerah Terhadap Agenda Prioritas Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan Tahun 2022	V-6
Tabel 5.4	Dukungan Program Pritoritas Daerah Terhadap Agenda Prioritas SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun 2022	V-7
Tabel 5.5	Dukungan Program Pritoritas Daerah Terhadap Agenda Prioritas Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Tahun 2022	V-10
Tabel 5.6	Dukungan Program Pritoritas Daerah Terhadap Agenda Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar Tahun 2022	V-18
Tabel 5.7	Dukungan Program Pritoritas Daerah Terhadap Agenda Prioritas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Tahun 2022.....	V-22
Tabel 5.8	Dukungan Program Pritoritas Daerah Terhadap Agenda Prioritas Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Tahun 2022.....	V-24
Tabel 5.9	Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan	

	Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dalam Mendukung Prioritas Tahun 2022.....	V-28
Tabel 5.10	Rencana Pembiayaan Per Urusan Per Program RKPD Perubahan 2022.....	V-68
Tabel 5.11	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Perubahan RKPD Tahun 2022.....	V-109
BAB VI		
	PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR GAMBAR

BAB I	
PENDAHULUAN.....	I-1
Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen P-RKPD dengan Dokumen Lain	I-5
BAB II	
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	II-1
Gambar 2.1 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Triwulan II Tahun 2022	II-111
Gambar 2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Program Triwulan II Tahun 2022	II-111
BAB III	
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021.....	III-4
BAB IV	
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
Gambar 4.1 Komponen penyusun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023	IV-1
Gambar 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023	IV-12
BAB V	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	
PENUTUP.....	VI-1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN
2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

RKPD Kabupaten Temanggung 2022 merupakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah resmi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2021. Dokumen ini sudah menjadi acuan resmi semua Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dalam semester pertama Tahun 2022 ini. Namun karena munculnya beberapa permasalahan serta kebutuhan dalam dinamika pembangunan daerah yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan pembangunan di enam bulan pertama tahun 2022, dokumen RKPD Tahun 2022 perlu untuk disesuaikan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Penyesuaian alokasi anggaran kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan harga;
- b. Penghapusan kegiatan karena menyesuaikan kemampuan keuangan, penambahan kegiatan baru yang disesuaikan dengan nomenklatur DAK oleh Pusat, penambahan atau pengurangan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

Fokus kebijakan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ditujukan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, dengan prioritas sebagai berikut :

- a. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19;
- b. Optimalisasi Reformasi birokrasi (*good governance*);
- c. Penanggulangan kemiskinan terdampak Covid-19; dan
- d. Pemerataan pembangunan wilayah dan Lingkungan Hidup.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

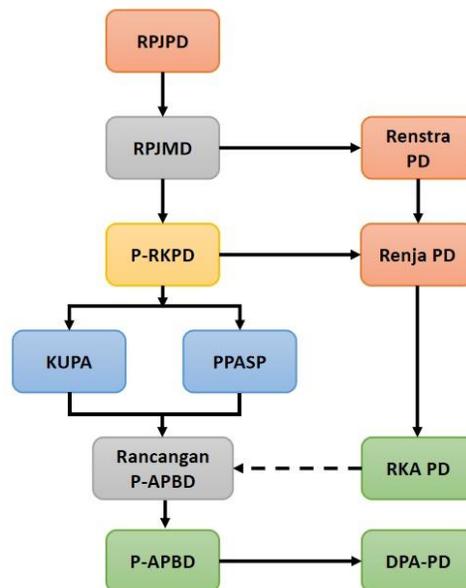
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 330-04 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
35. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2019 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
41. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM;
45. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3 Keterkaitan Antar Dokumen

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan, dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2022 pelaksanaan RKPD tahun 2022 dengan dan tetap berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan Renstra. Dokumen Perubahan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta Penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yang nantinya menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun renja, RKA, dan DPA Perangkat Daerah. Hubungan antar dokumen tersebut tergambar dalam bagan sebagai berikut.



Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen P-RKPD dengan Dokumen Lain

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah untuk melakukan penyesuaian perkembangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, kerangka keuangan daerah, serta rencana program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022 triwulan II.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022; dan
2. Menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Proses penyusunan dokumen perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 meliputi: (1) penyusunan rancangan perubahan RKPD; (2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (3) penetapan perubahan RKPD. Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 meliputi sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang dan dasar pertimbangan perubahan, dasar hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan kinerja sasaran

pembangunan dan program semua urusan dan bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022 sampai dengan Triwulan II.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Memuat rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 yang disesuaikan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2022
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan target, realisasi dan capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja misi pada tahun N-2, N-1 terhadap target RPJMD 2018-2023 dengan mencantumkan status capaiannya. Adapun status capaian digambarkan dalam simbol penanda dengan bentuk dan warna yang berbeda untuk memudahkan evaluasi. Simbol penanda yang digunakan adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Simbol dan Status Capaian Kinerja

Simbol	Status Capaian Kinerja RKPD	Status capaian kinerja RPJMD
	Telah tercapai atau TT (50 sampai dengan 100)	Telah tercapai atau TT (100)
	Akan tercapai atau AT (25 sampai dengan 49,99)	Akan tercapai atau AT (80 sampai dengan 99,99)
	Upaya keras atau UK (<25)	Upaya keras atau UK (<80)

2.1 Evaluasi Kinerja Utama

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023, bahwa indikator tujuan merupakan indikator kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut adalah capaian kinerja 8 indikator kinerja utama sampai dengan tahun 2022 (Triwulan II).

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Triwulan II

No	Tujuan	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d. TW II					
1	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Indek Pembangunan Manusia (IPM)*	-	70,49	69,88	70,16	69,88	99,60	●	99,13	▲	Dinkominfo
		Angka Kemiskinan*	%	9,80	10,17	10,00	10,17	98,30	●	96,22	▲	Dinas Sosial
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi*	%	4,8	3,34	3,50	3,34	95,43	●	69,58	▼	Dinkominfo
		Pendapatan Perkapita*	Juta rupiah	29,57	28,484	28,45	28,484	100	●	96,33	▲	Dinkominfo
		Tingkat pengangguran terbuka (TPT)*	%	3,50	2,62	3,50	2,62	100	●	100	●	Dinkominfo
		Ketimpangan Pendapatan*	%	18,70	18,78	18,50	18,78	100	●	100	●	Bappeda
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks reformasi Birokrasi**	Angka	65	63,42	64,50	63,42	98,33	●	97,57	▲	Setda
		Indeks Kepuasan Masyarakat **	Angka	82	82,06	81,00	82,06	100	●	100	●	Setda
RATA - RATA								98,96	●	94,85	▲	

Sumber: *) BPS kabupaten Temanggung. **) Bagian Organisasi, Setda Kabupaten Temanggung BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah

2.2 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 29 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	tahun	7,80	7,25	7,65	7,25	94,77	●	92,95	▲	Dindikpora
		Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	tahun	12,49	12,32	12,42	12,32	99,19	●	98,64	▲	Dindikpora
RATA-RATA								96,98		95,79	▲	
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APK SD Sederajat	%	105,05	98,07	106,23	98,07	92,32	●	93,35	▲	Dindikpora
		Rasio APK Perempuan/ Laki-laki SD/SDLB/MI /Paket A	%	0,965	0,972	0,96	0,972	100	●	100	●	Dindikpora
		Persentase APM SD Sederajat	%	98,30	91,24	97,9	91,24	93,20	●	92,82	▲	Dindikpora
		Rasio APM Perempuan/ Laki-laki SD/SDLB/MI /Paket A	angka	0,975	0,986	0,97	0,986	100	●	100	●	Dindikpora
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	79,50	43,21	79	43,21	54,69	●	54,35	▼	Dindikpora

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	96,97	97,93	96,57	97,93	100	●	100	●	Dindikpora
		Angka kelulusan SD	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Dindikpora
		Angka putus sekolah SD sederajat	%	0,03	0,03	0,04	0,03	100	●	100	●	Dindikpora
		Persentase Pendidikan SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	53,90	56,13	52,81	56,13	100	●	100	●	Dindikpora
		Persentase APK SMP Sederajat	%	98,59	98,56	98,52	98,56	100	●	99,97	▲	Dindikpora
		Rasio APK Perempuan/Kali-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	%	1	0,990	1	0,990	98,96	●	98,96	▲	Dindikpora
		Persentase APM SMP sederajat	%	88	77,18	87,14	77,18	88,57	●	87,71	▲	Dindikpora
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/ Paket B	%	1,055	0,996	1,06	0,996	93,92	●	94,37	▲	Dindikpora
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	98,50	98,21	98,3	98,21	99,91	●	99,71	▲	Dindikpora
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	95,17	53,68	94,42	53,68	56,86	●	56,41	▼	Dindikpora
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	97,20	88,75	94,39	88,75	94,02	●	91,31	▲	Dindikpora
		Angka kelulusan SMP	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Dindikpora

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Angka putus sekolah SMP sederajat	%	0,20	0,37	0,22	0,37	31,82	▲	15	▼	Dindikpora
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	63,21	58,55	62,98	58,55	92,97	●	92,63	▲	Dindikpora
		Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar(SD/MI, SMP/MTs)	%	100	92,88	100	92,88	92,88	●	92,88	▲	Dindikpora
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	76,60	72,07	76,02	72,07	94,81	●	94,09	▲	Dindikpora
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	40,41	40,31	38,91	40,31	100	●	99,76	▲	Dindikpora
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	81,35	100	81,35	81,35	●	81,35	▲	Dindikpora
		Prosentase TK terakreditasi minimal B	%	51	55,89	50,22	55,89	100	●	100	●	Dindikpora
		Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	47,47	37,87	46,52	37,87	81,42	●	79,79	▲	Dindikpora
		Persentase Angka Melek Huruf usia ≥15 tahun	%	98,64	98,71	98,61	98,71	100	●	100	●	Dindikpora
		Persentase angka kelulusan Pendidikan kesetaraan	%	97,19	85,86	97,09	85,86	88,43	●	88,34	▲	Dindikpora
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	%	100	25,52	100	25,52	25,52	▲	25,52	▼	Dindikpora

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	%	15,80	8,44	15,80	8,44	100		100		Dindikpora
RATA-RATA								88,33		87,53		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang Pendidikan terdiri dari indikator 2 indikator sasaran dengan status akan tercapai, 29 indikator program dengan status 10 indikator telah tercapai, 15 indikator akan tercapai, dan 4 indikator perlu upaya keras. 4 indikator yang perlu upaya keras yaitu:

- a. Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik, permasalahan atau faktor penghambatnya adalah menurunnya peran serta dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan. Untuk mencapai target pada tahun 2023 perlu merevitalisasi peran komite sekolah dalam meningkatkan kepedulian dan peran serta orang tua siswa dan masyarakat sekitar sekolah dalam penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik, permasalahan atau faktor penghambat pencapaian indicator ini adalah menurunnya peran serta dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan, untuk mencapai target pada tahun 2023 perlu merevitalisasi peran komite sekolah dalam meningkatkan kepedulian dan peran serta orang tua siswa dan masyarakat sekitar sekolah dalam penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Angka putus sekolah SMP sederajat, permasalahan atau faktor penghambat pencapaian indikator ini adalah pengaruh negatif

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; menurunnya semangat belajar siswa dan kurangnya motivasi dari orangtua. Upaya untuk mencapai target pada tahun 2023 adalah perlunya upaya semua pihak untuk mengurangi pengaruh negatif penggunaan teknologi informasi bagi siswa, meningkatkan semangat dan motivasi belajar siswa, serta meningkatkan motivasi belajar dari orangtua siswa.

Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, permasalahan atau faktor penghambat pencapaian indicator ini adalah pada umumnya anak yang tidak tertampung di jalur formal, minat dan motivasi belajarnya sangat rendah. Disamping itu ada yang merasa tidak butuh pendidikan (ijazah), dan ada beberapa yang sudah bekerja. Upaya untuk mencapai target pada tahun 2023 adalah meningkatkan motivasi belajar untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi, gerakan kembali ke sekolah, dan pendidikan kesetaraan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 44 indikator kinerja program. Dan di RSUD terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 2 indikator kinerja program dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,53	75,64	75,51	75,64	100	●	100	●	Dinas Kesehatan
		Indeks Kinerja RSUD	%	93	69,05	79,80	88,54	100	●	100	●	RSUD
RATA - RATA								100		100		
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Angka Kematian Ibu	%	67,5	174,38	71,5	110,99	44,77	▲	35,57	▼	Dinas Kesehatan
		Angka kematian bayi (AKB)	%	12	12,72	12,2	14,15	84,01	●	82,08	▲	Dinas Kesehatan
		Prevalensi ballita gizi buruk	%	0,5	0,18	0,5	0,10	100	●	100	●	Dinas Kesehatan
		Prosentase rumah tangga yang memiliki jamban	%	83,8	127,87	82,84	88,90	100	●	100	●	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	%	100	100	95	80,77	85,02	●	80,77	▲	Dinas Kesehatan
		Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	98	97,73	97,8	99,39	100	●	100	●	Dinas Kesehatan
		Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	100	100	100	34,65	34,65	▲	34,65	▼	Dinas Kesehatan

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	35,81	35,81	▲	35,81	▼	Dinas Kesehatan
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	1000	100	35,81	35,81	▲	35,81	▼	Dinas Kesehatan
		Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	%	100	100	100	35,81	35,81	▲	35,81	▼	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	99	99	●	99	▲	Dinas Kesehatan
		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	%	72	100	70	100	100	●	100	●	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	%	7	9,54	7	10,54	49,37	●	49,37	▼	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	81,64	100	32,84	32,84	▲	32,84	▼	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Balita	%	13,6	14,05	13,8	17,20	75,34	●	73,51	▼	Dinas Kesehatan
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	84,92	100	0	0	▼	0	▼	Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan	%	100	69,25	100	33,11	33,11	▲	33,11	▼	Dinas Kesehatan

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		sesuai standar										
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	89,52	100	41,49	41,49	▲	41,49	▼	Dinas Kesehatan
		Persentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Cakupan Rawat Jalan)	%	43,5	33,83	43	18,54	43,12	▲	42,62	▼	Dinas Kesehatan
		Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama	%	53,85	40	50	40,00	80,00	●	74,28	▼	Dinas Kesehatan
		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	30,97	100	23,23	23,23	▼	23,23	▼	Dinas Kesehatan
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	92,50	100	47,68	47,68	▲	47,68	▼	Dinas Kesehatan
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	33,42	33,42	▲	33,42	▼	Dinas Kesehatan
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	67,88	100	26,37	26,37	▲	26,37	▼	Dinas Kesehatan
		Jumlah warga negara dengan	%	100	73,49	100	20,76	20,76		20,76	▼	Dinas

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan							▼			Kesehatan
		Persentase Penanganan KLB 1x24 jam	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Dinas Kesehatan
		Angka penemuan kasus malaria	%	<1	0,005	<1	0	100	●	100	●	Dinas Kesehatan
		Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	%	<20	3,75	<20	1,87	100	●	100	●	Dinas Kesehatan
		Angka Penemuan Kasus Baru Kusta	%	<1	0,00	<1	0,125	100	●	100	●	Dinas Kesehatan
		Persentase Desa/kelurahan UCI	%	100	99,31	100	0	0	▼	0	▼	Dinas Kesehatan
		Proporsi anak umur 1 tahun diimunisasi campak	%	95	81,16	95	37,26	39,22	▲	39,22	▼	Dinas Kesehatan
		Prevalensi gizi kurang pada anak balita (0-60 bulan)	%	15,5	3,10	15,5	3,17	100	●	100	●	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting pada anak baduta (0-24 bulan)	%	27	13,13	27,5	11,16	100	●	100	●	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi umur <6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	%	80	84,02	80	85,43	100	●	100	●	Dinas Kesehatan
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	20	13,64	20	13,81	100	●	100	●	Dinas Kesehatan
		Persentase desa bebas rawan gizi	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Dinas

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah	
						Target	Realisasi s.d Tw II						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
												Kesehatan	
		Persentase rumah sehat	%	82	83,75	81,5	84,97	100	●	100	●	Dinas Kesehatan	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	100	100	97	100	100	●	100	●	Dinas Kesehatan	
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi	%	62	19,23	62	73,08	100	●	100	●	Dinas Kesehatan	
		Cakupan Penggunaan Obat Rasional di puskesmas	%	77	81	77	100	100	●	100	●	Dinas Kesehatan	
		Presentase Pengawasan dan makanan minuman di pasar tradisional	%	100	100	100	100	100	100	●	100	●	Dinas Kesehatan
		Persentase sarana pelayanan mendapatkan ijin kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	●	100	●	Dinas Kesehatan
		Cakupan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) yang mendapat SPP-IRT	%	100	94,17	100	76,71	76,71	76,71	●	76,71	▲	Dinas Kesehatan
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang	Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna	%	83,09	93,26	83,07	0	0	▼	0	▼	Dinas Kesehatan	

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	kesehatan											
6	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	100	100	100	100	100	●	100	●	RSUD
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	%	54	56,99	52	56,26	100	●	100	●	RSUD
RATA-RATA								69,08	●	68,57	▼	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang kesehatan terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 46 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan triwulan II tahun 2022 pada indikator kinerja sasaran keduanya berstatus telah tercapai. Kemudian dari 46 indikator kinerja program, 28 dengan status telah tercapai, 13 akan tercapai, dan 5 upaya keras. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator upaya keras :

a. Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Faktor penghambatnya adalah dikarenakan vaksinasi dilakukan pada bulan juli dan dengan adanya pandemi covid-19, sekolah dilaksanakan melalui daring sehingga tidak dilakukan vaksinasi. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut

adalah bekerjasama dengan pihak sekolah untuk pemantauan kesehatan secara virtual dan offline bila memungkinkan dan Menanamkan kesadaran siswa untuk aktif mendeteksi kesehatan pribadi dan segera menghubungi pihak sekolah / tenaga kesehatan bila ada gejala.

- b. Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Faktor penghambatnya adalah dikarenakan adanya vaksinasi COVID-19 yang mengharuskan adanya skrining kesehatan sebelum penyuntikan memungkinkan adanya temuan kasus baru penderita Hipertensi. Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menghimpun data dari faskes swasta di wilayah kerja Puskesmas serta mendorong peningkatan pelayanan kasus hipertensi sesuai standar

- c. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

Faktor penghambatnya adalah dikarenakan penjangkauan, penjangkauan kelompok populasi kunci masih belum maksimal dan masih ada populasi beresiko (ibu hamil, pasien TB) yang menolak diperiksa HIV. Upaya untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan memaksimalkan penjangkauan populasi kunci dan Koordinasi lintas program, lintas sektor untuk memaksimalkan screening HIV pada pasien TB dan Ibu hamil

- d. Persentase Desa/kelurahan UCI

Faktor penghambatnya adalah dikarenakan perhitungan dilakukan di akhir tahun. Upaya yang dapat dilakukan saat ini adalah dengan memastikan desa tidak ada penolakan terhadap pelaksanaan imunisasi nantinya.

- e. Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna.

Faktor penghambatnya adalah dikarenakan kegiatan atau pendataan dilaksanakan di akhir tahun. Upaya yang dapat

dilakukan saat ini yaitu dengan meningkatkan kerjasama dengan kader posyandu dalam kegiatan pendataan di masing masing desa se-Kabupaten Temanggung dan bekerjasama dengan kader posyandu.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 12 indikator kinerja program penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	84,00	83,70	83,95	82,99	98,86	●	98,80	▲	DPUPR
		Persentase Pemanfaatan Tata Ruang Sesuai rencana tata ruang	%	89,50	88,54	89,45	88,54	98,98	●	98,93	▲	DPUPR
RATA-RATA								98,92	●	98,86	▲	
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi (D.I)	%	97,00	95,29	96,90	97,87	100	●	100	●	DPUPR
		Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	59,32	58,116	58,82	57,82	98,29	●	97,46	▲	DPUPR

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	90	94,52	89	94,52	100	●	100	●	DPUPR
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	92,38	100	94,82	94,82	●	94,82	▲	DPRKPLH
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%	50	22,544	49,00	68,59	100	●	100	●	DPUPR
5.	Program Pengembangan Pemukiman	Persentase desa terfasilitasi kegiatan bankeu/hibah	%	100	100	100	100	100	●	100	●	DPUPR
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung Pemerintah kondisi Baik	%	80	86,82	77,50	86,82	100	●	100	●	DPUPR
7.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik	%	62	75,663	61	68,21	100	●	100	●	DPUPR
8.	Program Penyelenggara	Persentase jalan Kabupaten kondisi mantap	%	85	89,29	84,85	87,86	100	●	100	●	DPUPR

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	an Jalan	Persentase jembatan Kabupaten kondisi baik	%	93,73	92,28	93,43	92,88	99,41	●	99,09	▲	DPUPR
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	%	90	100	90	100	100	●	100	●	DPUPR
10.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	%	88,1	88,539	88	88,540 7	100	●	100	●	DPUPR
Rata-Rata								99,35	●	99,28	▲	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah

Berdasarkan tabel di atas, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 12 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan triwulan II tahun 2022 pada indikator kinerja sasaran keduanya berstatus akan tercapai, sedangkan dari 12 indikator kinerja program, 9 indikator dengan status telah tercapai dan 3 indikator dengan status akan tercapai. Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan status akan tercapai, yaitu :

- Sosialisasi tentang perda RTRW
- Ketersediaan data terkait informasi tata ruang yang bisa diakses oleh masyarakat
- Meningkatkan optimalisasi kualitas pelayanan jembatan
- Meningkatkan program jamban keluarga sehat

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	%	97,97	98,99	97,92	98,99	100	●	100	●	DPRKPLH
Rata-Rata								100	●	100	●	
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	5	8,85	6,35	8,16	71,54	●	36,85	▼	DPRKPLH
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	86,8	92,98	86,78	94,82	100	●	100	●	DPRKPLH
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	%	89,42	91,15	88,87	91,84	100	●	100	●	DPRKPLH
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	18,25	5,55	18,5	5,55	100	●	100	●	DPRKPLH
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	●	100	●	DPRKPLH

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100		100		DPRKPLH
Rata-Rata								94,82		94,82		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang perumahan dan kawasan permukiman terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan triwulan II tahun 2022 pada indikator kinerja sasaran maupun indikator kinerja program keduanya berstatus telah tercapai.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaran pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 8 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indek Rasa Aman	Angka	4,44	4,48	4,43	4,48	100	●	100	●	Satpol PP Damkar
RATA-RATA								100	●	100	●	
1	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Satpol PP Damkar
		Rasio Linmas per RT	rasio	1,62	1,42	1,62	1,42	87,84	●	87,84	▲	Satpol PP Damkar
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Satpol PP Damkar
2	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	%	61	60,64	60,81	60,64	99,73	●	99,42	▲	Satpol PP Damkar
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%	69,8	76,67	69,8	88,89	100	●	100	●	Satpol PP Damkar
		Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	%	44	310	43	221	100	●	100	●	Satpol PP Damkar

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Non Kebakaran	Persentase aparaturnya yang memenuhi standar kualifikasi	%	44	32,14	43	41,07	95,51	●	93,34	▲	Satpol PP Damkar
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	47,73	100	45	45	▲	45	▼	Satpol PP Damkar
RATA-RATA								91,01	●	90,70	▲	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah

Berdasarkan tabel diatas bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 1 indikator Kinerja sasaran dengan capaian Telah Tercapai dan 8 indikator kinerja Program dengan capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2022 dengan status telah tercapai 4 indikator, akan tercapai 3 indikator, dan 1 indikator dengan status upaya keras yaitu Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit; lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran; luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi serta terbatasnya Sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing - masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran.

Untuk merubah status menjadi akan tercapai pada akhir tahun 2022 dibutuhkan upaya Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta Pemenuhan sarana sumber air (groundtank) di Pos Pemadam Kebakaran. Sementara itu, capaian Kinerja Penyelenggaran Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran, dan 9 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Indek Resiko Bencana	%	192,08	251,07	192,08	135,53	100	●	100	●	BPBD
RATA-RATA								100	●	100	●	
1	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan desa tangguh bencana	%	10,47	8,29	9,52	9,68	100	●	92,43	▲	BPBD
		Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	●	100	●	BPBD
		Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	●	100	●	BPBD

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	%	86,4	67,74	78,3	69,12	88,28	●	80,01	▲	BPBD
		Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	100	●	100	●	BPBD
		Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	100	●	100	●	BPBD
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	●	100	●	BPBD
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	●	100	●	BPBD
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	●	100	●	BPBD
RATA-RATA								98,70	●	96,64	▲	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah

Berdasarkan tabel diatas bidang Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 1 indikator Kinerja Sasaran dengan status Telah Tercapai dan 9 indikator kinerja Program dengan capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2022 dengan status telah tercapai 7 indikator, akan tercapai 2 indikator, dan tidak ada indikator dengan status upaya keras. Secara geografis, temanggung merupakan daerah rawan bencana sehingga banyak lahan rawan bencana digunakan sebagai area permukiman, perubahan fungsi lahan

menyebabkan kejadian bencana banjir dan longsor yang merusak infrastruktur publik, keterbatasan anggaran, data yang belum sesuai dengan kondisi di lapangan, koordinasi antar instansi terkait belum optimal, anggaran kurang memadai dalam penanganan mengingat kejadian bencana tidak bisa diprediksi serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan bencana. Guna merubah status menjadi telah tercapai pada akhir tahun 2022 yaitu dengan memberikan arahan dan sosialisasi kepada desa rawan bencana agar supaya mencapai desa tangguh bencana dengan mencapai poin-poin yang telah ditetapkan melalui anggaran desa dan dengan peningkatan peran serta Pemerintah dalam menghimbau masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana dan peningkatan pemanfaatan sarana prasarana kebencanaan.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 14 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022(%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan,	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	63	111,79	63	55,12	87,00		87,00		Dinas Sosial

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022(%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS))								●			
RATA-RATA								87,00	●	87,00	▲	
1	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Dinas Sosial
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Dinas Sosial
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Dinas Sosial
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Dinas Sosial

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022(%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Dinas Sosial
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Dinas Sosial
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	%	1,22	4,22	1,22	1,38	100	●	100	●	Dinas Sosial
4	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Dinas Sosial
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	85	98,78	80	100	100	●	100	●	Dinas Sosial
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	95	78,44	90	91,00	100	●	95,79	▲	Dinas Sosial
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%	10,2	63,72	10,1	100	100	●	100	●	Dinas Sosial
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	48	111,90	48	54,73	100	●	100	●	Dinas Sosial

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022(%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Dinas Sosial
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Dinas Sosial
RATA-RATA								100	●	99,70	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang sosial terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dengan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2022 dengan status telah tercapai dan 14 indikator kinerja program dengan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2022 dengan status telah tercapai.

2.3 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya investasi sektor riil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75	74,01	74,5	74,01	99,34	●	98,68	▲	Dinperinaker
Rata - Rata								99,34	●	98,68	▲	
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	80	78,01	77	33,80	43,90	▲	42,25	▼	Dinperinaker
		Tingkat setengah pengangguran	%	5,7	11,66	5,8	2,62	45,17	▲	100	●	Dinperinaker
		Persentase Tenaga Kerja formal	%	31	24,17	30	24,17	80,57	●	77,97	▼	Dinperinaker
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	%	75	52,68	70	43,75	62,50	●	58,33	▼	Dinperinaker
		Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	65	34,78	62	71,43	100	●	100	●	Dinperinaker
		Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	%	45	54	40	52,08	100	●	100	●	Dinperinaker
3	Program Hubungan Industrial	Proporsi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan	%	79	61,08	78	82,37	100	●	100	●	Dinperinaker

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	87	68,91	85	58,82	69,20	●	67,61	▼	Dinperinaker
		Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	%	40	15,13	35	55,46	100	●	100	●	Dinperinaker
		Persentase perselisihan hubungan industri di luar pengadilan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100	82,35	100	33,33	33	▲	33,33	▼	Dinperinaker
RATA-RATA								73,434	●	77,949	▼	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang tenaga kerja terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan triwulan II tahun 2022 pada indikator kinerja sasaran berstatus akan tercapai, sedangkan dari 10 indikator kinerja program, 5 indikator dengan status telah tercapai dan 5 indikator dengan status upaya keras. Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan status upaya keras, yaitu :

- a. Melaksanakan TNA (Training Need Analized) dengan benar, yaitu pelatihan yang dilaksanakan untuk kebutuhan apa, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan mana dan bidang apa, ataukah untuk memenuhi usaha jasa
- b. Setelah kondisi new normal, segera memfasilitasi rekrutmen perusahaan
- c. Melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan terkait sarana hubungan industrial bagi perusahaan

d. Mendorong pelaksanaan percepatan mediasi perselisihan perusahaan

Beberapa faktor penghambat antara lain :

- b. Jumlah pendaftar/pencari kerja dan rekrutmen perusahaan sedikit karena pandemi covid-19
 - c. Mata pencaharaian sebagian besar masyarakat Kabupaten Temanggung yang masih bergantung pada pertanian.
 - d. Lowongan pekerjaan tidak sebanding dengan pencari kerja *fresh graduate*
- Sikap egois pihak perusahaan dan pekerja dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 8 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja Indikator Kinerja	Satuan Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95,65	95,31	95.64	95.31	99.65	●	100	●	DPPPAPPKB
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	%	0,004	0,002	0.004	0.005	100	●	100	●	DPPPAPPKB

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja Indikator Kinerja	Satuan Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RATA-RATA								99,83		100		
1	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	presentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,34	1,79	2,33	1.90	81,54		81,20		DPPPAPPKB
		Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja	%	45,71	82,61	45,71	82.61	100		100		DPPPAPPKB
2	Program Perlindungan Perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,011	0,0021	0,011	0.001	100		100		DPPPAPPKB
		Persentase perempuan korban kekerasan	%	0,011	0,0013	0,012	0.001	100		100		DPPPAPPKB
3	Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase desa sayang ibu dan bayi	%	62,28	31,49	41,52	31.49	75,84		50,56		DPPPAPPKB
		Persentasre rumah sakit sayang ibu dan bayi	%	100	100	100	100	100		100		DPPPAPPKB
4	Program Pemenuhan Hak Anak /PHA)	Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	60	80	50	80	100		100		DPPPAPPKB
5	Program perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan	%	0,011	0,0026	0,011	0.0005	100		100		DPPPAPPKB
RATA-RATA								94,67		91,47		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 8 indikator kinerja program dengan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2022 dengan status telah tercapai.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pangan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 4 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	78,30	79,70	78,20	80,10	100	●	100	●	DKPPP
RATA - RATA								100	●	100	●	
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian	Rasio ketersediaan pangan	%	100	147,06	100	56,81	56,81	●	56,81	▼	DKPPP

	Pangan											
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan desa pelaksana program ketahanan pangan	%	27,68	28,03	24,22	32,53	100		100		DKPPP
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rasio lumbung pangan masyarakat	%	56	56	52	58,00	100		100		DKPPP
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	100	90	100	100		100		DKPPP
RATA-RATA								89,20		89,20		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang pangan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 4 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2022 baik pada indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program berstatus telah tercapai.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang pertanahan terdiri dari 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100	100	100	100	100		100		DPRKPLH
RATA-RATA								100		100		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 , data diolah

Status capaian telah tercapai. Namun demikian perlu upaya pencegahan konflik sosial terkait sengketa tanah di masyarakat, serta menjaga keberlanjutan koordinasi antara Perangkat Daerah dalam menyelesaikan sengketa tanah Garapan.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 14 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	70,53	69,51	69,18	69,51	100	●	98,58	▲	DPRKPLH
RATA - RATA								100		98,58	▲	
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	62,73	31,36	60,50	100	100	●	100	●	DPRKPLH
		Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100	0	100	0	0	▼	0	▼	DPRKPLH
3	Program Pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Angka	46	54,45	46	54,45	100	●	100	●	DPRKPLH
		Indeks kualitas udara	Angka	86	80,89	85,50	80,89	94,61	●	94,06	▲	DPRKPLH
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	74,33	74,33	74,33	74,33	100	●	100	●	DPRKPLH
		Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap total luas lahan di Kabupaten Tmg	%	0,067	0,1	0,067	0,08	100	●	100	●	DPRKPLH
		Cakupan RTH Publik	%	0,07	1,10	0,07	1,10	100	●	100	●	DPRKPLH

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase usaha yang memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	%	100	0	90	100	100	●	100	●	DPRKPLH
6	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	100	90	4	4,44	▼	4	▼	DPRKPLH
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan sekolah berwawasan lingkungan	%	26,88	27,33	26,75	27,33	100	●	100	●	DPRKPLH

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	66,67	82,35	66,67	5,88	8,82	▼	8,82	▼	DPRKPLH
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	●	100	●	DPRKPLH
10	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	%	38,2	21,97	36,70	34,64	94,38	●	90,68	▲	DPRKPLH
		Cakupan layanan persampahan	%	55	53,63	52	55,02	100	●	100	●	DPRKPLH
RATA-RATA								78,73	●	78,40	▼	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2022, data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari 1 indikator kinerja Sasaran dan 14 indikator kinerja program, capaian triwulan II tahun 2022 pada indikator sasaran berstatus akan tercapai, sedangkan pada indikator program ada 9 indikator telah tercapai, 2 akan tercapai, dan 3 indikator dengan status upaya keras. Faktor penghambatnya adalah sebagai berikut :

a) Kurangnya kesadaran beberapa pemrakarsa/pelaku usaha/kegiatan untuk mengajukan persetujuan sesuai dengan

klasifikasi kegiatan/usahanya

- b) Transisi kebijakan OSS terkait Undang-undang Cipta Kerja ke dalam aplikasimenjadi OSS berbasis resiko sehingga penerapan di lapangan masih terhambat
- c) Terbitnya peraturan perundangan baru sehingga ada perubahan mekanisme pengajuan persetujuan
- d) Pengajuan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang berada di DPM sedangkan sistem tersebut belum terintegrasi dengan sistem informasi Lingkungan Hidup
- e) Kegiatan pengawasan dan pembinaan Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Temanggung masih perlu menyesuaikan dengan SOP Pengawasan dari KLHK dan referensi Pengawasan dari DLHK Provinsi Jawa Tengah.
- f) Lokasi Proklamasi dan penghargaan Kalpataru masih dalam proses penilaian dan menunggu pengumuman dari provinsi.
- g) Adipura masih dalam proses penilaian dan menunggu pengumuman dari pusat.

Untuk meningkatkan status upaya keras menjadi status telah tercapai pada akhir tahun 2022 pada indikator persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup diperlukan adanya sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, dan untuk indikator Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Temanggung serta pada indikator Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup diperlukan Individu/instansi/perusahaan yang sudah mendapatkan penghargaan bisa mengikuti seleksi penghargaan ke tingkatan yang lebih tinggi.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi s.d Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPd 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPd	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Angka	80	83,84	79,5	84,12	100	●	100	●	Dindikcapil
Rata - Rata								100	●	100	●	
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	97,4	98,38	97,3	98,54	100	●	100	●	Dindikcapil
		Persentase kepemilikan KTP el	%	99	99,71	98,6	99,68	100	●	100	●	Dindikcapil
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	72	71,08	67	71,08	100	●	98,73	▲	Dindikcapil
		Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Dindikcapil
2	Program pencatatan	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	75	70,02	73	70,72	96,88	●	94,30	▲	Dindikcapil

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi s.d Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	sipil	Persentase penerbitan akta kematian	%	99	100	98	100	100	●	100	●	Dindukcapil
		Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Dindukcapil
		Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Dindukcapil
3	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	60	83,87	40	83,87	100	●	100	●	Dindukcapil
		Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	90	79,17	80	79,17	98,96	●	87,96	▲	Dindukcapil
RATA-RATA								99,58	●	98,10	▲	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2022, data diolah.

Berdasarkan tabel diatas bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 1 indikator Kinerja Sasaran yang dengan capaian Telah Tercapai dan 10 indikator kinerja Program dengan capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2022 dengan status telah tercapai 7 indikator, akan tercapai 3 indikator, dan tidak ada indikator dengan status upaya keras. Permasalahan yang ada adalah kurangnya Sumber Daya Manusia di desa untuk mendukung inovasi pelayanan Adminduk tidak semua masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan online (keterbatasan IT dan jaringan), jumlah pelayanan terbatas, keterbatasan alat perekaman KTP-el di kecamatan. Guna merubah status menjadi telah tercapai pada akhir tahun 2022 sosialisasi pemanfaatan

KIA, sosialisasi pelayanan adminduk, fasilitasi bimtek pelayanan adminduk serta perlu adanya kerja sama dg stakeholder untuk pemanfaatan KIA misalnya Program dari Puskesmas Si Panjul Jitu Plus.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 13 indikator kinerja program, dengan capaian sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022(%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Angka	0,71	0,69	0,70	0,72	100		100		Dinpermades
		Persentase desa yang berpredikat mandiri	%	6,39	5,64	6,02	9,77	100		100		Dinpermades
RATA-RATA								100		100		
1	Program penataan Desa	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	%	40	30,45	35	30,45	87,00		76,13		Dinpermades

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022(%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa	%	37	35,71	35	35,71	100		96,51		Dinpermades
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah di tetapkan	%	100	100	100	100	100		100		Dinpermades
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	90	96,24	80	96,24	100		100		Dinpermades
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	90	100	80	100	100		100		Dinpermades
		Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	85	100	80	100	100		100		Dinpermades
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	%	100	95,86	100	96,00	96,00		96,00		Dinpermades

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022(%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	%	85	100	83	100	100	●	100	●	Dinpermades
		Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	%	10	0,00	10	0	100	●	100	●	Dinpermades
		Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	%	85	100	83	100	100	●	100	●	Dinpermades
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	%	35	100	30	100	100	●	100	●	Dinpermades
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	%	32	85,34	29	85,34	100	●	100	●	Dinpermades
		Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%	10	100	10	100	100	●	100	●	Dinpermades
RATA - RATA								98,69	●	97,59	▲	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dengan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2022 dengan status telah tercapai dan 13 indikator kinerja program dengan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2022 dengan status telah tercapai.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	<i>Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)</i>	%	0,8	0,98	0,81	0,98	79,01		77,50		DPPPAPPKB
RATA-RATA								79,01		77,50		
1	Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	100		100		DPPPAPPKB
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	%	9,17	12,99	9,51	13,69	56,02		50,69		DPPPAPPKB
		Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	2,04	1,02	2,05	1,02	100		100		DPPPAPPKB
		Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 th (ASFR 15-19 th)	%	26,3	9,80	26,5	10,07	100		100		DPPPAPPKB

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana /KB	presentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	76,21	75,29	75,87	76,87	95,17		94,74		DPPPAPPKB
		Persentase kepesertaan KB aktif	%	76,21	75,29	75,87	73,87	97,36		96,93		DPPPAPPKB
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	49,19	45,21	48,87	45,56	93,22		92,62		DPPPAPPKB
		Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	%	33,90	33,85	33,90	33,85	99,84		99,84		DPPPAPPKB
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indek Pembangunan Keluarga	%	50	55,97	45	55,97	100		100		DPPPAPPKB
RATA-RATA								93,512		92,757		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran

dan 9 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan triwulan II tahun 2022 pada indikator kinerja sasaran berstatus upaya keras, sedangkan dari 9 indikator kinerja program, 4 indikator dengan status telah tercapai, 4 indikator dengan status akan tercapai dan 1 indikator dengan status upaya keras.

Masalah yang ada dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah masih adanya budaya masyarakat bahwa kehamilan, dan melahirkan menjadi urusan perempuan, Masih tingginya angka kelahiran (CBR), Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya ikut KB serta Rendahnya pemahaman batasan PUS bisa hamil (merasa tua tidak perlu KB).

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan status upaya keras, yaitu :

- a. Peningkatan jejaring dalam pelaksanaan program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) baik pemerintah maupun swasta dengan melakukan advokasi dan bintek kepada Kepala Desa dalam program KKBPK
- b. Mengoptimalkan tim advokasi KKBPK dan peningkatan kapasitas pengelola program KKBPK dari tingkat RT sampai Desa, Kecamatan dan Kabupaten

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	1,61	1,62	1,59	34.21	100	●	100	●	Dishub
RATA-RATA								98.18	●	88.69	▲	
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadahi	%	38,65	35,27	37,68	35.27	93.60	●	91.25	▲	Dishub
		Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	100	98,18	98,18	98.18	100.00	●	98.18	▲	Dishub
		Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	%	99,5	96,28	99,53	100	100.0	●	100.0	●	Dishub
		Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	%	50	25	25	25.00	100.00	●	50.00	▼	Dishub
		Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	%	62,5	37,50	50	50	100.00	●	80.00	▲	Dishub
		Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	%	65,22	56,52	60,87	58.70	96.44	●	90.00	▲	Dishub

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	87,18	80	87,18	80.00	91.76	●	91.76	▲	Dishub
		Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	100	100	100	100	100.00	●	100.00	●	Dishub
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	100	85,71	85,71	85.71	100.00	●	85.71	▲	Dishub
		Persentase penerangan jalan di ruas jalan Kabupaten	%	14,26	31,69	12,91	31.69	100.00	●	100	●	Dishub
RATA-RATA								98.18	●	88.69	▲	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang perhubungan terdiri dari 10 indikator kinerja program dengan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2022 dengan status telah tercapai 3 indikator, akan tercapai 6 indikator, dan 1 indikator dengan status upaya keras. Guna merubah status upaya keras menjadi akan tercapai pada akhir tahun 2022 dibutuhkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai sesuai standar bengkel kelas 1. Di sisi lain, terkait sarpras bengkel bukan merupakan kewenangan Pemda (milik swasta) sehingga salah satu upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan adalah melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan penataan perbengkelan guna meningkatkan kapasitas bengkel umum agar memenuhi standar.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 7 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,0	2,78	2,90	2,78	95,86	●	92,67	▲	Dinas Kominfo
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	96,00	89,56	95,70	89,56	93,58	●	93,3	▲	Dinas Kominfo
RATA -RATA								94,72	●	92,98	▲	
1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PPID badan publik yang aktif	%	20	14,66	18	16,42	100	●	90,91	▲	Dinas Kominfo
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	30	21,88	25	21,88	87,50	●	72,92	▼	Dinas Kominfo
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Dinas Kominfo
2.	Program pengelolaan	Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	100	88,10	100	88,10	85	●	85	▲	Dinas Kominfo

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	aplikasi informatika	Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	50	16,99	40	48,98	100	●	100	▲	Dinas Kominfo
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	60	52,15	55	68,37	100	●	100	▲	Dinas Kominfo
		Persentase ketersediaan akses internet publik	%	100	73,33	100	73,33	73,33	●	73,33	▼	Dinas Kominfo
RATA-RATA								92,22	●	88,83	▲	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah

Berdasarkan tabel diatas Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 7 indikator kinerja program, capaian triwulan II tahun 2022 pada indikator kinerja sasaran dan indikator program semua indikator berstatus telah tercapai.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 5 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya investasi sektor riil	Persentase Koperasi sehat	%	10,71	7,35	9,50	8,22	86,52	●	76,74	▼	Dinkopdag
		Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	%	0,015	0,0035	0,014	0,0035	25,06	▲	23,39	▼	Dinkopdag
RATA - RATA								55,79		50,07	▼	
1.	Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi aktif	%	12	22,86	20	24,29	100	●	100	●	Dinkopdag
2.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	%	30	3,98	25	0,42	1,69	▼	1,41	▼	Dinkopdag
3.	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	%	75	57,35	37,5	44,52	100	●	59,36	▼	Dinkopdag
4.	Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha	Persentase usaha mikro aktif	%	35	33,07	34	33,01	97,08	●	94,31	▲	Dinkopdag
		Persentase Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha	%	1,07	0,92	0,72	1,196	100	●	100	●	Dinkopdag

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mikro UKM											
RATA-RATA								79,75		71,02		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 5 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2022 pada 2 indikator kinerja sasaran berstatus telah tercapai dan akan tercapai. Sedangkan dari 5 indikator kinerja program, 4 indikator berstatus telah tercapai dan 1 indikator kinerja dengan status upaya keras yaitu persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi. Faktor penghambat belum tercapainya target indikator ini ialah karena masih banyak koperasi yang belum melaporkan laporan keuangan, adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi kegiatan usaha koperasi termasuk kondisi keuangan. Guna merubah status upaya keras menjadi akan tercapai pada akhir tahun 2022 hal yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan adalah melakukan fasilitasi pendataan, pendampingan dan penyuluhan terhadap koperasi untuk meningkatkan aset dan omset koperasi.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya investasi sektor riil	Indeks Kemudahan Berusaha	Angka	65	78,00	62,5	78,00	100	●	100	●	DPM
Rata - Rata								100	●	100	●	
1.	Program Pengembangan Iklim penanaman modal	Nilai realisasi investasi	Milyar	625	1.496,68	520	636,75	100	●	100	●	DPM
		Persentase sediaan kajian teknis potensi investasi	%	10	28,13	10	28,13	100	●	100	●	DPM
		Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan perizinan yang terlatih	%	100	44,19	100	44,44	44,44	▲	44,44	▼	DPM
2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sector/bidang unggulan	%	100	60,0	100	100	100	●	100	●	DPM
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	98,35	100	98,69	98,69	●	98,69	▲	DPM
		Persentase perijinan yang bebas calo	%	100	100	100	100	100	●	100	●	DPM
		Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	100	95	100	100	●	100	●	DPM

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Perzinan yang Penanaman Modal	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Perzinan yang diterbitkan	%	100	94	100	100	100	●	100	●	DPM
		Persentase Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	●	100	●	DPM
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100	100	100	100	●	100	●
RATA- RATA								94,31	●	94,31	▲	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah

Berdasarkan tabel diatas Bidang Penanaman Modal terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dengan status telah tercapai dan 10 indikator kinerja Program dengan capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2022 dengan status telah tercapai 8 indikator, akan tercapai 1 indikator, dan 1 indikator dengan status upaya keras. Indikator dengan Upaya Keras yaitu Persentase ketersediaan SDM bidang Penanaman Modal dan perizinan yang terlatih, hal ini dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia dibidang Penanaman Modal. Guna merubah status menjadi akan tercapai pada akhir tahun 2022 maka dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/bintek dan juga diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaran pemerintah daerah Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 5 indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capain RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	3,56	3,57	3,50	3,78	100		100		Dindikpora
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	3,41	3,31	3,00	3,31	100,00		97,07		Dindikpora
RATA-RATA								100,00		98,53		
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	80,76	93,10	73,00	93,10	100		100		Dindikpora
2	Program pembinaan dan	Prosentase pelatih olahraga bersertifikat	%	35,40	56,06	33,60	100	100		100		Dindikpora
		Persentase prestasi olah raga	%	59,00	10,81	53,80	21,62	38,34		36,65		Dindikpora

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capain RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
	pemasyarakat an olahraga	Persentase atlet berprestasi	%	21,00	23,28	19,00	46,81	100	●	100	●	Dindikpora
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	%	92,89	80,61	87,31	80,61	89,47	●	86,79	▲	Dindikpora
RATA-RATA								89,69	●	88,64	▲	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, bidang kepemudaan dan olahraga terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 5 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan triwulan II tahun 2022 pada indikator kinerja sasaran berstatus telah tercapai. Sedangkan pada indikator kinerja program, terdapat 4 indikator berstatus telah tercapai dan 1 indikator akan tercapai.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Statistik terdiri dari 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Program Penyelenggara an Statistik Sektoral	Cakupan ketersediaan data makro daerah	%	100	66,67	100	100	100	●	100	●	Dinas Kominfo
Rata - rata								100	●	100	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, bidang statistik terdiri dari 1 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan triwulan II tahun 2022 pada indikator kinerja program dengan status telah tercapai, didukung dengan adanya sinergitas kerja sama Dinkominfo dan BPS Temanggung dan ketersediaan data di setiap OPD.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian terdiri dari 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022(%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi. s.d. TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan	Tingkat penilaian persiapan/ pengelolaan resiko keamanan informasi	%	19,5	15,38	16	18,37	100	●	94,19	▲	Dinas Kominfo
RATA-RATA								100	●	94,19	▲	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang persandian memiliki 1 indikator kinerja program dengan status telah tercapai mengenai tingkat penilaian persiapan/ pengelolaan resiko keamanan informasi.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan terdiri dari 1 Indikator kinerja Sasaran dan 4 indikator kinerja program daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.25

Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun2021	Tahun2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	3,51	3,31	3,41	3,31	97,07	●	94,30	▲	Dinbudpar
RATA-RATA								97,07	●	94,30	▲	
1	Program pengembangan kebudayaan	Persentase kelompok seni budaya yang produktif	%	80,64	125,61	72,58	125,61	100	●	100	●	Dinbudpar
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kelompok kesenian yang produktif	%	32,16	28,98	26,09	29,18	100	●	90,74	▲	Dinbudpar
3	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pelestarian Sejarah Lokal	%	6,73	2,64	5,38	2,64	49,13	▲	39,27	▼	Dinbudpar
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase pelestarian cagar budaya	%	5,18	3,63	4,66	3,63	77,83	●	70,02	▼	Dinbudpar
RATA-RATA								81,74	●	75,01	▼	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dengan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2022 dengan status telah tercapai dan 4 indikator kinerja program dengan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2022 dengan status telah tercapai 3 indikator dan akan tercapai 1 indikator.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kinerja penyelenggaran Bidang Perpustakaan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 3 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2022 s.d Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Persentase peminjam di perpustakaan	%	82	75,38	80	45,57	56,96		55,57		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
RATA-RATA								56,96		55,57		
1	Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan	Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	%	40	-79,20	35	-9,88	0		0		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase perpustakaan yang aktif	%	35,62	39,45	35,35	39,46	100		100		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Cakupan naskah kuno Kabupaten Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarikan	%	100	0,039	75	0,039	0,05	▼	0,04	▼	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
RATA-RATA								33,35	▲	33,35	▼	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang perpustakaan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 3 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2022 pada 1 indikator kinerja sasaran berstatus telah tercapai. Sedangkan dari 3 indikator kinerja program, 1 indikator kinerja berstatus telah tercapai dan 2 indikator kinerja dengan status upaya keras. Faktor penghambat belum tercapainya target pada indikator Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan ialah menurunnya pengunjung perpustakaan di desa/kelurahan, sekolah, TBM dan Perpustakaan daerah disebabkan adanya pandemi Covid-19. Sedangkan faktor penghambat pada pencapaian indikator Cakupan naskah kuno Kabupaten Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarikan ialah masih terbatas penulis yang mengangkat tema budaya enis nusantara, hasil koordinasi melalui media sosial ke masyarakat belum diketahui kepemilikan naskah kuno, kegiatan penelusuran langsung belum dilaksanakan dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk covid-19, belum terdapat anggaran khusus untuk pengadaan bahan perpustakaan untuk koleksi naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara.

Guna merubah status upaya keras menjadi akan tercapai pada akhir tahun 2022 hal-hal yang dilakukan Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan adalah :

- a. Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan : Terus mempromosikan gemar membaca secara intensif kepada masyarakat.
- b. Cakupan naskah kuno Kabupaten Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarikan : Melaksanakan kegiatan penelusuran naskah kuno di wilayah Kabupaten Temanggung, Pengadaan bahan perpustakaan untuk koleksi naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara, Mengadakan kegiatan lomba penulisan dengan tema budaya etnis nusantara khususnya daerah Temanggung.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kinerja penyelenggaran pemerintah daerah Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan terdiri dari 1 indikator sasaran dan 2 indikator, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	67	54,02	66,50	0	0	▼	0	▼	Dinpusip

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
Rata - Rata								0	▼	0	▼	
1	Program pengelolaan dan pelestarian arsip daerah	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	31,98	32,56	29,07	0	0	▼	0	▼	Dinpusip
		Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	%	50	30,02	40	31,65	79,13	●	63,31	▲	Dinpusip
RATA-RATA								39,56	▲	31,66	▼	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah

Dari 3 indikator Bidang Kearsipan, 1 indikator sasaran dengan status tidak tercapai, karena kegiatan belum dilaksanakan. Upaya untuk mencapai target pada tahun 2022 adalah terus melakukan pembinaan dan pembenahan arsip pada OPD, disamping itu ada faktor pendorong pencapaian target, yaitu adanya bimtek dan monitoring kearsipan. Sedangkan dari 2 indikator program, satu indikator statusnya telah tercapai, dan satu indikator perlu upaya keras, yaitu persentase pengelolaan arsip secara baku karena kegiatan mengalami refokusing sehingga tidak dilaksanakan. Upaya untuk mencapai indikator tersebut adalah terus melakukan pembinaan dan monitoring bagi unit kerja yang sudah menerapkan arsip secara baku maupun yang belum, perlu mengupayakan anggaran dan sarana prasarana bisa terpenuhi agar arsip yang dialihmediakan bisa menjangkau di tingkat desa.

2.4 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang perikanan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28

Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 s.d Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kedaulatan pangan	Tingkat konsumsi ikan	kg/kap/th	21,34	24,34	21,29	13,63	64,02		63,87		DKPPP
RATA - RATA								64,02		63,87		
1.	Program pengelolaan perikanan budidaya	Produktivitas Ikan Nila	Kg/m2	6,20	4,05	5,40	5,32	98,44		85,74		DKPPP
		Produktivitas Ikan Lele	Kg/m2	13,80	10,76	12,60	10,88	86,35		78,84		DKPPP
		Produktivitas Ikan Mas	Kg/m2	6,00	5,62	5,80	1,65	28,45		27,50		DKPPP
2.	Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	30,00	12,48	20,00	29,82	100		99,39		DKPPP
3.	Program pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	%	33,00	222,22	33,00	55,00	100		100		DKPPP

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	%	100	100	100	100	100		100		DKPPP
RATA-RATA								85,54		81,91		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang kelautan dan perikanan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2022 pada 1 indikator kinerja sasaran berstatus telah tercapai. Sedangkan dari 6 indikator kinerja program, 5 indikator berstatus telah tercapai dan 1 indikator kinerja dengan status akan tercapai.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja berikut ini

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi s.d Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,65	1,53	1,63	1,53	93,87	●	92,73	▲	Dinbudpar
RATA-RATA								93,87	●	92,73	▲	
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase obyek wisata yang berkembang	%	41,66	31,25	37,50	32,29	86,11	●	77,51	▼	Dinbudpar
		Pertumbuhan jumlah wisatawan	%	21	20,00	-0,11	(0,87)	0,00	▼	0,00	▼	Dinbudpar
		Lama tinggal wisatawan	%	1	1	1	1	100	●	100	●	Dinbudpar
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan desa wisata	%	11,76	7,27	10,03	7,27	72,45	▲	61,79	▼	Dinbudpar
		Persentase desa wisata naik klasifikasi	%	5	0,00	5	0	0	▼	0	▼	Dinbudpar
		Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	9,02	0	2	0	0	▼	0	▼	Dinbudpar
Rata-Rata								58,20	▲	53,67	▼	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah

Berdasarkan tabel diatas bidang Pariwisata terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja akan tercapai

dan 6 indikator kinerja Program dengan capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2022 dengan status telah tercapai 1 indikator, tidak ada indikator akan tercapai, dan 5 indikator dengan status upaya keras.

Adapun Permasalahan yang ada di bidang Pariwisata adalah

- a. Keterbatasan jumlah SDM dalam melakukan pendataan pelaku ekonomi Kreatif (ekraf) dan belum ada aturan secara detail yang menentukan pelaku ekraf,
- b. Untuk penentuan kenaikan klasifikasi Desa wisata, Tim Assesmen mengadakan assesmen kepada Desa wisata yang akan naik klasifikasi dengan pemenuhan kriteria yang telah ditentukan oleh Provinsi. Assesmen dilakulan 4 tahun sekali sesuai dengan Pergub tahun 2019 pasal 14 tentang Desa Wisata
- c. Masih rendahnya ketertarikan & pemahaman desa untuk membentuk desa wisata
- d. Kurangnya fasilitas hotel yang mendukung untuk menerima tamu dalam jumlah besar seperti jumlah kamar, aula/ ruang pertemuan, & fasilitas pendukung acara lainnya. Promosi yang belum maksimal. Dinamika kebijakan seperti adanya pembatasan kegiatan masyarakat.
- e. Laporan jumlah wisatawan yang datang ke Destinasi Wisata di Kabupaten Temanggung baik Wisatawan lokal dan Mancanegara belum update.
- f. Kurangnya fasilitas hotel yang mendukung untuk menerima tamu dalam jumlah besar seperti jumlah kamar, aula/ ruang pertemuan, & fasilitas pendukung acara lainnya. Promosi yang belum maksimal. Dinamika kebijakan seperti adanya pembatasan kegiatan masyarakat.

Guna merubah status menjadi akan tercapai pada akhir tahun 2022 upaya sebagai berikut :

- a. Pembinaan / pendampingan dari perencanaan & pengelolaan destinasi.
- b. Membuka peluang masuknya investor untuk ikut berinvestasi tapi tetap berpegang pada prinsip pariwisata yang berkelanjutan (memperhatikan kelestarian lingkungan)
- c. Peningkatan kualitas sumber daya pengelola destinasi & manajemen event. Penyediaan sarpras pendukung di destinasi. Promosi yang intens dilakukan terutama lewat media sosial.
- d. Peningkatan intensitas pembinaan/ pendampingan desa wisata
Penambahan jumlah SDM pendata Ekonomi Kreatif.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang pertanian terdiri dari 3 indikator kinerja sasaran dan 23 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah Target
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1		Tingkat ketersediaan energi perkapita		2935	2934	2930	1.396,11	47,65	▲	47,57	▼	DKPPPP
		Tingkat ketersediaan protein perkapita		103,8	62,59	103,6	33,91	32,73	▲	32,66	▼	DKPPPP

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah Target
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
		Tingkat ketersediaan lemak perkapita		37,50	78,97	37,25	37,55	100,00	●	100,00	●	DKPPPP
RATA - RATA								60,13	●	60,08	▼	
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produktivitas Padi	kwintal/ha	63,3	59	63,15	59,00	93,43	●	93,21	▲	DKPPPP
		Peningkatan Produktivitas Jagung	kwintal/ha	46	45	45,95	49,00	100,00	●	100,00	●	DKPPPP
		Peningkatan Produktivitas Ubi Kayu	kwintal/ha	339,8	329,12	339,7	330,00	97,14	●	97,12	▲	DKPPPP
		Produktivitas bawang putih	kwintal/ha	79,6	65,1	79,45	48,66	61,25	●	61,13	▼	DKPPPP
		Produktivitas bawang merah	kwintal/ha	80,15	71,40	80	62,83	78,54	●	78,39	▼	DKPPPP
		Produktivitas cabai rawit	kwintal/ha	55,00	69,87	55	34,13	62,05	●	62,05	▼	DKPPPP
		Produktivitas cabai besar	kwintal/ha	69,5	70,57	69,4	47,52	68,48	●	68,38	▼	DKPPPP
		Prokduktivitas tembakau	kwintal/ha	6,8	6,88	6,75	6,88	100	●	100	●	DKPPPP
		Produktivitas kopi robusta	kwintal/	7,25	7,15	7,2	5,51	100	●	98,62		DKPPPP

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah Target
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
			ha								▲	
		Produktivitas kopi arabika	kwintal/ ha	7	6,11	6,9	1,89	89,85	●	87,29	▲	DKPPPP
		Produktifitas Cengkeh	kwintal/ ha	2,45	2,32	2,35	4,27	100	●	94,69	▲	DKPPPP
		Produktivitas Vanili	kwintal/ ha	2,95	2,93	2,95	2,93	100	●	99,32	▲	DKPPPP
		Produktivitas ternak sapi	Kg/Ekor	177,60	177,20	177,4	177,30	99,94	●	99,83	▲	DKPPPP
		Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,71	13,69	13,7	13,69	99,93	●	99,85	▲	DKPPPP
		Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,71	13,69	13,7	13,69	99,93	●	99,85	▲	DKPPPP
		Produktivitas ternak ayam ras pedaging	Kg/Ekor	0,75	0,75	0,75	0,75	100	●	100	●	DKPPPP
		Produktivitas ternak ayam ras petelur	Kg/Ekor	10,88	10,26	10,88	5,18	47,58	▲	47,58	▼	DKPPPP
		Produktivitas ternak ayam buraas	Kg/Ekor	0,7	0,70	0,7	0,70	100	●	100	●	DKPPPP
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	76,55	76,64	76,50	76,72	100	●	100	●	DKPPPP

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah Target
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
	Prasarana Pertanian											
3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penanganan penyakit hewan	%	90	96,68	85	100	100	●	100	●	DKPPPP
		Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	70	82,96	70	73,81	100	●	100	●	DKPPPP
4.	Program Pengendalian dan Penanggulan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian bencana pertanian	%	40,30	41,20	40,25	54,45	100	●	100	●	DKPPPP
5.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	0,98	0,81	0,83	0,81	97,84	●	82,87	▲	DKPPPP
RATA-RATA								91,13	●	90,01	▲	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang pertanian terdiri dari 3 indikator kinerja sasaran dan 23 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan triwulan II tahun 2022 pada indikator kinerja sasaran terdapat 1 indikator berstatus telah tercapai dan 2 indikator dengan status akan tercapai. Sedangkan capaian pada indikator program terdapat 21 indikator berstatus telah

tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang perdagangan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 7 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31

Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20	20,14	19,5	20,14	100	●	100	●	Dinkopdag
Rata - Rata								100	●	100	●	
1.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	%	67	50	67	50	74,63	●	74,63	▼	Dinkopdag
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	70	29,59	60	29,59	64,06	●	54,91	▼	Dinkopdag
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%	90	64,45	90	9,63	57,77	●	57,77	▼	Dinkopdag
		Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	%	34	13,17	32	4,47	27,17	▲	25,58	▼	Dinkopdag

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	%	68,41	69,32	68,37	68,49	46,88	▲	46,86	▼	Dinkopdag
3.	Program Pengembangan ekspor	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB Sektor Perdagangan	%	2,56	32,09	2,32	3,66	100	●	100	●	Dinkopdag
4.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera ulang	unit	95	79,02	90	7,90	33,37	▲	35,13	▼	Dinkopdag
Rata-Rata								69,14	●	63,71	▼	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah

Berdasarkan tabel di atas bidang perdagangan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 7 indikator kinerja program, capaian triwulan II tahun 2022 pada indikator kinerja sasaran ada 1 yang berstatus telah tercapai, sedangkan pada indikator kinerja program ada 4 indikator telah tercapai, dan 3 indikator berstatus akan tercapai. Faktor penghambatnya antara lain adalah adanya kerusakan (bocor) pada beberapa ruangan di pasar sehingga pedagang tidak menempati ruangan yang disediakan karena khawatir dagangannya

rusak. Salah satu upaya yang diambil adalah dengan mengajukan penambahan anggaran untuk perbaikan pasar.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang perindustrian terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022(%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah	
						Target	Realisasi s.d Tw II						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi sektor perindustrian Terhadap PDRB	%	27	27,47	26	27,47	100	●	100	●	Dinperinaker	
Rata-Rata									100	●	100	●	
1.	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	35	18,46	33	64,62	100	●	100	●	Dinperinaker	
2.	Program Pengendalian ijin usaha industry Kab/Kota	Prosentase pembinaan industri penghasil cukai	%	5,3	2,09	4,77	3,21	67,34	●	60,61	▼	Dinperinaker	
Rata-Rata									83,67	●	80,30	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang perindustrian terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dengan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2022 dengan status telah tercapai dan 2 indikator program dengan status telah tercapai.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi terdiri dari 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase calon transmigran yang mendapatkan pembekalan	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Dinperinaker
Rata - rata								100	●	100	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang transmigrasi terdiri dari 1 indikator kinerja program dengan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2022 dengan status telah tercapai. Faktor yang mendorong capaian tersebut adalah adanya kuota dari

pusat dan calon transmigrant tidak mengundurkan diri, sehingga tercapai sesuai target.

2.5 Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaran Sekretariat Daerah terdiri dari 3 indikator kinerja sasaran dan 21 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34

Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Angka	3,5	3,35	3,45	3,35	97,10	●	95,71	▲	Setda
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	%	25	50	20	50	100	●	100	●	Setda
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	-	BB	B	BB	B	91,07	●	91,07	▲	Setda
RATA-RATA								96,06	●	95,59	▲	
1	Program pemerintahan dan kesejahteraan	Cakupan pilar batas yang terinventarisir	%	100	100	100	49,18	49,18	▲	49,18	▼	Setda

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	rakyat	Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Setda
		Cakupan kecamatan tertib administrasi	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Setda
		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	90	89,31	88	90	100	●	100	●	Setda
		Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	%	30	27,27	30	0	0	▼	0	▼	Setda
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	82,22	100	18,87	18,87	▼	18,87	▼	Setda
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	%	90	100	90	100	100	●	100	●	Setda
		Persentase permasalahan hukum yang ditangani secara litigasi	%	75	100	75	100	100	●	100	●	Setda
		2.	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	100	●	100
Persentase jaminan keamanan produk	%			100	100	100	100	100	●	100	●	Setda

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		barang bersubsidi										
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	80	50	66,67	50	75,00	●	62,50	▼	Setda
		Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	14,56	14,56	▼	14,56	▼	Setda
3.	Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	Persentase pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan	%	100	100	100	11,63	11,63	▼	11,63	▼	Setda
		Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	%	100	100	100	17,41	17,41	▼	17,41	▼	Setda
		Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	100	18,13	50	0,77	1,5	▼	0,77	▼	Setda
		Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Setda
		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	95	96,50	92	100	100	●	100	●	Setda

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	50	50	●	50	▼	Setda
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	%	100	100	100	45,74	45,74	▲	45,74	▼	Setda
		Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKJIP	%	74,5	100	70,20	100	100	●	100	●	Setda
		Persentase pemenuhan Pelayanan kedinasan pimpinan Daerah	%	100	100	100	50	50	●	50	▼	Setda
RATA-RATA								63,52	●	62,89	▼	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat Daerah, capaian indikator sasaran dengan status telah tercapai sejumlah 3 indikator. Di sisi lain, pada indikator kinerja program dimana capaian kinerja dengan status telah tercapai sejumlah 13 indikator, akan tercapai sejumlah 2 indikator dan status upaya keras sejumlah 6 indikator. Beberapa hal yang masih menjadi kendala dan tindaklanjutnya untuk dapat mengubah status dari upaya keras menjadi akan tercapai di tahun 2022 antara lain:

- a. Koordinasi yang intens antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam

penyusunan dokumen Peraturan Bupati untuk dapat meningkatkan capaian persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati. Adapun upaya yang dilakukan oleh Bagian Hukum Setda berkoordinasi dengan Perangkat Daerah pengusul Perda untuk lebih pro aktif dalam mengusulkan Perbup sesuai kebutuhan yang diamanatkan dalam Perda.

- b. Penyetoran produk hukum dari setiap OPD yang masih lambat dan aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa produk hukum yang memiliki volume tebal. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum Setda melalui upaya peningkatan ketertiban administrasi Perangkat Daerah yang mengusulkan Perda dan Perbup serta secepatnya menyampaikan dokumen tersebut yang sudah diundangkan ke Bagian Hukum untuk dapat diinput di JDIIH sehingga indikator persentase dokumentasi perundangan melalui JDIIH dapat tercapai.
- c. Persiapan perencanaan dari Perangkat Daerah dan kebijakan dari masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang ditindaklanjuti oleh Bagian PBJ Setda dengan membuat Surat Sekda terkait pengisian SIRUP Tahun Anggaran 2022 serta percepatan kegiatan PBJ melalui rapat koordinasi dan sinergi dengan Bagian Pembangunan Setda sehingga target persentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan serta persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan dapat tercapai.
- d. Integrasi aplikasi belanja online dengan pencatatan non-tender di LPSE yang ditindaklanjuti oleh Bagian PBJ Setda melalui Surat Sekda tentang Pencatatan Non Transaksional pada SPSE versi 4.4 sehingga persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat tercapai.
- e. SDM yang kompeten dalam perencanaan, perubahan kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana DAK

(mapping anggaran DAK), dan keterbatasan personil yang bersertifikat pengadaan barang/jasa dan/atau personil yang memahami barang/jasa, beberapa barang pada aplikasi E-Catalogue belum tayang seperti alat kesehatan dan obat serta adanya koreksi dan perhitungan ulang spesifikasi teknis dengan adanya TKDN sehingga upaya yang dilakukan oleh Bagian Pembangunan Setda antara lain penyediaan regulasi yang jelas dan terbit di awal tahun, peningkatan SDM yang memahami teknis perencanaan, dan peningkatan jumlah personil/SDM yang bersertifikat pengadaan barang/jasa dan/atau SDM yang memahami barang/jasa.

2. Sekretariat DPRD

Kinerja penyelenggaran Sekretariat DPRD terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 3 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana berikut:

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	%	91,50	80	91	0	0	▼	0	▼	Sekretariat DPRD
RATA-RATA								0	▼	0	▼	

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	%	26,67	10	26,67	0	0	▼	0	▼	Sekretariat DPRD
		Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100	100	100	15,33	15,33	▼	15,33	▼	Sekretariat DPRD
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	58	82,16	57	77,60	100	●	100	●	Sekretariat DPRD
RATA-RATA								38,44	▲	38,44	▼	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah

Berdasarkan pada tabel diatas, capaian indikator sasaran masih berstatus upaya keras dikarenakan proses pembahasan Raperda membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga Sekretariat DPRD berupaya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah supaya lebih awal dalam menyusun Raperda yang masuk dalam daftar judul Raperda di Propemperda. Sedangkan untuk capaian indikator kinerja program terdapat 1 indikator telah tercapai dan 2 indikator dengan status upaya keras. Proses pembahasan Raperda inisiatif yang membutuhkan waktu cukup lama menjadikan belum tercapainya target indikator persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda sehingga Sekretariat DPRD melakukan upaya untuk pembahasan penambahan jumlah Raperda inisiatif tersebut di Triwulan III dan IV. Disisi lain, kegiatan aspirasi belum semua terlaksana sesuai rencana karena waktu pelaksanaannya baru sampai dengan Triwulan II yang menjadikan hal tersebut menjadi upaya

keras, dimana Sekretariat DPRD akan tetap melanjutkan kegiatan aspirasi yang belum terlaksana sesuai rencana di Triwulan III dan IV.

2.6 Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan terdiri dari 4 indikator kinerja sasaran, dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	%	4,2	4,5	4,1	4,5	100	●	100	●	BAPPEDA
		Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	90	84,57	89	84,57	96,10	●	93,96	▲	BAPPEDA
		Manajemen Risiko Indeks	Level	Level 2	Level 2	Level 1	Level 2	100	●	100	●	BAPPEDA
		Indeks Inovasi Daerah	predikat	Sangat inovatif	Inovatif	Sangat inovatif	Inovatif	75	●	75	▼	BAPPEDA
Rata-Rata								92,76	●	92,24	▲	

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	●	100	●	BAPPEDA
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	95	87,22	90	85,71	95,24	●	91,81	▲	BAPPEDA
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	%	90	100	90	91,94	100	●	100	●	BAPPEDA
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	90	100	90	97,30	100	●	100	●	BAPPEDA
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	90	100	90	95,73	100	●	100	●	BAPPEDA
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra	%	90	100	90	81,58	90,64	●	100	●	BAPPEDA

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d Tw II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		perangkat daerah sub bidang infrastruktur										
RATA-RATA								97,64		98,63		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah.

Berdasarkan tabel diatas pada fungsi penunjang perencanaan terdiri dari 4 indikator kinerja sasaran, dan 6 indikator kinerja program, capaian triwulan II tahun 2022 pada indikator kinerja sasaran dan indikator program berstatus telah tercapai.

Untuk meningkatkan capaian yang berstatus masih upaya keras pada indikator sasaran Indeks inovasi daerah diperlukan peningkatan desiminasi dan pembinaan inovator menjadi *start Up*.

2. Keuangan

Kinerja penyelenggaran keuangan terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran, dan 14 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.37

Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	%	15	18,67	15	7,39	49,26	▲	49,26	▼	BPKPAD
		Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		79,5	69,52	79,4	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
RATA-RATA								49,26	▲	49,26	▼	
1.	Program pengelolaan Keuangan daerah (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	100	99,77	100	79,83	79,83	●	79,83	▼	BPKPAD
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	89,96	100	89,96	100	100	●	100	●	BPKPAD
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100	100	42,86	42,86	▲	42,86	▼	BPKPAD
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	●	100	●	BPKPAD
		Persentase realisasi keuangan	%	93	89	93	32,29	34,72	▲	34,72	▼	BPKPAD
		Cakupan Laporan keuangan daerah yang akuntabel	%	90	89,13	90	91,30	100	●	100	●	BPKPAD
		Opini BPK atas LKPD	%	WTP	WTP	WTP	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
2	Program Pengelolaan Barang Milik	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	88,1	84,52	86,31	95,15	100	●	100	●	BPKPAD

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Daerah	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	99,1	78,83	98,9	78,83	79,71	●	79,55	▼	BKPAD
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	1,27	0,70	0,96	0,54	55,80	●	42,20	▼	BKPAD
		Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	●	100	●	BKPAD
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	●	100	●	BKPAD
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	95	103,54	90	46,57	51,75	▲	51,75	▼	BKPAD
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	95	100	95	100	100	●	100	●	BKPAD
RATA-RATA								80,36	●	79,09	▼	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan terdapat 1 indikator kinerja sasaran dengan status akan tercapai. Di sisi lain, masih terdapat 1 indikator kinerja sasaran yang belum terdapat angka capaiannya (n.a) berkaitan dengan indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) yang sudah diinputkan datanya oleh BKPAD Kabupaten Temanggung pada website IPKD Kemendagri dimana posisi saat ini sedang menunggu perhitungan provinsi dan pusat untuk

IPKD Kabupaten/Kota.

Selain itu, capaian indikator kinerja program hingga Triwulan II tahun 2022 terdapat 10 indikator dengan status telah tercapai dan 3 indikator dengan status akan tercapai. Terdapat 1 indikator yang angka capaiannya belum dapat disampaikan yaitu opini BPK atas LKPD dimana hasil untuk tahun 2022 akan diumumkan pada tahun 2023 sehingga BPKPAD akan terus melakukan monitoring laporan keuangan serta melaksanakan asistensi kepada Perangkat Daerah sebagai upaya untuk pencapaian Opini WTP dari BPK atas LKPD Tahun 2022 dari Kabupaten Temanggung.

3. Kepegawaian

Kinerja penyelenggaran kepegawaian terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.38

Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Kepegawaian Tahun 2022 ssampai dengan Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Indeks Profesionalisme ASN	Angka	50,09	51,247	50,07	52,55	100	●	100	●	BKPSDM
		<i>Indeks Merit System</i>	Angka	0,61	0,259	0,51	0,259	50,78	●	42,46	▼	BKPSDM

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rata-rata								75,39	●	71,23	▼	
1.	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penyusunan formasi pegawai	%	100	100	100	100	100	●	100	●	BKPSDM
		Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	%	100	100	100	100	100	●	100	●	BKPSDM
		Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	%	100	100	100	99,25	99,25	●	99,25	▲	BKPSDM
		Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas	%	80	90,33	80	37,04	46,30	▲	46,30	▼	BKPSDM
		Persentase Perempuan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.	%	48	46,96	47	90,94	100	●	100	●	BKPSDM
		Persentase pelanggaran disiplin ASN	%	0,2	0,25	0,2	42,28	89,95	●	88,08	▲	BKPSDM
		Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	%	90	86,67	90	0	100	●	100	●	BKPSDM

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	%	95	100	95	86,05	90,57	●	90,57	▲	BKPSDM
		Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	%	100	100	100	100	100	●	100	●	BKPSDM
RATA-RATA								90,76	●	90,55	▲	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 2 indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2022 pada 2 indikator kinerja sasaran yang kedua indikator tersebut berstatus telah tercapai. Namun demikian, perlu adanya kerja sama dan komitmen, baik dalam intern BKPSDM maupun dengan instansi yang terkait dengan penerapan Sistem Merit, yaitu:

1. Bagian Organisasi Setda (menyusun standar kompetensi jabatan, anjab ABK, dan peta jabatan),
2. Bagian Hukum Setda (terkait dengan peraturan/kebijakan)
3. Bappeda.

Sedangkan dari 9 indikator kinerja program, 8 indikator berstatus telah tercapai dan 1 indikator dengan status akan tercapai.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terdiri dari 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Pengawas yang memiliki Kompetensi Diklat Kepemimpinan	%	35	21,29	32	21,29	66,53	●	60,83	▼	BKPSDM
		Persentase ASN yang memiliki kompetensi Teknis dan Fungsional sesuai jabatannya	%	18	14,57	13,5	2,46	18,20	▼	13,65	▼	BKPSDM
RATA-RATA								42,37	▲	37,24	▼	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 2 indikator kinerja program

terdapat 1 indikator berstatus telah tercapai dan 1 indikator berstatus upaya keras. Terdapat faktor penghambat seperti sejak tahun 2020 dengan adanya Covid -19 maka penyelenggaraan maupun pengiriman peserta Bimtek/diklat teknis fungsional mengalami penundaan dan untuk Bimtek TF, berkurangnya anggaran untuk Bimtek TF krn refocusing covid 19, sehingga mengurangi target peserta bimtek dan berdampak pada capaian indikator di tahun 2022. Guna merubah status upaya keras menjadi akan tercapai pada akhir tahun 2022 hal-hal yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah melakukan kerjasama dengan Badan Diklat Kemendagri dan Badan Diklat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan perlu dikomunikasikan ke BPSDMD untuk penyelenggaraan Bimtek TF secara virtual.

5. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaran Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan terdiri dari 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.40

Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPd 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPd	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1.	Program penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Bappeda
		Persentase hasil kreasi dan inovasi yang dikembangkan	%	65	100	60	100	100	●	100	●	Bappeda
RATA-RATA								100	●	100	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, Kinerja penyelenggaran Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 2 indikator kinerja program berstatus telah tercapai. Terdapat faktor pendorong yaitu indikator sasaran PD, dan faktor penghambat Komitmen stakeholder dalam memanfaatkan hasil kelitbangan dan dukungan pemerintah dari lingkup kabupaten sampai dengan pusat dalam mendorong pengembangan hasil Krenova menjadi Start Up.

2.7 Evaluasi Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Kinerja pengawasan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja

tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah	
						Target	Realisasi s.d TW II						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,95	3,61	3,93	4,29	100	●	100	●	Inspektorat	
RATA-RATA									100	●	100	●	
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Inspektorat	
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	46	35,21	42	66,20	100	●	100	●	Inspektorat	
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	23	12,37	17	14,34	84,33	●	62,33	▼	Inspektorat	
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas	%	48	15,46	31	22,40	72,25	●	46,66	▼	Inspektorat	

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa										
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai maturitas SPIP	Angka	3,3	3,045	3,15	3,045	96,67	●	92,27	▲	Inspektorat
		Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	60	40	40	40	100	●	66,67	▼	Inspektorat
		Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Inspektorat
		Nilai Survey Penilaian Integritas	Angka	81,97	78,70	81,77	78,70	96,25	●	96,01	▲	Inspektorat
		Prosentase penanganan aduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Inspektorat
RATA-RATA								94,39	●	86,39	▲	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, kinerja pengawasan diimplementasikan oleh Inspektorat dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2022 pada 1 indikator kinerja sasaran berstatus telah

tercapai. Sedangkan dari 9 indikator kinerja program, semuanya telah mencapai target.

2.8 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan

Capaian Kinerja Penyelenggaran Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi terdiri dari 1 indikator sasaran kinerja daerah dan 9 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD
						Target	Realisasi s.d TW II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata IKM di Kecamatan	%	84,00	84,29	83,50	82,88	99,34	●	99,07	▲
		Temanggung	%	84,00	85,20	83,50	85,20	100	●	100	●
		Tembarak	%	84,00	85,75	83,50	85,75	100	●	100	●
		Pringsurat	%	84,00	83,00	83,50	83,00	99,40	●	98,81	▲
		Kaloran	%	84,00	83,00	83,50	83,50	100	●	99,40	▲
		Parakan	%	84,00	81,02	83,50	81,02	97,03	●	96,45	▲
		Bulu	%	84,00	84,9	83,50	84,90	100	●	100	●
		Kedu	%	84,00	88,39	83,50	88,39	100	●	100	●
		Kandangan	%	84,00	85,97	83,50	83,87	100	●	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD
						Target	Realisasi s.d TW II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Candiroto	%	84,00	87,38	83,50	87,38	100	●	100	●
		Ngadirejo	%	84,00	88,41	83,50	88,41	100	●	100	●
		Jumo	%	84,00	90,52	83,50	99,81	100	●	100	●
		Wonoboyo	%	84,00	84,22	83,50	84,22	100	●	100	●
		Kranggan	%	84,00	83,07	83,50	83,07	99,49	●	98,89	▲
		Bejen	%	84,00	84,08	83,50	84,08	100	●	100	●
		Kledung	%	84,00	81,46	83,50	81,46	97,56	●	96,98	▲
		Bansari	%	84,00	79,91	83,50	82,00	98,20	●	97,62	▲
		Tlogomulyo	%	84,00	83,06	83,50	83,06	99,88	●	99,88	▲
		Selopampang	%	84,00	80,71	83,50	80,71	96,66	●	96,08	▲
		Gemawang	%	84,00	82,33	83,50	82,33	98,59	●	98,01	▲
		Tretep	%	84,00	83,47	83,50	83,47	99,96	●	99,37	▲
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	100	98,42	100	99,65	99,65	●	99,65	▲
		Temanggung	%	100	99,91	100	99,82	99,82	●	99,82	▲
		Tembarak	%	100	99,56	100	99,64	99,64	●	99,64	▲
		Pringsurat	%	100	99,72	100	99,68	99,68	●	99,68	▲

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD
						Target	Realisasi s.d TW II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kaloran	%	100	98,11	100	99,64	99,64	●	99,64	▲
		Parakan	%	100	99,76	100	99,70	99,70	●	99,70	▲
		Bulu	%	100	99,86	100	99,76	99,76	●	99,76	▲
		Kedu	%	100	99,68	100	99,68	99,68	●	99,68	▲
		Kandangan	%	100	99,76	100	99,72	99,72	●	99,72	▲
		Candiroto	%	100	99,79	100	99,75	99,75	●	99,75	▲
		Ngadirejo	%	100	99,76	100	99,75	99,75	●	99,75	▲
		Jumo	%	100	99,62	100	99,81	99,81	●	99,81	▲
		Wonobojo	%	100	99,57	100	99,52	99,52	●	99,52	▲
		Kranggan	%	100	99,70	100	99,66	99,66	●	99,66	▲
		Bejen	%	100	99,48	100	99,45	99,45	●	99,45	▲
		Kledung	%	100	99,10	100	99,06	99,06	●	99,06	▲
		Bansari	%	100	99,78	100	99,61	99,61	●	99,61	▲
		Tlogomulyo	%	100	99,72	100	99,72	99,72	●	99,72	▲
		Selopampang	%	100	99,61	100	99,61	99,61	●	99,61	▲
		Gemawang	%	100	99,60	100	99,65	99,65	●	99,65	▲
		Tretep	%	100	76,39	100	99,70	99,70	●	99,70	▲

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD
						Target	Realisasi s.d TW II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	98,61	100	30,62	33,83	▲	29,74	▼
		Temanggung	%	100	93,44	100	43,88	43,88	▲	43,88	▼
		Tembarak	%	100	100	100	39,30	39,30	▲	39,30	▼
		Pringsurat	%	100	92,38	100	67,59	67,59	●	67,59	▼
		Kaloran	%	100	92,38	100	15,51	15,51	▼	15,51	▼
		Parakan	%	100	97,89	100	19,66	19,66	▼	19,66	▼
		Bulu	%	100	100	100	13,34	13,34	▼	13,34	▼
		Kedu	%	100	100	100	18,14	100	●	18,14	▼
		Kandangan	%	100	99,10	100	23,19	23,19	▼	23,19	▼
		Candiroto	%	100	100	100	33,39	33,39	▲	33,39	▼
		Ngadirejo	%	100	100	100	19,08	19,08	▼	19,08	▼
		Jumo	%	100	100	100	27,87	27,87	▲	27,87	▼
		Wonobojo	%	100	100	100	41,84	41,84	▲	41,84	▼
		Kranggan	%	100	96,93	100	68,61	68,61	●	68,61	▼
		Bejen	%	100	100	100	18,65	1,03	▼	1,03	▼
		Kledung	%	100	100	100	24,85	24,85	▼	24,85	▼
		Bansari	%	100	100	100	27,18	27,18	▲	27,18	▼

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD
						Target	Realisasi s.d TW II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tlogomulyo	%	100	100	100	28,91	28,91	▲	28,91	▼
		Selopampang	%	100	100	100	43,47	43,47	▲	43,47	▼
		Gemawang	%	100	100	100	18,30	18,30	▼	18,30	▼
		Tretep	%	100	100	100	19,61	19,61	▼	19,61	▼
3.	Program Pemberda yaan Masyara kat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP- Desa tepat waktu	%	100	99,20	100	99,58	99,58	●	99,58	●
		Temanggung	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Tembarak	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Pringsurat	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Kaloran	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Parakan	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Bulu	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Kedu	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Kandangan	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Candirototo	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Ngadirejo	%	100	100	100	100	100	●	100	●
	Jumo	%	100	100	100	100	100	●	100	●	

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD
						Target	Realisasi s.d TW II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wonoboyo	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Kranggan	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Bejen	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Kledung	%	100	92,31	100	100	100	●	100	●
		Bansari	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Tlogomulyo	%	100	91,67	100	91,67	91,67	●	91,67	▲
		Selopampang	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Gemawang	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Tretep	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik	%	100	86,37	100	85,50	85,50	●	85,50	▲
		Temanggung	%	100	68,69	100	65,48	65,48	●	65,48	▼
		Parakan	%	100	90,79	100	90,79	90,79	●	90,79	▲
		Ngadirejo	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Kranggan	%	100	86,00	100	85,71	85,71	●	85,71	▲

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD
						Target	Realisasi s.d TW II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	98,51	100	98,18	98,18	●	98,18	▲
		Temanggung	%	100	93,37	100	93,97	93,97	●	93,97	▲
		Parakan	%	100	98,73	100	98,73	98,73	●	98,73	▲
		Ngadirejo	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Kranggan	%	100	100	100	100	100	●	100	●
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	99,76	100	100	100	●	100	●
		Temanggung	%	100	95,24	100	100	100	●	100	●
		Tembarak	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Pringsurat	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Kaloran	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Parakan	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Bulu	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Kedu	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Kandangan	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Candiroto	%	100	100	100	100	100	●	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD
						Target	Realisasi s.d TW II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ngadirejo	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Jumo	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Wonobojo	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Kranggan	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Bejen	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Kledung	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Bansari	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Tlogomulyo	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Selopampang	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Gemawang	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Tretep	%	100	100	100	100	100	●	100	●
5.	Program Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	80	94,37	80	94,33	100	●	100	●
		Temanggung	%	80	90,32	80	87,50	100	●	100	●
		Tembarak	%	80	86,90	80	88,36	100	●	100	●
		Pringsurat	%	80	96,85	80	96,85	100	●	100	●
		Kaloran	%	80	96,53	80	96,53	100	●	100	●
		Parakan	%	80	100	80	100	100	●	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD
						Target	Realisasi s.d TW II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bulu	%	80	85,44	80	85,44	100	●	100	●
		Kedu	%	80	91,95	80	91,95	100	●	100	●
		Kandangan	%	80	87,34	80	87,35	100	●	100	●
		Candirototo	%	80	87,71	80	87,71	100	●	100	●
		Ngadirejo	%	80	98,73	80	98,73	100	●	100	●
		Jumo	%	80	98,03	80	98,03	100	●	100	●
		Wonoboyo	%	80	100	80	100	100	●	100	●
		Kranggan	%	80	100	80	100	100	●	100	●
		Bejen	%	80	100	80	100	100	●	100	●
		Kledung	%	80	100	80	100	100	●	100	●
		Bansari	%	80	100	80	100	100	●	100	●
		Tlogomulyo	%	80	94,37	80	94,37	100	●	100	●
		Selopampang	%	80	80,68	80	80,68	100	●	100	●
		Gemawang	%	80	100	80	100	100	●	100	●
		Tretep	%	80	92,47	80	93,15	100	●	100	●
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%	1	0,06	1	0	100	●	100	●
		Temanggung	%	1	0	1	0	100	●	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD
						Target	Realisasi s.d TW II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintah Desa	Tembarak	%	1	0	1	0	100	●	100	●
		Pringsurat	%	1	0	1	0	100	●	100	●
		Kaloran	%	1	0	1	0	100	●	100	●
		Parakan	%	1	0	1	0	100	●	100	●
		Bulu	%	1	0	1	0	100	●	100	●
		Kedu	%	1	0	1	0	100	●	100	●
		Kandangan	%	1	0	1	0	100	●	100	●
		Candiroto	%	1	0	1	0	100	●	100	●
		Ngadirejo	%	1	0	1	0	100	●	100	●
		Jumo	%	1	0	1	0	100	●	100	●
		Wonobojo	%	1	0,68	1	0	100	●	100	●
		Kranggan	%	1	0,51	1	0	100	●	100	●
		Bejen	%	1	0	1	0	100	●	100	●
		Kledung	%	1	0	1	0	100	●	100	●
		Bansari	%	1	0	1	0	100	●	100	●
		Tlogomulyo	%	1	0	1	0	100	●	100	●
Selopampang	%	1	0	1	0	100	●	100	●		
Gemawang	%	1	0	1	0	100	●	100	●		

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD
						Target	Realisasi s.d TW II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tretep	%	1	0	1	0	100	●	100	●
7		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDesa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Temanggung	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Tembarak	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Pringsurat	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Kaloran	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Parakan	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Bulu	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Kedu	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Kandangan	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Candiroto	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Ngadirejo	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Jumo	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Wonobojo	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Kranggan	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Bejen	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Kledung	%	100	100	100	100	100	●	100	●
		Bansari	%	100	100	100	100	100	●	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD
						Target	Realisasi s.d TW II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tlogomulyo	%	100	100	100	100	100		100	
		Selopampang	%	100	100	100	100	100		100	
		Gemawang	%	100	100	100	100	100		100	
		Tretep	%	100	100	100	100	100		100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, indikator kinerja sasaran dengan status telah tercapai 1 indikator yaitu rata-rata IKM di Kecamatan. Sedangkan untuk indikator kinerja program, terdapat 7 indikator telah tercapai dan 1 indikator akan tercapai. Meskipun secara keseluruhan 20 kecamatan rata-rata capaian persentase realisasi penerimaan PBB dalam status akan tercapai, masih terdapat 9 Kecamatan yang berstatus upaya keras pada indikator tersebut. Guna merubah status upaya keras menjadi akan tercapai pada akhir tahun 2022 dibutuhkan Mantri pajak harus berperan aktif mendorong petugas pemungut pajak tingkat desa agar lebih aktif (jemput bola), meningkatkan sosialisasi dan monitoring ke desa terkait dengan PBB, sehingga realisasi penerimaan PBB dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

2.9 Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Capaian Kinerja unsur pemerintahan umum terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2022 Triwulan II

No	Sasaran/ program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	Indeks Gotong Royong	Angka	4,22	4,33	4,21	4,33	100	●	100	●	Kesbangpol
		Indeks toleransi	angka	4,19	4,5	4,17	4,5	100	●	100	●	Kesbangpol
RATA-RATA								100	●	100	●	
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	62	0	62	62,50	100	●	100	●	Kesbangpol
		Cakupan desa/ kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	10	4,84	10	5,19	51,90	▲	51,90	▼	Kesbangpol
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	%	87	87,21	87	87,21	100	●	100	●	Kesbangpol
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	%	30	25	30	32,73	100	●	100	●	Kesbangpol
		Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	30	33,33	30	33,33	100	●	100	●	Kesbangpol

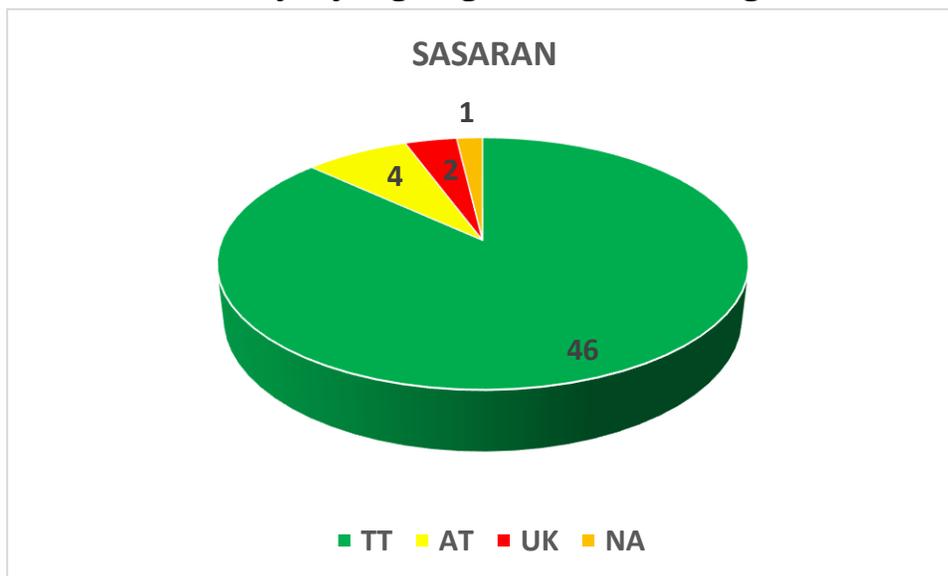
No	Sasaran/ program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW II (%)	Status Capaian RKPD	Tingkat Capaian RPJMD s.d tahun 2022 (%)	Status Capaian RPJMD	Perangkat Daerah
						Target	Realisasi s.d TW II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	%	100	0	100	0	0	▼	0	▼	Kesbangpol
4	Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Kesbangpol
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%	100	100	100	100	100	●	100	●	Kesbangpol
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	10	36,68	10	10,40	100	●	100	●	Kesbangpol
		Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	35	0	35	35	100	●	100	●	Kesbangpol
RATA-RATA								85,19	●	85,19	▲	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator kinerja sasaran pada unsur pemerintahan umum dengan status telah tercapai sejumlah 2 indikator. Sedangkan pada indikator kinerja program terdapat 8 indikator dengan status telah tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 1 indikator dengan status upaya keras. Adapun kendala dan tindaklanjut yang akan dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk berupaya menjadikan indikator dengan status upaya keras menjadi akan tercapai pada akhir tahun 2022 antara lain:

- a) Perpanjangan tangan FKUB di tingkat kecamatan belum ada sehingga kegiatan forum kerukunan umat beragama tingkat kabupaten belum maksimal. Hal ini merupakan upaya keras untuk segera menindaklanjuti melalui penyusunan regulasi terkait FKUB di tingkat kecamatan sehingga terbentuknya FKUB di kecamatan dapat terealisasi secara maksimal.

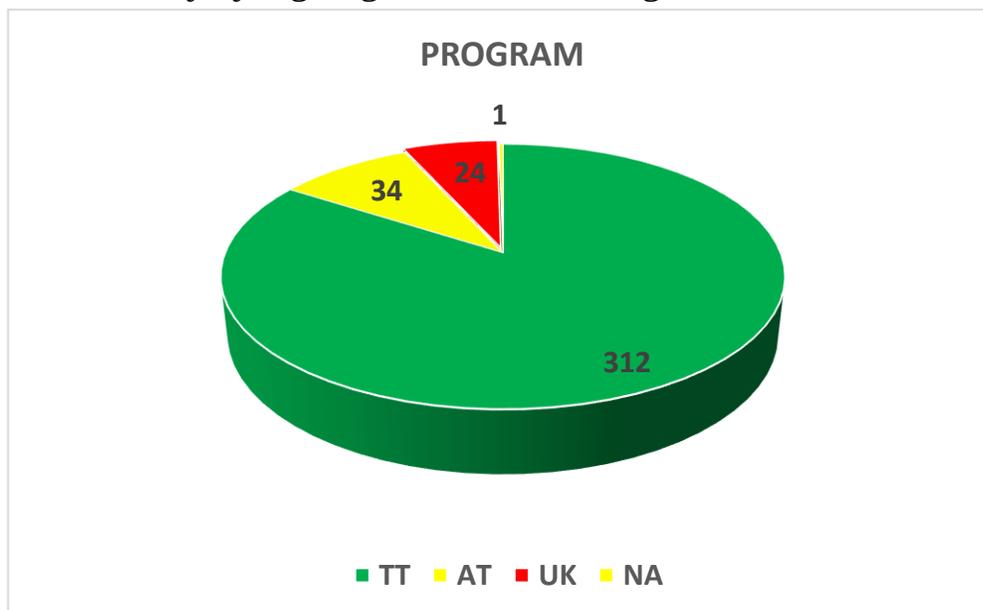
Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jumlah indikator sasaran ada 53 indikator yang terdiri dari 46 indikator berstatus telah tercapai, 4 indikator berstatus akan tercapai, 2 indikator berstatus perlu upaya keras, dan 1 indikator belum tersedia datanya, yang tergambar dalam diagram berikut ini.



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 2.1
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran
Triwulan II Tahun 2022

Selain itu, ada 371 indikator program yang terdiri dari 312 indikator berstatus telah tercapai, 34 indikator akan tercapai, 24 indikator berstatus perlu upaya keras, dan 1 indikator belum tersedia datanya yang tergambar dalam diagram berikut ini.



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Program
Triwulan II Tahun 2022

2.10 Identifikasi Permasalahan

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Bidang Pendidikan

- a) Menurunnya peran serta dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b) Pengaruh negative penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, menurunnya semangat belajar siswa dan kurangnya motivasi dari orangtua;
- c) Pada umumnya anak yang tidak tertampung di jalur formal, minat dan motivasi belajarnya sangat rendah. Disamping itu ada yang merasa tidak butuh pendidikan (ijazah) dan ada beberapa yang sudah bekerja.

2) Bidang Kesehatan

- a) Masih belum optimalnya pelaksanaan vaksinasi karena pelaksanaan sekolah melalui daring (adanya pandemi Covid-19);
- b) Masih adanya kasus penderita hipertensi;
- c) Belum maksimalnya penjangkauan penjangkauan kelompok populasi kunci HIV dan masih adanya populasi beresiko (ibu hamil, pasien TB) yang menolak diperiksa HIV;
- d) Masih adanya penolakan terhadap pelaksanaan imunisasi karena perhitungan dilakukan di akhir tahun;
- e) Masih rendahnya persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna karena pendataan yang dilaksanakan akhir tahun;

3) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a) wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit;
- b) lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran;
- c) luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto;
- d) minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung

penyelamatan dan evakuasi serta terbatasnya Sumber air dan belum tersedianya sumber air (*groundtank*) di masing-masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran;

- e) perubahan fungsi lahan menyebabkan kejadian bencana banjir dan longsor yang merusak infrastruktur publik;
- f) data yang belum sesuai dengan kondisi di lapangan, koordinasi antar instansi terkait belum optimal;
- g) anggaran kurang memadai dalam penanganan mengingat kejadian bencana tidak bisa diprediksi serta
- h) masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan bencana.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Bidang Lingkungan Hidup

- a) Kurangnya kesadaran beberapa pemrakarsa /pelaku usaha /kegiatan untuk mengajukan persetujuan sesuai dengan klasifikasi kegiatan/usahanya;
- b) Transisi kebijakan OSS terkait Undang-undang Cipta Kerja ke dalam aplikasimenjadi OSS berbasis resiko sehingga penerapan di lapangan masih terhambat;
- c) Terbitnya peraturan perundangan baru sehingga ada perubahan mekanisme pengajuan persetujuan;
- d) Pengajuan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang berada di DPM sedangkan sistem tersebut belum terintegrasi dengan sistem informasi Lingkungan Hidup;
- e) Kegiatan pengawasan dan pembinaan Usaha dan/atau Kegiatan di Kab. Temanggung sudah mulai dilakukan. Masih perlu menyesuaikan dengan SOP Pengawasan dari KLHK dan referensi Pengawasan dari DLHK Provinsi Jawa Tengah;
- f) Lokasi Proklamasi dan penghargaan Kalpataru masih dalam proses penilaian dan menunggu pengumuman dari

- provinsi;
- g) Adipura masih dalam proses penilaian dan menunggu pengumuman dari pusat;
 - h) Propperda saat ini sudah tidak dalam penghargaan lingkungan hidup.
- 2) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a) Kurangnya SDM di desa untuk mendukung inovasi pelayanan Adminduk;
 - b) Tidak semua masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan online (keterbatasan IT dan jaringan);
 - c) Jumlah pelayanan terbatas;
 - d) Keterbatasan alat perekaman KTP-el di kecamatan.
 - 3) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a) Masih adanya budaya masyarakat bahwa kehamilan, dan melahirkan menjadi urusan perempuan;
 - b) Masih tingginya angka kelahiran (CBR);
 - c) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya ikut KB; serta
 - d) Rendahnya pemahaman batasan PUS bisa hamil (merasa tua tidak perlu KB).
 - 4) Bidang Perhubungan
 - a) Masih belum optimalnya kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM untuk menjadi bengkel umum kelas 1.
 - 5) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - a) Masih banyak koperasi yang belum melaporkan laporan keuangan, adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi kegiatan usaha koperasi termasuk kondisi keuangan.
 - 6) Bidang Penanaman Modal
 - a) Kurangnya SDM di bidang Penanaman Modal yang kompeten;
 - b) Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas SDM.
 - 7) Bidang Persandian
 - a) Kurang sarana prasarana persandian sesuai standar.
 - 8) Bidang Perpustakaan

- a) Menurunnya pengunjung perpustakaan di desa/ kelurahan, sekolah, TBM dan perpustakaan daerah disebabkan adanya pandemi Covid-19;
- b) Masih terbatas penulis yang mengangkat tema budaya etnis nusantara;
- c) Hasil koordinasi melalui media sosial ke masyarakat belum diketahui kepemilikan naskah kuno;
- d) Kegiatan penelusuran langsung belum dilaksanakan dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk covid-19;
- e) Belum terdapat anggaran khusus untuk pengadaan bahan perpustakaan untuk koleksi naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Bidang Pariwisata

- a) Keterbatasan jumlah SDM dalam melakukan pendataan pelaku ekonomi Kreatif (ekraf) dan belum ada aturan secara detail yang menentukan pelaku ekraf;
- b) Untuk penentuan kenaikan klasifikasi Desa wisata, Tim *Assesmen* mengadakan *assesmen* kepada Desa wisata yang akan naik klasifikasi dengan pemenuhan kriteria yang telah ditentukan oleh Provinsi. *Assesmen* dilakukan 4 tahun sekali sesuai dengan Pergub tahun 2019 pasal 14 tentang Desa Wisata;
- c) Masih rendahnya ketertarikan & pemahaman desa untuk membentuk desa wisata;
- d) Kurangnya fasilitas hotel yang mendukung untuk menerima tamu dalam jumlah besar seperti jumlah kamar, aula/ ruang pertemuan, & fasilitas pendukung acara lainnya. Promosi yang belum maksimal. Dinamika kebijakan seperti adanya pembatasan kegiatan masyarakat.
- e) Laporan jumlah wisatawan yang datang ke Destinasi Wisata di Kabupaten Temanggung baik Wisatawan lokal dan Mancanegara belum update.
- f) Kurangnya fasilitas hotel yang mendukung untuk menerima tamu dalam jumlah besar seperti jumlah

kamar, aula/ruang pertemuan, & fasilitas pendukung acara lainnya. Promosi yang belum maksimal. Dinamika kebijakan seperti adanya pembatasan kegiatan masyarakat.

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

- a) Masih kurangnya koordinasi antara Dewan Pengawas dengan Tim Pembinaan BUMD, masih kurangnya kemampuan SDM di beberapa BUMD serta masih belum optimalnya kualitas manajemen yang baik di beberapa BUMD;
- b) Masih kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum Setda;
- c) Masih lambatnya penyetoran produk hukum dari setiap OPD serta belum mempunyai aplikasi untuk pendokumentasian beberapa produk hukum;
- d) Kurangnya persiapan perencanaan dari Perangkat Daerah dan kebijakan dari masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan;
- e) Belum optimalnya integrasi aplikasi belanja online dengan pencatatan non-tender di LPSE;
- f) Masih kurangnya SDM yang kompeten dalam perencanaan, masih terdapat perubahan kebijakan terkait perubahan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan dana DAK dan keterbatasan personil yang bersertifikat pengadaan barang/jasa, dan beberapa barang pada aplikasi *E-catalogue* belum tayang;
- g) Keterbatasan anggaran yang tersedia, batas hilang terbawa arus sungai, lokasi sulit dijangkau, pindahnya arus sungai dalam pilar batas wilayah;
- h) Belum maksimalnya pemahaman terhadap tupoksi SDM dalam pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah;
- i) Terdapat banyak aplikasi baru yang mempunyai kesamaan output.

2) Sekretariat DPRD

- a) Proses pembahasan Raperda inisiatif yang membutuhkan waktu cukup lama;
- b) Beberapa kegiatan aspirasi belum semua terlaksana sesuai rencana karena pelaksanaannya baru sampai dengan Triwulan II 2022.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Keuangan

- a) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang mengakibatkan pengurangan pagu anggaran, kegiatan dan sub kegiatan;
- b) Kurang sinkronnya penetapan RKPD Provinsi Jawa Tengah dengan Penetapan RKPD dan KUA/PPAS Kabupaten Temanggung;
- c) Belum maksimalnya persentase realisasi keuangan karena pelaksanaan kegiatan masih sampai tahap Triwulan II 2022;
- d) Belum dilakukannya permohonan perpanjangan atas aset Pemda yang dimanfaatkan;
- e) Keterbatasan anggaran untuk pendataan massal pada data objek pajak;
- f) Belum tercapainya realisasi penerimaan pendapatan daerah (realisasi pajak, retribusi, dll) karena fokus masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkades.

2) Kepegawaian

- a) Belum semua pegawai melakukan update data kepegawaian seperti P2KP (kinerja) dan sertifikat diklat (kompetensi) yang merupakan aspek dalam dimensi penilaian dalam IP ASN. Nilai IP triwulan II 2022 ini adalah hasil penghitungan sampai dengan 30 Juni 2022 dan nilai tersebut belum final karena proses penilaian masih berjalan;
- b) Belum adanya kebijakan internal yang mengatur beberapa aspek dalam sistem merit;
- c) keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia pelaksana manajemen PNS;
- d) Beberapa jabatan belum disesuaikan dengan peta jabatan yang ada, beberapa jenjang JF belum

terakomodir dalam peta jabatan yang ada dan Pengusulan kebutuhan SDM menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah terbatas;

- e) Kelengkapan dan kevalidan berkas usul pensiun: Pegawai yang akan pensiun belum/tidak upload pdf dokumen kepegawaian sebagai kelengkapan usul pensiun melalui e-file di Simpeg. Proses verifikasi hingga terbitnya SK menunggu Pertek BKN yang memakan waktu lama;
- f) Keterlambatan upload dokumen P2KP dan SKP dikarenakan ada perubahan peraturan;
- g) Keterbatasan sumberdaya SDM yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan struktural;
- h) Sosialisasi Peraturan Per UU an terhadap para pejabat struktural kadang tidak tersampaikan kepada para pejabat pelaksana/fungsional.

3) Pendidikan dan Pelatihan

- a) Keterbatasan kuota dari penyelenggara Diklat managerial (BPSDMD Prov. Jateng) dan keterbatasan keuangan daerah untuk pembiayaan diklat;
- b) Sejak tahun 2020 dengan adanya Covid -19 maka penyelenggaraan maupun pengiriman peserta Bimtek/diklat teknis fungsional mengalami penundaan dan untuk Bimtek TF, berkurangnya anggaran untuk Bimtek TF krn refocusing covid 19, sehingga mengurangi target peserta bimtek dan berdampak pada capaian indikator di tahun 2022.

4) Penelitian dan Pengembangan

- a) Adanya Perangkat Daerah yang rata-rata capaian indikator-nya masih rendah sehingga mempengaruhi nilai capaian keseluruhan ketika direkapitulasi kabupaten;
- b) Masih rendahnya iklim inovasi di Kabupaten Temanggung dan adanya keterbatasan anggaran;
- c) Kurangnya disiplin/kesadaran Perangkat Daerah dalam memenuhi data.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

- 1) Inspektorat Daerah
 - a) Pengendalian risiko organisasi belum memadai;
 - b) Belum sepenuhnya menerapkan *reward* dan *punishment* dalam organisasi;
 - c) Organisasi belum sepenuhnya melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM);
 - d) Tuntutan peraturan terhadap proses tindak lanjut temuan yang harus dilaksanakan;
 - e) Keinginan PD untuk segera menyelesaikan TL temuan untuk perbaikan organisasi;
 - f) Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang bertugas memonitor progres penyelesaian tindak lanjut pada Obrik;
 - g) Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;
 - h) Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan konsultasi dari Obyek yang diperiksa;
 - i) kurang pahamnya auditor dalam melaksanakan evaluasi SAKIP, kurang Pahamnya Perangkat daerah terhadap implementasi SAKIP, dan waktu pelaksanaan reuiu yang kurang/waktu yang mendesak;
 - j) Jumlah Personil terbatas;
 - k) Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;
 - l) Pergeseran/mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
 - m) APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia;
 - n) Kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
 - o) Zona Intergritas merupakan kegiatan baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi;

- p) Kurangnya informasi sebagai bahan pemeriksaan investigasi dan komitmen atasan pengadu;
- q) Kurang pemahannya OPD mengenai benturan kepentingan;
- r) Kurangnya pemahaman penyelenggara negara/swasta tentang gratifikasi;
- s) Belum memasyarakatnya UPG di Kabupaten Temanggung;
- t) Masyarakat belum semuanya paham tentang tata cara pengaduan, sehingga aduan tidak jelas.

7. Unsur Kewilayahan

1) Kecamatan

- a) Belum tercapainya realisasi penerimaan PBB sampai dengan Triwulan II 2022;

8. Unsur Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

- a) Masih rendahnya cakupan jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan;
- b) Belum adanya perpanjangan FKUB di tingkat kecamatan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2022 menggambarkan kebijakan perekonomian Daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Temanggung yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Selain itu dalam bab ini juga akan membahas kerangka pendanaan daerah agar dapat memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan Daerah tahun 2022.

Kerangka ekonomi dan pendanaan daerah ini menjadi dasar kebijakan perencanaan anggaran agar dapat dialokasikan secara efektif dan berbasis program prioritas. Selain itu Perubahan RKPD tahun 2022 ini juga merupakan upaya penanganan dan juga pemulihan akibat Pandemi Global Covid-19, baik dari sisi ekonomi dan keuangan daerah, sisi sosial dan lain sebagainya. Dengan demikian rancangan kerangka ekonomi dan pendanaan daerah Perubahan RKPD tahun 2022 ini akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Temanggung.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional

Memasuki tahun 2022 perekonomian global dan nasional semakin membaik dengan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi serta pelonggaran perjalanan di seluruh dunia. Akan tetapi, tekanan geopolitik perang Rusia - Ukraina memperlambat pemulihan ekonomi baik secara global dan nasional.

Konsekuensi dari perang tersebut menimbulkan lonjakan harga komoditas global terutama komoditas energi dan pangan. Berbagai kebijakan fiskal telah dilakukan pemerintah dalam rangka menekan laju inflasi di antara lain kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Hal ini dilakukan pemerintah dalam upaya mendukung program pemulihan ekonomi nasional yang pada

tahun ini menitikberatkan pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat.

Perekonomian nasional tahun 2021 3,69% tumbuh menguat dibandingkan tahun 2020 (-2,07)%. Perekonomian nasional pada Triwulan I tahun 2022 tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Sumber pertumbuhan tertinggi pertumbuhan ekonomi pada Triwulan 1 adalah Industri pengolahan yakni sebesar 1,06% .

Inflasi tahun 2021 1,42 % (ytoy). Inflasi pada bulan April tahun 2022 adalah sebesar 0,95 % . Peningkatan harga beberapa komoditas di tingkat Internasional mempengaruhi peningkatan harga beberapa komoditas di level nasional antara lain komoditi bahan bakar dan bahan pangan.

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Makro Nasional 2022

No	Indikator	Proyeksi	
		RKPD 2022	Perub RKPD 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2-5,8	5,4-6,0
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5-6,3	5,5-6,3
3	IPM (%)	73,41-73,46	73,41-73,46
4	Inflasi (%)	2,0-4,0	1,87
5	Indeks Gini	0,376-0,378	0,376-0,378
6	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,5 – 9,0	8,5-9,0

** Proyeksi 2022 Sumber: Diolah dari berbagai sumber

3.1.2 Kondisi Perekonomian Jawa Tengah

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tahun 2021 adalah 3,32%, tumbuh menguat dibandingkan tahun 2020 sebesar -2,65%. Penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah bersumber dari sektor Perdagangan 0,84%.

Sedangkan pada tahun 2022 Triwulan 1 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,16% (yoy) sumber pertumbuhan ekonomi terbesar yakni Industri pengolahan sebesar 1,51%.

Inflasi pada tahun 2021 di Jawa Tengah sebesar 1,70% lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yakni sebesar 1,56%. Sedangkan untuk Triwulan 1 2022 adalah sebesar 2,87% dimana penyebab utama inflasi di Jawa Tengah adalah kenaikan harga bahan bakar (bensin) dan bahan makanan (minyak goreng dan daging ayam).

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Makro Jawa Tengah 2022

No	Indikator	Proyeksi	
		RKPD 2022	Perub RKPD 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,20-5,20	4,20-5,20
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,75-5,69	5,75-5,69
3	IPM (%)	72,58	72,58
4	Inflasi (%)	3,0+/- 1	3,0+/- 1
5	Indeks Gini	0,35	0,35
6	Persentase Penduduk Miskin (%)	10,49-10,30	10,49-10,30

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

3.1.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Temanggung

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung tetap diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah terutama yang bertumpu pada 3ector pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan di sisi lain, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan 3ecto utama untuk menurunkan angka kemiskinan dengan target sebesar 9,8%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,5%, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,49.

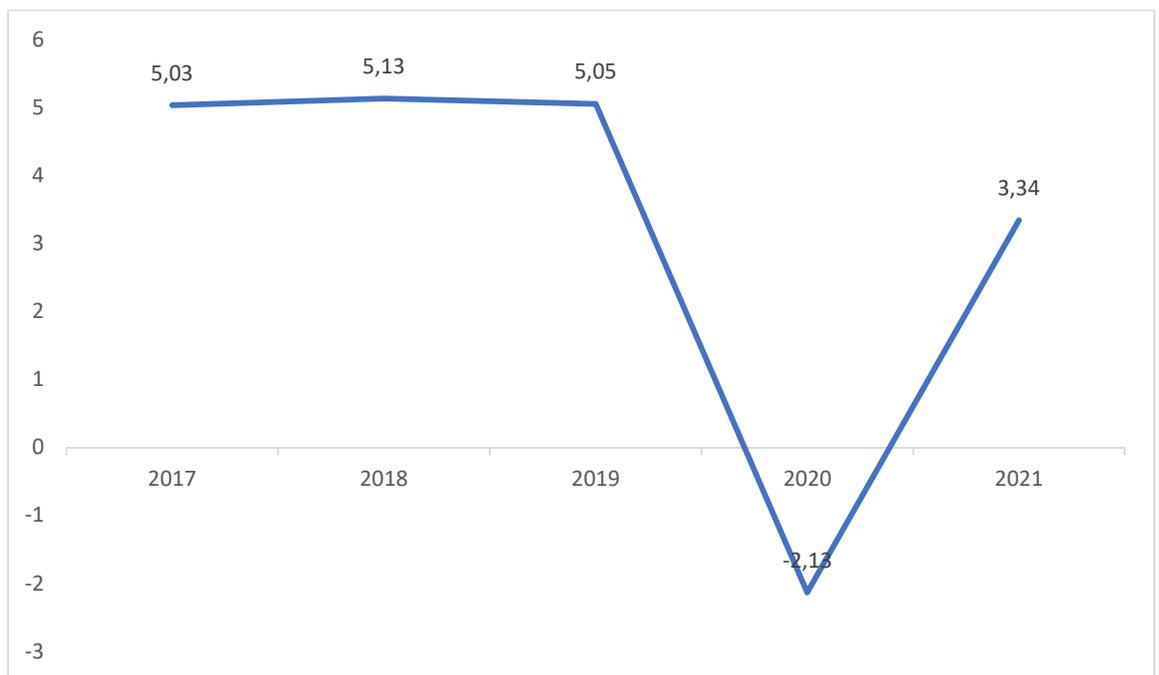
Kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung sebagaimana kondisi Jawa Tengah maupun Indonesia, diperkirakan mengalami kontraksi dan beberapa penurunan kinerja ekonomi terkait dengan tekanan geopolitik perang Rusia-Ukraina. Salah satu upaya pemulihan ekonomi Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah memberikan bantuan dan stimulus pada pelaku UMKM, diharapkan bantuan tersebut dapat meningkatkan jumlah dan kualitas produksi baik untuk 3ector barang maupun jasa. Selain itu, dengan kembali dibukanya berbagai kegiatan diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian dan terjadi pemulihan ekonomi

3.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi

mengalami tren yang berfluktuasi. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk segera melakukan langkah-langkah strategis yang memberikan *multiplier effect* bagi percepatan peningkatan ekonomi masyarakat agar tren pertumbuhan ekonomi meningkat secara stabil dengan target pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai 3,5% pada akhir tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2021 3,34% tumbuh menguat jika dibandingkan tahun 2020 sebesar -2,13%. Tiga sektor utama yang menjadi penggerak ekonomi di Kabupaten Temanggung adalah sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan diperkirakan akan tumbuh menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Gambar 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Sedangkan sebagai perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional ditampilkan pada tabel selanjutnya.

Tabel 3.3

Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (persen)		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2022	3,50	4,20-5,20	5,2-5,8
Perubahan 2022	3,50	4,20-5,20	5,4-5,8

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 tersebut mempertimbangkan asumsi optimisme pemulihan ekonomi di tingkat provinsi dan nasional, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, maka strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan investasi baik investasi fisik maupun modal manusia berupa pendidikan;
2. Penentuan daerah atau wilayah yang dikembangkan menjadi kawasan 5ocal55y;
3. Menjamin keterlibatan sumberdaya 5ocal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan 5ocal55y;
4. Mendukung Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dengan membelanjakan pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang produksi dalam negeri;
5. Program sertifikasi TKDN gratis kepada 5ocal55y kecil dan menengah (IKM);
6. Peningkatan produktivitas 5ocal5 kearifan 5ocal seperti pertanian;

3.1.3.2 Struktur Ekonomi

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung atas dasar harga Konstan selama jangka waktu lima (5) tahun terakhir menunjukkan pergerakan dan pergeseran di beberapa sub sektor. Struktur ekonomi Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017 – 2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,00	3,36	1,73	1,90	0,82
B	Pertambangan dan Penggalian	4,24	3,61	4,24	2,11	6,74
C	Industri Pengolahan	5,90	5,29	4,73	-0,61	2,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,15	4,62	4,22	2,92	4,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,94	4,67	4,74	2,04	5,62
F	Konstruksi	8,93	5,79	8,15	-2,01	7,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,30	5,79	5,39	-3,78	7,39
H	Transportasi dan Pergudangan	3,60	4,53	9,29	-30,85	2,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,17	6,24	9,41	-6,81	6,03
J	Informasi dan Komunikasi	12,94	13,75	12,94	14,14	5,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,59	3,52	3,38	2,00	3,42

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
L	Real Estate	6,52	5,65	6,20	-0,06	2,28
M,N	Jasa Perusahaan	8,84	9,43	9,55	-6,32	3,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,41	3,11	3,41	-1,61	-0,26
P	Jasa Pendidikan	6,63	6,18	7,95	-0,19	0,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,92	7,50	7,56	7,75	0,55
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,22	7,87	8,33	-6,18	0,96
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,03	5,13	5,05	-2,13	3,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Tabel 3.5
PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2022

Kategori	Lapangan Usaha	RKPD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3331,08	3358,51
B	Pertambangan dan Penggalian	118,76	1267,73
C	Industri Pengolahan	3947,19	4025,96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,10	14,77
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,00	13,73
F	Konstruksi	749,62	806,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3314,95	3559,93
H	Transportasi dan Pergudangan	533,79	548,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	249,09	264,10
J	Informasi dan Komunikasi	378,99	401,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	475,46	491,70
L	Real Estate	134,87	137,94
M,N	Jasa Perusahaan	54,68	56,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	396,03	395,00
P	Jasa Pendidikan	668,34	671,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	192,22	193,27
R,S,T,U	Jasa lainnya	318,59	321,56
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		14890,75	15387,93

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Struktur lapangan usaha Kabupaten Temanggung mulai tahun 2017 sedikit bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke lapangan usaha Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan lapangan usaha kategori Industri Pengolahan tahun 2017 sampai 2022 yang nilainya lebih besar dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Meningkatnya permintaan akan produk barang jadi dan barang setengah jadi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional telah mendorong perkembangan Industri Pengolahan menjadi lapangan usaha yang terbesar kontribusinya dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto.

Struktur lapangan usaha Kabupaten Temanggung sejak tahun 2017 sedikit bergeser dari sektor usaha Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan ke sektor Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan Industri Pengolahan tahun 2021 yang menyumbang PDRB lebih besar dibandingkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Meningkatnya permintaan akan produk barang jadi dan barang setengah jadi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional telah mendorong perkembangan Industri Pengolahan menjadi lapangan usaha yang terbesar berkontribusi dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto. Akan tetapi setelah terkena pandemi covid , pemulihan lapangan usaha yang membaik dengan pertumbuhan tertinggi adalah sektor konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

3.1.3.3 PDRB Perkapita

Untuk melihat perubahan pendapatan perkapita/PDRB per kapita Kabupaten Temanggung di tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rp)		Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Ribu Rp)	
	RKPD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022
2022	27.702,75	28.480,00	19.135,16	19.370,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Nilai PDRB perkapita mengalami kenaikan hal ini menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung semakin membaik. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/dinikmati oleh warga Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki/dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.

Nilai PDRB perkapita tahun 2020 mengalami penurunan baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan 2010, yakni menurun dari Rp 28.170,00 menjadi Rp 27.330,00 dan dari Rp 19.800,00 menjadi Rp 18.880,00. Namun pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp 28.480,00 dan Rp 19.370,00 Hal ini dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 yang pada berbagai sektor mengalami penurunan selama periode tahun 2020.

3.1.3.4 Inflasi

Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan dapat terlihat secara umum dari besaran inflasi. Inflasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian makro. Inflasi yang tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi para pelaku ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan bahkan bisa menimbulkan resesi ekonomi.

Tingkat inflasi atau perubahan harga yang terjadi mencerminkan kestabilan nilai jual dari mata uang rupiah. Hal ini bisa diamati dari kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Artinya apabila dalam suatu periode tertentu tidak terjadi perubahan harga pada semua komoditas barang/jasa di tingkat konsumen, berarti selama periode waktu tersebut apabila seorang konsumen membelanjakan uangnya dalam besaran yang sama akan mendapatkan barang/jasa dalam jumlah maupun kualitas yang sama pula. Sebaliknya apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa pada periode tertentu, maka barang/jasa yang diterima secara kuantitas akan berkurang atau jumlah yang diterima sama namun secara kualitas nilainya lebih rendah.

Pentingnya kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Angka Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat menurun sehingga standar hidup dari masyarakat juga akan menurun dan akan semakin menambah beban ekonomi masyarakat. Apabila tingkat inflasi dalam negeri lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang rupiah.

Perkembangan harga barang dan jasa di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 2016 - 2020 tidak terlepas dari kondisi perkembangan harga di tingkat nasional maupun regional. Pada tahun 2017 secara tahunan (*year on year*) angka inflasi Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 3,69 %, lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2016 yang mengalami inflasi sebesar 2,42 %.

Angka inflasi Kabupaten Temanggung tahun 2017 ini lebih kecil jika dibandingkan dengan inflasi Jawa Tengah tahun yang sama yaitu sebesar 3,71 persen namun lebih besar dari inflasi nasional yaitu sebesar 3,61 persen.

Akan tetapi sejak tahun 2020 BPS Kabupaten Temanggung hanya berwenang menghitung laju inflasi sampai level provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi daerah sampel. Untuk Kabupaten yang menjadi sampel dan dapat menjadi pembanding (*sister city*) untuk kabupaten Temanggung adalah Kabupaten Purwokerto.

Inflasi *sister city* Kabupaten Temanggung tahun 2020 adalah sebesar 1,9 %(ytoy) , dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 2,18% (ytoy). Pada Triwulan I 2022 inflasi *sister city* Kabupaten Temanggung adalah 0,63% (qtoq).

Tabel 3.7
Inflasi dan Proyeksi Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
RKPD 2022	-	3,0 +/- 1	3,0
Perubahan 2022	2,50	3,0 +/- 1	3,0 +/- 1

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

Berdasarkan kenaikan inflasi di tingkat nasional dan provinsi di Triwulan 1 Tahun 2022 dan mengingat keadaan perekonomian global yang saat ini mengalami lonjakan kenaikan komoditi bahan pangan dan energi akibat perang Geopolitik Ukraina dan Rusia maka pemerintah Kabupaten Temanggung dapat melakukan beberapa upaya untuk menjaga level inflasi dapat terjaga antara lain dengan :

1. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan sinergi, adaptasi dalam inovasi membuka kerjasama perdagangan antar daerah.
2. Sinergitas dapat ditunjukkan melalui program keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Dimana sinergitas salah satunya dapat dibangun dengan memperkuat infrastruktur sehingga kelancaran distribusi komoditi di Kabupaten Temanggung semakin meningkat.
3. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan harga , terutama harga bahan pokok.

4. Menjaga kesinambungan pasokan sepanjang waktu dan kelancaran distribusi komoditi di Kabupaten Temanggung.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah diatur oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Keuangan Daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk mewujudkan kondisi ini dan sejalan dengan dinamika regulasi yang berlaku, maka setiap pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya pembaruan khususnya dalam pengelolaan keuangan, antara lain pemutakhiran produk perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan.

Memperhatikan berbagai kondisi obyektif masyarakat dan aspirasi yang berkembang, perlu melahirkan beberapa agenda kunci pemerintahan daerah dalam penyiapan kebijakan pembangunan khususnya kebijakan keuangan daerah. Keberadaan agenda pemerintah daerah dimaksud merupakan hal yang penting, diantaranya sebagai tolok ukur dan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Penetapan agenda secara tepat merupakan langkah strategis dalam mengatasikrisis dan menjawab berbagai persoalan yang terjadi dewasa ini mau pun tantangan yang mungkin akan timbul dimasa depan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang

berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi fiskal dalam pelaksanaannya, menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah;
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah;
3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada program (money follow Program), penyelesaian isu strategis dan permasalahan di daerah, serta mendukung pencapaian target RPJMD tahun 2018-2023. APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah, dimana kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Kebijaksanaan fiskal pada umumnya bertujuan untuk mencapai

kestabilan dalam perekonomian yang fungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana masyarakat dengan penghasilan yang lebih banyak akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari besaran belanja dalam APBD. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan fiskal dari pusat ke daerah, maka pemerintah pusat melakukan kebijakan desentralisasi fiskal ke daerah dengan maksud untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Keuangan daerah dengan demikian merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemampuan daerah akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kebijakan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat, dan APBD yang sebagian besar hanya untuk membiayai pengeluaran rutin dan biaya operasional lainnya, maka pada tahun anggaran 2022 kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan daerah, dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Pengalihan pengelolaan beberapa jenis pajak dan retribusi yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah melalui Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber-sumber yang ada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan transfer yang meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan berfluktuasi, seiring dengan peningkatan yang terjadi di masing-masing pos pendapatan/komponen pendapatan daerah. Dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan upaya-upaya antara lain melalui:

- a. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
- b. Meningkatkan pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah yang menangani pendapatan daerah;
- d. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung sampai dengan Perubahan RKPD tahun 2022 masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah, belum mampu bertumpu pada kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perbandingan data pendapatan daerah Kabupaten Temanggung pada RKPD Tahun 2022, APBD Tahun Anggaran 2022 dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Temanggung
Perubahan RKPD Tahun 2022

No	Uraian	RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022
I	PENDAPATAN	2.500.254.061.648	1.885.886.801.040	1.912.086.770.840
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	310.333.087.300	296.358.641.240	296.358.641.240
	Pajak Daerah	48.380.000.000	59.010.000.000	59.010.000.000
	Retribusi Daerah	5.695.740.800	9.959.202.250	9.959.202.250
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.670.700.000	17.416.596.347	17.416.596.347
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	240.586.646.500	209.972.842.643	209.972.842.643
2	PENDAPATAN TRANSFER	2.124.156.574.348	1.589.528.159.800	1.615.728.129.600
A	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.839.809.659.360	1.472.041.917.200	1.482.266.887.000
	<i>Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak</i>	<i>60.553.966.000</i>	<i>50.975.465.200</i>	<i>61.200.435.000</i>
	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>753.140.199.000</i>	<i>753.174.275.000</i>	<i>753.174.275.000</i>
	<i>Dana Alokasi Khusus</i>	<i>761.084.456.360</i>	<i>419.574.272.000</i>	<i>419.574.272.000</i>
	Dana Insentif Daerah	17.149.213.000	2.438.134.000	2.438.134.000
	Dana Desa	247.881.825.000	245.879.771.000	245.879.771.000
B	TRANSFER ANTAR-DAERAH	284.346.914.988	117.486.242.600	133.461.242.600
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Daerah Provinsi	106.000.000.000	117.486.242.600	117.486.242.600
	Bantuan Keuangan Dari Daerah Provinsi	178.346.914.988		15.975.000.000
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	65.764.400.000	0	0
	Pendapatan Hibah	65.764.400.000	0	0

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022

Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022 disebabkan karena:

- a. Penyesuaian proyeksi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Target APBD Tahun Anggaran 2022;
- b. Penyesuaian proyeksi Pendapatan Transfer RKPD Tahun 2022 pada rekening pendapatan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa berdasarkan penetapan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- c. Penyesuaian proyeksi Pendapatan Transfer RKPD Tahun 2022 pada rekening Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor dan Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi berdasarkan ketetapan

alokasi Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan di Kabupaten Temanggung masih sangat kecil yaitu berkisar pada angka 15,49%, sehingga diperlukan upaya-upaya khusus agar bisa lebih meningkat. Realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah pada RKPD Tahun 2022, Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah
Perubahan RKPD Tahun 2022

URAIAN	RKPD 2022	PENETAPAN APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022
Pendapatan Asli Daerah	310.333.087.300	296.358.641.240	296.358.641.240
Total Pendapatan Daerah	2.566.018.461.648	1.885.886.801.040	1.912.086.770.840
Persentase	12,09	15,71	15,49

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Proyeksi belanja daerah Kabupaten Temanggung RKPD tahun 2022, Penetapan APBD Tahun 2022, dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2022 secara lengkap terinci pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Perubahan RKPD Tahun 2022

URAIAN	RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022
BELANJA DAERAH	2.672.463.192.272	1.989.495.211.214	2.052.292.052.816
1. Belanja Operasi	1.428.093.881.017	1.307.704.266.468	1.359.559.373.221
a. Belanja Pegawai	739.391.968.467	739.391.968.467	749.539.637.482
b. Belanja Barang dan Jasa	596.743.700.700	478.624.923.407	511.945.675.489
e. Belanja Hibah	73.869.224.350	71.791.892.276	73.951.472.750

f. Belanja Bantuan Sosial	18.088.987.500	17.895.482.318	24.122.587.500
2. Belanja Modal	810.693.425.259	248.830.058.750	271.020.244.399
a. Belanja Tanah	0		0
b. Belanja Peralatan dan Mesin	122.244.020.200	100.338.640.919	109.857.757.698
c. Belanja Bangunan dan Gedung	422.163.962.808	120.463.234.991	114.143.415.361
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	236.558.429.000	22.356.765.340	41.374.421.340
e. Belanja modal aset tetap lainnya	29.727.013.251	5.671.417.500	5.644.650.000
f. Belanja modal aset lainnya			0
3. Belanja Tidak Terduga	17.320.650.000	17.320.650.000	5.357.199.200
4. Belanja Transfer	416.355.235.996	415.640.235.996	416.355.235.996
a. Belanja Bagi Hasil	6.901.000.000	6.901.000.000	6.901.000.000
b. Belanja Bantuan Keuangan	409.454.235.996	408.739.235.996	409.454.235.996

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung pada Perubahan RKPD Tahun 2022 disebabkan karena:

- a. Penyesuaian prioritas belanja berdasarkan kemampuan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2022;
- b. Penyesuaian belanja pada kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Alokasi Khusus berdasarkan penetapan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- c. Penyesuaian belanja pada kegiatan yang bersumber dana dari Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor dan Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi berdasarkan ketetapan alokasi Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

Belanja Pegawai pada Perubahan RKPD tahun 2022 ditargetkan meningkat dibandingkan RKPD tahun 2022 dan Penetapan APBD 2022 yaitu dari Rp. 739.391.968.467 pada RKPD dan APBD Tahun 2022 menjadi Rp.749.539.637.482 pada Perubahan RKPD tahun 2022. Peningkatan belanja pegawai tersebut dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan biaya insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Belanja Barang dan Jasa pada Perubahan RKPD tahun 2022 ditargetkan meningkat dibandingkan penetapan APBD 2022 yaitu dari Rp. 478.624.923.407 pada APBD Tahun 2022 menjadi Rp. 511.945.675.489 pada Perubahan RKPD tahun 2022. Peningkatan belanja barang dan jasa tersebut didominasi oleh peningkatan belanja

dari kegiatan yang antara lain digunakan untuk belanja pemeliharaan kendaraan dinas, belanja honorarium non PNS dan belanja makanan dan minuman rapat.

Belanja Hibah pada Perubahan RKPD tahun 2022 ditargetkan meningkat dibandingkan penetapan APBD 2022 yaitu dari Rp.71.791.892.276 pada APBD Tahun 2022 menjadi Rp.73.951.472.750 pada Perubahan RKPD tahun 2022. Peningkatan belanja barang dan jasa tersebut disebabkan karena penambahan alokasi belanja hibah uang untuk lembaga pendidikan swasta (BOSDA).

Belanja Bantuan Sosial pada Perubahan RKPD tahun 2022 ditargetkan meningkat dibandingkan penetapan APBD 2022 yaitu dari Rp. 17.895.482.318 pada APBD Tahun 2022 menjadi Rp. 24.122.587.500 pada Perubahan RKPD tahun 2022. Peningkatan bantuan sosial tersebut disebabkan oleh peningkatan belanja pemberian bantuan sosial tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan bantuan sosial santunan kematian.

Belanja Modal pada Perubahan RKPD tahun 2022 ditargetkan meningkat dibandingkan penetapan APBD 2022 yaitu dari Rp. 248.830.058.750 pada APBD Tahun 2022 menjadi Rp. 271.020.244.399 pada Perubahan RKPD tahun 2022. Peningkatan bantuan modal tersebut disebabkan oleh tambahan kegiatan untuk belanja pengadaan peralatan komputer, perbaikan gedung kantor, peningkatan jalan dan belanja modal pembangunan saluran irigasi.

Belanja Tidak terduga pada Perubahan RKPD tahun 2022 ditargetkan menurun dibandingkan penetapan APBD 2022 yaitu dari Rp.17.320.650.000 pada RKPD tahun 2022 dan APBD Tahun 2022 menjadi Rp. 5.357.199.200 pada Perubahan RKPD tahun 2022. Penurunan tersebut disebabkan karena menyesuaikan kondisi perkembangan terkini pandemi Covid 19 yang sudah membaik dibandingkan tahun 2021.

Belanja Transfer pada Perubahan RKPD tahun 2022 ditargetkan meningkat dibandingkan penetapan APBD 2022 yaitu dari Rp. 415.640.235.996 pada APBD Tahun 2022 menjadi Rp. 416.355.235.996 pada Perubahan RKPD tahun 2022. Peningkatan bantuan transfer tersebut disebabkan oleh tambahan kegiatan untuk kegiatan pencegahan bencana dengan bentuk kegiatan perbaikan talud jalan dan jembatan penghubung antar desa.

3.2.2.1 Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Persentase realisasi belanja operasi terhadap belanja daerah Kabupaten Temanggung RKPD tahun 2022, APBD Tahun 2022, dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2022 rata-rata mencapai 61,81% secara lengkap terinci pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah
Perubahan RKPD Tahun 2022

Uraian	RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022
Belanja Operasi	1.428.093.881.017	1.307.704.266.468	1.359.029.112.571
Belanja Daerah	2.672.463.192.272	1.989.495.211.214	2.052.292.052.816
Persentase	53,44	65,73	66,24

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022

3.2.2.2 Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Kabupaten Temanggung RKPD tahun 2022, APBD Tahun 2022, dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2022 rata-rata mencapai 18,68% secara lengkap terinci pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah
Perubahan RKPD Tahun 2022

Uraian	RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022
Belanja Modal	810.693.425.259	248.830.058.750	269.571.429.899
Belanja Daerah	2.672.463.192.272	1.989.495.211.214	2.052.292.052.816
Persentase	30,34	12,51	13,20

3.2.2.3 Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Persentase belanja transfer terhadap Belanja Daerah Kabupaten Temanggung RKPD tahun 2022, APBD Tahun 2022, dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2022 rata-rata mencapai 18,92% secara lengkap terinci pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah
Perubahan RKPD Tahun 2022

Uraian	RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022
Belanja Transfer	416.355.235.996	415.640.235.996	416.355.235.996
Belanja Daerah	2.672.463.192.272	1.989.495.211.214	2.052.292.052.816
Persentase	15,58	20,89	20,29

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus adalah manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan. Kebijakan pembiayaan adalah sebagai berikut.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)
Besarnya SiLPA yang diperhitungkan dalam pembiayaan Tahun Anggaran berkenaan adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- 2) Penerimaan pinjaman daerah

Manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SiLPA dan pencairan dana cadangan tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan penerimaan pinjaman daerah. Pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, maupun dari pihak ketiga.

3) Penerimaan pembiayaan yang lain

Penerimaan pembiayaan yang lain dapat berupa penerimaan kembali atas investasi non permanen dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Penyertaan modal pemerintah daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dan atau barang daerah disesuaikan sesuai dengan *roadmap* penyertaan modal daerah.

2) Pembayaran pokok hutang

Pembayaran pokok hutang merupakan pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah.

3) Pengeluaran pembiayaan yang lain

Pengeluaran pembiayaan yang lain merupakan pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

Proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Temanggung RKPD tahun 2022, APBD Tahun 2022, dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2022 secara lengkap terinci pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung Perubahan RKPD Tahun 2022

No	Uraian	RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022
6.1	Penerimaan pembiayaan	186.209.130.624	112.608.410.174	148.835.965.726
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	186.209.130.624	112.608.410.174	148.835.965.726
6.1.2	Pencairan dana cadangan	0	0	0
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0
6.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0
6.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0
6.1.6	Penerimaan piutang daerah	0	0	0
6.1.7	Penerimaan perhitungan pihak ketiga	0	0	0
6.1.8	Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	0	0	0
6.2	Pengeluaran pembiayaan	14.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000
6.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	5.000.000.000	5.000.000.000
6.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	10.000.000.000		0
6.2.3	Pembayaran pokok utang	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
6.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0		0
6.2.7	Pengeluaran perhitungan pihak ketiga			0
Jumlah Pembiayaan Netto		172.209.130.624	103.608.410.174	139.835.965.726

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022

Penerimaan pembiayaan RKPD 2022 lebih tinggi dibandingkan APBD Tahun 2022, sedangkan pada Perubahan RKPD tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan APBD tahun 2022. Perbedaan angka penerimaan pembiayaan terletak pada komponen rekening Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang disesuaikan berdasarkan data yang ada pada Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan RKPD tahun 2022 ditargetkan sama dengan angka penetapan APBD 2022 yaitu dari Rp. 9.000.000.000,00 yang digunakan untuk pembentukan dana cadangan biaya pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 serta untuk pembayaran pokok hutang.

3.3 Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung selama 9 (sembilan) tahun dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.15
Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Temanggung

<i>Tahun</i>	<i>Opini BPK-RI</i>
2013	<i>Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</i>
2014	<i>Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan</i>
2015	<i>Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</i>
2016	<i>Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</i>
2017	<i>Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</i>
2018	<i>Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</i>
2019	<i>Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</i>
2020	<i>Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</i>
2021	<i>Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</i>

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2022

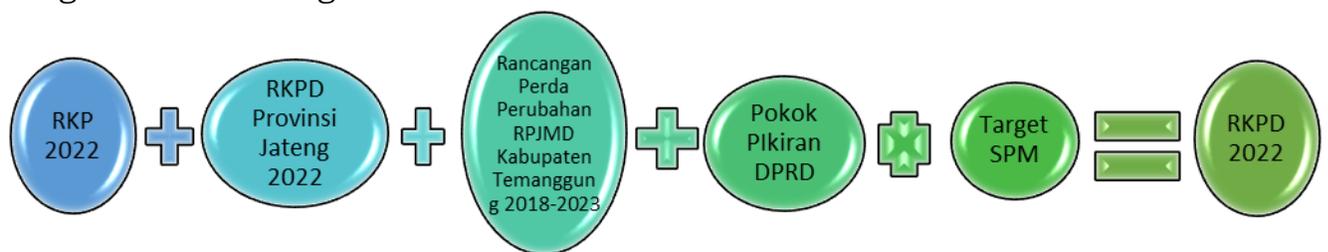
Dari data tersebut dapat terlihat bahwa opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung 8 (delapan) kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan 1 (satu) kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2022 Triwulan II sebagai pijakan kondisi yang ada untuk merumuskan target sasaran RKPD Tahun 2022. Prioritas Daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022 disusun berdasarkan:

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022;
2. Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
3. Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023;
4. Pokok-pokok pikiran DPRD; dan
5. Target standar pelayanan minimal (SPM).

Proses integrasi penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022 digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.1

Komponen penyusun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Secara garis besar substansi bab ini terdiri dari:

- A. Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- B. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022;
- C. Kontribusi Kabupaten Temanggung dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 pada Tahun 2022;
- D. Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2022;
- E. Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG);
- F. Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- G. Kebijakan dan Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Secara detail diuraikan sebagai berikut:

4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

4.1.1 Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**. Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

4.1.2 Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sector lainnya.

Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat

kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*publicservice*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Ke empat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Tujuan Sebagai Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	TARGET PERUBAHAN 2022
1	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,16	70,16
		Angka Kemiskinan	%	10,00	10,00
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,50	3,50
		Pendapatan per Kapita	Juta Rupiah	28,45	28,45

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	TARGET PERUBAHAN 2022
	berkelanjutan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,05	3,50
		Ketimpangan Pendapatan	%	18,50	18,50
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64,50	64,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	81,00	81,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2022

a. Tujuan dan Sasaran Misi 1 (Pertama) “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya”

Tujuan yang akan dicapai pada Misi Pertama adalah “Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya”, dengan memperhatikan 2 (dua) indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Kemiskinan, yang sarannya meliputi:

- 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan;
- 2) Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan;
- 3) Meningkatnya budaya literasi masyarakat;
- 4) Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga;
- 5) Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
- 6) Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan;
- 7) Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- 8) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk;
- 9) Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;

b. Tujuan dan Sasaran Misi 2 (Kedua) “Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan”.

Tujuan Pembangunan Misi Kedua adalah “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan”, yang pencapaiannya dapat diukur melalui Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan. Adapun sarannya meliputi:

- 1) Meningkatnya kesejahteraan petani;
- 2) Meningkatnya kedaulatan pangan;
- 3) Meningkatnya pariwisata daerah;
- 4) Meningkatnya investasi sektor riil;
- 5) Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah;
- 6) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

c. Tujuan dan Sasaran Misi 3 (Ketiga) “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”

Tujuan pembangunan dari Misi Ketiga adalah “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”, dengan memperhatikan 2 (dua) indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun sasarannya meliputi:

- 1) Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan;
- 2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa;
- 3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- 4) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum;
- 5) Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.

Masing-masing sasaran pada setiap misi telah diukur dengan indikator sasaran yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.2

Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran per Misi dengan Urusan/Bidang

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM

MISI 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya							
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	TARGET PERUBAHAN 2022	SATUAN	BIDANG
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	1. Indek Pembangunan Manusia (IPM)	1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,65	7,65	Tahun	Pendidikan
			2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,42	12,42	Tahun	
	2. Angka kemiskinan	2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	3. Angka Harapan Hidup (AHH)	75,51	75,51	Tahun	Kesehatan
			4. Indeks Kinerja RSUD	79,80	79,80	Kategori	
	3. Meningkatnya budaya literasi masyarakat	5. Persentase peminjam di perpustakaan	80	80	%	Perpustakaan	
	4. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	6. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	3,53	3,53	Angka	Pemuda dan Olah Raga	
		7. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	3,20	3,20	Angka		
	5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	8. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IKP)	3,41	3,41	Angka	Kebudayaan	
	6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	9. Indek Gotong Royong	4,21	4,21	Angka	Pemerintahan Umum	
		10. Indek Toleransi	4,17	4,17	Angka		

MISI 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya							
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	TARGET PERUBAHAN 2022	SATUAN	BIDANG
		7. Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	11. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,81	0,81	%	Pengendalian Penduduk
		8. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,64	95,64	Angka	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			13. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	0,004	0,004	%	
		9. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	14. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	63	63	%	Sosial

MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan							
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	TARGET PERUBAHAN 2022	SATUAN	URUSAN / BIDANG
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatnya kesejahteraan petani	15. Tingkat ketersediaan energi perkapita	2930	2930	Kkal/kapita/hari	Pertanian
	2. Pendapatan perKapita		16. Tingkat ketersediaan protein perkapita	103,6	103,6	Kkal/kapita/hari	
	3. Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)		17. Tingkat ketersediaan lemak perkapita	37,25	37,25	Kkal/kapita/hari	

MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan							
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	TARGET PERUBAHAN 2022	SATUAN	URUSAN / BIDANG
	4. Ketimpangan Pendapatan	2. Meningkatnya kedaulatan pangan	18. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	70,80	78,20	-	Pangan
			19. Tingkat Konsumsi Ikan	21,29	21,29	Kg/kap/th	Kelautan dan Perikanan
		3. Meningkatnya pariwisata daerah	20. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,63	1,63	%	Pariwisata
		4. Meningkatnya investasi sektoriil	21. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	26,00	26,00	%	Perindustrian
			22. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19,50	19,50	%	Perdagangan
			23. Persentase Koperasi sehat	9,50	9,50	%	Koperasi dan UKM
			24. Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	0,014	0,014	%	
			25. Indek Kemudahan Berusaha	62,50	62,50	Angka	Penanaman Modal
			26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,70	75,70	%	Tenaga Kerja
		5. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	27. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	83,95	83,95	%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			28. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	89,45	89,45	%	
			29. Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	97,92	97,92	%	Perumahan dan Kawasan Permukiman
			30. Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1,59	1,59	%	Perhubungan

MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan							
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	TARGET PERUBAHAN 2022	SATUAN	URUSAN / BIDANG
		6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	31. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,18	69,18	Angka	Lingkungan Hidup

MISI 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas							
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	TARGET PERUBAHAN 2022	SATUAN	BIDANG
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	5. Indek Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan kualitas manajemen Pemerintahan	32. Indek Perencanaan Pembangunan Daerah	4,1	4,1	Angka	Perencanaan
			33. Persentase Ketercapaian Kinerja pembangunan daerah	89,00	89,00	%	
			34. Manajemen Risiko Indek (MRI)	Level 1	Level 1	Level	
	6. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		35. Indeks Inovasi Daerah	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Kategori	Penelitian dan Pengembangan
			36. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	15	15	%	Keuangan
			37. Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	79,4	79,4	Angka	
			38. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,45	3,45	Angka	Administrasi Pemerintahan
			39. Indek Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	20	20	Angka	

MISI 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas							
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	TARGET PERUBAHAN 2022	SATUAN	BIDANG
			40. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	BB	BB	-	
			41. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,93	3,93	Angka	Pengawasan
			42. Indeks Profesionalitas ASN	50,07	50,07	Angka	Kepegawaian dan Diklat
			43. Indeks <i>Merit System</i>	0,51	0,51	Angka	
			44. Indeks Manajemen Kearsipan	66,50	66,50	Angka	Kearsipan
			45. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	91,00	91,00	%	Sekretariat Dewan
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	46. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,90	2,90	Angka	Komunikasi dan Informatika
			47. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95,70	95,70	Angka	
			48. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	79,5	79,5	Angka	
			49. Rata-rata IKM di Kecamatan	83,50	83,50	%	Kewilayahan
		3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	50. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	0,70	0,70	Angka	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			51. Persentase desa yang berpredikat mandiri	6,02	6,02	%	
		4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	52. Indek Rasa Aman	4,43	4,43	Angka	Ketentraman dan Ketertiban Umum

MISI 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas							
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	TARGET PERUBAHAN 2022	SATUAN	BIDANG
		5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Penanggulangan bencana	53. Indek Resiko Bencana	192,08	192,08	Angka	Ketentraman dan Ketertiban Umum Kebencanaan

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung 2022

4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022

4.2.1 Tema Pembangunan Tahun 2022

1. Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022

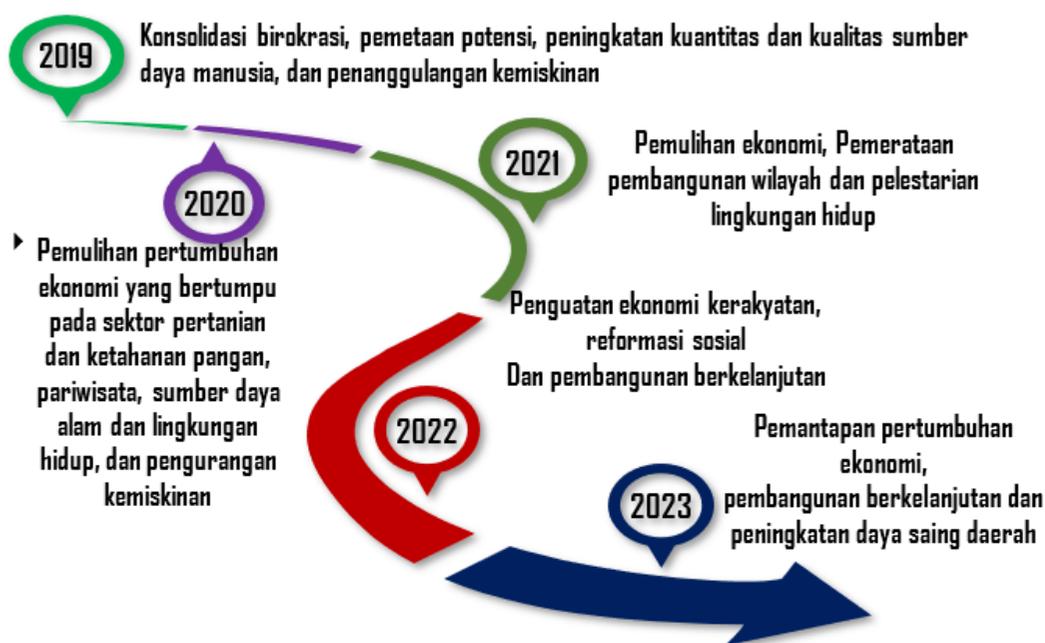
Tema yang di usung di tingkat nasional dalam rangka pemulihan dampak covid 19 adalah Pemulihan ekonomi dan Reformasi Struktural. Peran Pemerintah masih dibutuhkan dalam mengakselerasi proses pemulihan ekonomi masyarakat dan dunia usaha sehingga kebijakan di tahun 2022 diarahkan untuk melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing.

2. Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada Ranwal RKPD 2022 adalah Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM.

3. Tema Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Temanggung lima tahun ke depan, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya dan menjadi tema Pembangunan selama tahun 2019 s.d tahun 2023. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2019 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023. Arah kebijakan Pembangunan yang menjadi tema pembangunan Kabupaten Temanggung tahun 2022 yaitu Penguatan Ekonomi Kerakyatan, Reformasi Sosial, dan Pembangunan Berkelanjutan.



Gambar 4.2

Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan dalam Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023

4.2.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

1. Prioritas Nasional dalam RKP 2022

Ada 7 (tujuh) prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- c. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
- g. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dengan penekanan Prioritas Nasional (PN) pada Tahun 2022 adalah PN 1, PN 2, PN 3, PN 5 dan PN 6.

2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana.
- b. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
- c. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing.
- d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Pembangunan tahun 2022 ditujukan pada percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19;
- b. Optimalisasi Reformasi birokrasi (*good governance*);
- c. Penanggulangan kemiskinan terdampak Covid-19;
- d. Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup.

Perumusan prioritas RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dengan mempertimbangkan prioritas nasional, prioritas Provinsi Jawa Tengah, serta isu strategis Kabupaten Temanggung berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2022, janji politik kepala daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD. Secara rinci sebagai berikut:

- a. Isu Strategis berdasar evaluasi permasalahan pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Isu strategis utama yang akan diintervensi dalam RKPD Temanggung tahun 2022 yaitu:
 - 1) Menekan laju kemiskinan;
 - 2) Kualitas sumber daya manusia;
 - 3) Percepatan pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - 4) Tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

b. Janji Politik Kepala Daerah

Janji Politik Kepala Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD sebagai representasi pendekatan politik menjadi rujukan penentuan prioritas pembangunan RKPD Tahun 2022 dengan penyesuaian pada konteks isu strategis Tahun 2022. Substansi janji politik yang

termaktub dalam program prioritas Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 yaitu: (1) peningkatan akses pendidikan SD dan SMP; (2) pelayanan kesehatan; (3) pembinaan kepemudaan; (4) penanganan fakir miskin; (5) perlindungan dan jaminan sosial; (6) peningkatan produktivitas, penerapan teknologi untuk agribisnis, peternakan, perikanan; (7) peningkatan ketahanan pangan; (8) peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, keuangan daerah dan publik berbasis teknologi informasi; (9) pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa; (10) pemeliharaan ketentraman ketertiban umum, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; dan (11) pengembangan kawasan strategis.

c. Pokok Pikiran DPRD

Dalam rangka memberikan masukan terhadap Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022, DPRD Kabupaten Temanggung memberikan sumbangan pokok-pokok pikiran yang harus diperhatikan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang diselaraskan dengan Visi dan Misi yang ada antara lain sebagai berikut:

- 1) Pada Misi : “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya melalui Indeks Pembangunan Manusia dan Pengurangan angka kemiskinan“ meliputi :
 - a) Target pencapaian terhadap akses dan keterjangkauan layanan di bidang Pendidikan dan peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah;
 - b) Target pencapaian terhadap akses dan keterjangkauan layanan di bidang Kesehatan;
 - c) Peningkatan budaya literasi di masyarakat;
 - d) Peningkatan prestasi pemuda dan olah raga;
 - e) Peningkatan pengembangan dan pelestarian budaya lokal;
 - f) Peningkatan nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan;
 - g) Peningkatan penanganan, pemberdayaan, perlindungan dan jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - h) Peningkatan pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- 2) Pada Misi : “Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan dengan Pertumbuhan ekonomi, peningkatan inflasi, peningkatan pendapatan perkapita, pengurangan tingkat pengangguran terbuka, dan mengurangi permasalahan ketimpangan” meliputi :
 - a) Peningkatan kesejahteraan petani;
 - b) Peningkatan kedaulatan pangan;
 - c) Peningkatan kontribusi sektor pariwisata;
 - d) Peningkatan investasi sektor riil (khususnya pelaku UMKM);
 - e) Peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah
 - f) Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- 3) Pada Misi : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas dengan indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kepuasan masyarakat” meliputi :

- a) Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan;
- b) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa;
- d) Peningkatan ketentraman, dan ketertiban umum;
- e) Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.

Terhadap penekanan pokok-pokok pikiran DPRD dalam pencapaian target pada masing-masing misi tersebut, DPRD juga memberikan penekanan khususnya pada aspek pemulihan ekonomi, percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi agar dilakukan secara sinergi antar Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dengan masyarakat, maupun sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah di atasnya (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), di samping itu, juga dilakukan terobosan yang nyata terhadap pengembangan potensi sumber daya unggulan lokal (hortikultura, Kopi, Tembakau, Panili, Ternak dan lain-lain) dan peningkatan jejaring pemasaran yang selama ini masih menjadi kendala dari pengembangan potensi unggulan lokal tersebut.

Strategi dan arahan kebijakan tersebut di atas dituangkan dalam rumusan program prioritas sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 3) Program Pengembangan Kebudayaan;
- 4) Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- 7) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 8) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- 9) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 10) Program Penyelenggaraan Jalan
- 11) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 12) Program Kawasan Permukiman
- 13) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 14) Program Pengelolaan Persampahan;
- 15) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- 16) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 17) Program Penanggulangan Bencana.
- 18) Program Aplikasi Informatika
- 19) Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Keterkaitan antara Visi, Misi, Janji Politik Kepala Daerah dan Prioritas Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3

Keterkaitan antara Visi, Misi, Janji Politik Kepala Daerah, dan Prioritas Kabupaten Temanggung Tahun 2022

NO	VISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE RPJMD TAHUN 2018-2023	MISI	SUBSTANSI JANJI POLITIK YANG TERMAKTUB DALAM PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2018-2023	PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS
1	Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem”	1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya	Peningkatan akses pendidikan SD dan SMP	Penanggulangan kemiskinan terdampak Covid-19	Program Pengelolaan Pendidikan;
			Pembinaan kepemudaan		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
					Program pengembangan kebudayaan;
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;		
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;		
		2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	Penanganan fakir miskin	Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
			Peningkatan produktivitas, penerapan teknologi untuk agribisnis, peternakan, perikanan	Penanggulangan kemiskinan terdampak Covid-19	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
Peningkatan ketahanan pangan	Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;		
Pengembangan kawasan strategis			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;		

NO	VISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE RPJMD TAHUN 2018-2023	MISI	SUBSTANSI JANJI POLITIK YANG TERMAKTUB DALAM PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2018-2023	PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS
					Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Perdagangan;
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
					Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
		3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Pelayanan kesehatan	Optimalisasi reformasi birokrasi (<i>good governance</i>)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
			Perlindungan dan jaminan sosial		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
			Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, keuangan daerah dan publik berbasis teknologi informasi		Program perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah;
			Pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa		Program penelitian dan pengembangan;
			Pemeliharaan ketentraman ketertiban umum, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
					Program Administrasi Umum;

NO	VISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE RPJMD TAHUN 2018-2023	MISI	SUBSTANSI JANJI POLITIK YANG TERMAKTUB DALAM PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2018-2023	PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS
					Program Penyelenggaraan Pengawasan; Program Kepegawaian Daerah; Program Informasi dan Komunikasi Publik; Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Program Penataan Desa; Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Program Penanggulangan Bencana.

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2022

Tabel 4.4

Keterkaitan Prioritas kabupaten Temanggung, Strategi Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten, Prioritas RKPD Provinsi Jateng, dan Prioritas Nasional Tahun 2022

NO	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG	STRATEGI	FOKUS PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	PRIORITAS RKPD PROVINSI JAWA TENGAH	PRIORITAS NASIONAL
1.	Optimalisasi Reformasi Birokrasi (<i>good governance</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi - Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik yang adaptif - Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik - Program Aplikasi Informatika 	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah serta pemantapan	<p>Prioritas Nasional 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar</p> <p>Prioritas Nasional 7 : Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</p>

NO	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG	STRATEGI	FOKUS PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	PRIORITAS RKPD PROVINSI JAWA TENGAH	PRIORITAS NASIONAL
		masyarakat - Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum		kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	
2.	Penanggulangan kemiskinan terdampak Covid-19	- Penyempurnaan kebijakan bantuan sosial, keberpihakan kepada masyarakat miskin, rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; - Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Penanggulangan Bencana	Pemaantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)	Prioritas Nasional 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Prioritas Nasional 3 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing Prioritas Nasional 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
3.	Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	- Mengoptimalkan potensi wisata dan daerah tujuan wisata yang adaptif terhadap pandemi covid-19	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan	Prioritas Nasional 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan

NO	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG	STRATEGI	FOKUS PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	PRIORITAS RKPD PROVINSI JAWA TENGAH	PRIORITAS NASIONAL
		- Mengoptimalkan kewirausahaan masyarakat dan promosi investasi	- Program Pemberdayaan UMKM	ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Berkeadilan Prioritas Nasional 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Prioritas Nasional 3 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing Prioritas Nasional 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Prioritas Nasional 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
4.	Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang - Peningkatan kualitas lingkungan yang berkelanjutan	- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; - Program Pengelolaan Persampahan - Program Penyelenggaraan Jalan - Program Kawasan Permukiman	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	Prioritas Nasional 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Prioritas Nasional 7 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung 2022

4.3 Kontribusi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 pada Tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung terlaksananya Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung (Purwomanggung) dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Kabupaten Temanggung masuk dalam percepatan Kawasan Purwomanggung. Program kegiatan yang direncanakan dalam mendukung percepatan tersebut adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.5
Perencanaan Pembangunan Mendukung Perpres 79 Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Progres	Tindak Lanjut
1	Pembangunan Prasarana Konservasi SDA Sungai Bodri, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung	- Tahun 2009 : DED 2009 (APBD) - Tahun 2022 : Review DED 2022 - Tahun 2023 : Pelaksanaan kegiatan konstruksi 2023	Ditangani oleh BBWS Bodri Kuto Jawa Tengah
2	Peningkatan Jalan Pringsurat - Secang - Batas Yogya, Kabupaten Temanggung	- Tahun 2020-2024 Pelaksanaan kegiatan konstruksi	Kewenangan pusat karena jalan nasional
3	Pengembangan Kawasan Kopi dan Pengembangan Kawasan Agropolitan PRING KRAKAL (Pringsurat, Kranggan, Kaloran), Kabupaten Temanggung	Tahun 2021 : Telah dialokasikan budidaya Rp. 3,36 M (APBN) Tahun 2021 : FS dan DED gudang dan sarpras pengolahan Tahun 2022 : Pembangunan fisik usulan lewat APBN 1M APBD mensupport dalam pembinaan, monitoring dan evaluasi	Pengadaan bibit dan pupuk untuk pengembangan kawasan Inisiasi oleh provinsi
4	Reservasi dan revitalisasi Umbul Jumprit	Tahun 2022 : pembangunan fisik mulai dilakukan, didanai lewat APBN	Ditangani oleh BBWSO Serayu Opak Yogyakarta dan BP2W Provinsi Jawa Tengah
5	Peningkatan ruas jalan Dakaran – Sibajak	Tahun 2020-2023 : Sudah terlaksana melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah	Ditangani Oleh DPUPR
6	Kawasan khusus terpadu Nusantara	Tahun 2022-2023 : Dilaksanakan <i>launching</i> di Kawasan pedesaan Bansari	Ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT)
7	Pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta dengan salah satu pintu tol di Kab. Temanggung	Tahun 2022-2024 : Akan dilaksanakan pembangunan jalan tol dengan salah satu pintu tol di Desa Soropadan, Kec. Pringsurat	Ditangani oleh BPJT Kementerian PUPR

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2022

4.4 Pembangunan Infrastruktur Pada Tahun 2022

Program pembangunan infrastruktur pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 difokuskan untuk mendukung terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Trentem, Marem dan Gandem melalui Tema penguatan ekonomi kerakyatan, reformasi sosial dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastuktur yang direncanakan tidak sebatas bidang pekerjaan umum namun juga bidang kesehatan, dan pendidikan.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di DPUPR yang bertujuan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan sehingga memperlancar arus transportasi yang akan berdampak dalam pergerakan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, meningkatkan akses pendidikan dan akses kesehatan, tema penguatan ekonomi kerakyatan, dan prioritas pemerataan pembangunan wilayah dalam tema pembangunan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Dinas Kesehatan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat melalui puskesmas dan optimalisasi pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dan prioritas Optimalisasi reformasi birokrasi (*good governance*) dalam tema pembangunan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat dan prioritas penanggulangan kemiskinan terdampak covid 19 dalam tema pembangunan berkelanjutan.

4.5 Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 tahun 2018 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung. Sesuai Perbup ini, seluruh perangkat daerah dan desa wajib menyusun perencanaan penganggaran responsive gender pada semua program dan kegiatan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada menggunakan Teknik analisis gender berupa GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statement*). Adapun penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender dilaksanakan setiap tahun sebelum penyusunan rencana kerja anggaran.

Dalam melaksanakan PUG dibentuk Lembaga yang berfungsi untuk mendukung percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, meliputi:

1. Pokja PUG, yang bertugas: mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing perangkat daerah dan desa; melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah desa; menyusun program kerja PUG setiap tahun; mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di setiap perangkat daerah dan pemerintahan desa; merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati; menyusun profil gender kabupaten; melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di perangkat daerah dan desa; menyusun rencana aksi daerah PUG di Kabupaten Temanggung; mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing perangkat daerah.
2. Tim teknis pokja PUG yang menyelenggarakan fungsi mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu gender pada seluruh bidang pembangunan dan masing-

masing Lembaga; mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi untuk PUG; mengembangkan model pembangunan responsive gender di berbagai bidang pembangunan dan masing-masing lembaga; menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan PUG kepada Bupati; melaksanakan implementasi program dan kekuatan PUG di setiap lembaga; fasilitasi dan advokasi program dan kegiatan PUG. Tugas Tim Teknis PUG antara lain: menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan dan pembangunan daerah; menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran daerah; melakukan advokasi PUG; menyiapkan rancangan kebijakan implementasi strategi PUG di setiap perangkat daerah; melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; menyiapkan bahan pelaporan kelompok kerja PUG.

3. *Focal point*, yang terdiri dari aparatur perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing. Focal point bertugas: mempromosikan PUG pada unit kerja; mengkoordinasikan penyusunan data gender pada masing-masing perangkat daerah; mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran perangkat daerah yang responsive gender; melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan perangkat daerah; mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan perangkat daerah.

4.6 Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

4.6.1 Membentuk Desa Tangguh Bencana

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pelaksanaan tanggung jawab ini pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan. Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi program Destana dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa/kelurahan. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Strategi-strategi yang diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana antara lain meliputi:

1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program.
2. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.
3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian/lembaga atau K/L, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.
4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.

5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan warga.
6. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
8. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko.
9. Pemaduan upaya-upaya PRB ke dalam pembangunan demi keberlanjutan program.
10. Pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Sejak tahun 2017 – 2022 s.d Triwulan II terdapat peningkatan jumlah desa/kelurahan rawan bencana, namun juga diiringi dengan meningkatnya jumlah desa/kelurahan tangguh bencana karena adanya program pembentukan Destana. Pada dua tahun terakhir yaitu 2021 s.d 2022 Triwulan II, desa rawan bencana di Kabupaten Temanggung tidak bertambah yaitu sejumlah 217 desa/kelurahan. Sedangkan desa/kelurahan tangguh bencana mengalami peningkatan dari yang tadinya 18 desa/kelurahan pada tahun 2021 menjadi 21 desa/kelurahan pada tahun 2022 Triwulan II.

Target cakupan Destana pada tahun 2022 adalah 9,52%, sedangkan target cakupan Destana pada tahun 2023 menurut RPJMD adalah 10,47%. Hingga Triwulan II tahun 2022, capaian Destana telah memenuhi target tahun 2022, namun belum memenuhi target 2023. Capaian saat ini, tahun 2022 Triwulan II yaitu 9,68% yang berarti sudah memiliki progress sebesar 92,43% untuk mencapai target 2023.

4.6.2 Membentuk Desa Mitigasi pada Desa Rawan Bencana

Di Kabupaten Temanggung daerah yang merupakan desa rawan bencana sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 217 desa/kelurahan rawan bencana. Jumlah ini mendominasi lebih dari 50% dari jumlah desa yang terdapat di Kabupaten Temanggung, sehingga untuk mengurangi resiko bencana yang terjadi di daerah Kabupaten Temanggung diperlukan peningkatan kapasitas desa. Peningkatan kapasitas ini salah satunya adalah mengupayakan mitigasi di desa yang rawan bencana. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik itu bencana alam maupun bencana non alam. Dalam Implementasi yang termasuk kegiatan mitigasi bencana di antaranya:

1. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
2. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
3. Pengembangan budaya sadar bencana;
4. Penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana;
5. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
6. Pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam;
7. Pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi;

8. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
9. Kegiatan mitigasi bencana lainnya.

Persentase Desa Mitigasi terhadap desa rawan bencana yang di mulai Tahun 2017 s.d 2022 Triwulan II terdapat peningkatan persentase dengan adanya program kegiatan mitigasi di desa/kelurahan rawan bencana berupa pemasangan alat peringatan dini bencana khususnya untuk peringatan dini bencana tanah longsor, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya program kegiatan Desa mitigasi terhadap Desa Rawan bencana berupa EWS belum ada namun sudah adanya pelatihan sumber daya manusia pada daerah rawan bencana. Pada tahun 2022 Triwulan II sudah ada penambahan kegiatan yang bersumber dari APBD I dan Dana Desa (mandiri) sehingga capaian Desa Mitigasi terhadap Desa Rawan Bencana s.d Triwulan II tahun 2022 adalah 69,12% dari target tahun 2022 yaitu 78,3%. Persentase capaian s.d Triwulan II tahun 2022 tersebut telah mencapai 88,28% dari 100% target 2022. Sedangkan realisasi tersebut baru mencapai 80,01% dari 100% untuk mencapai target kondisi akhir yaitu tahun 2023 yang sebesar 86,4%.

Sejak Tahun 2016 merintis desa mitigasi dengan upaya mitigasi yang dilakukan antara lain adalah dengan sosialisasi dan pemasangan EWS (*Early Warning System*) khusus tanah longsor, pemasangan plank jalur evakuasi serta pelatihan menghadapi bencana yang pernah dilaksanakan. Berdasarkan data tersebut di atas desa mitigasi dari tahun ke tahun akan mengalami kenaikan selaras dengan upaya program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung mitigasi bencana pada daerah rawan bencana. Data dukung berupa daftar lokasi pemasangan EWS tanah longsor, pelatihan serta pemasangan plank jalur evakuasi yang telah dilaksanakan sejumlah 150 desa sebagaimana terdapat pada Tabel Desa Mitigasi Bencana s.d. 2022 Triwulan II.

Tabel 4.6
Desa Mitigasi Bencana s.d 2022 Triwulan II

NO	KECAMATAN	DESA	DESA RAWAN	SOSIALISASI	PELATIHAN	SIMULASI	PLANK EVAKUASI	EWS	RDTB	KAMPUNG SIAGA	DSB	SIMULASI GABUNGAN	KET
1	BULU	PANDEMULYO	2020	-	-	-	-	2019	-	-	-	-	-
2	BULU	MALANGSARI	2020	-	-	-	-	2019	-	-	-	-	-
3	BULU	PAGERGUNUNG	2020	2021	2021	2021	-	2018	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
4	BULU	WONOSARI	2020	2021	2021	2021	2018	2019	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
5	BULU	BANSARI	2020	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-
6	BULU	WONOTIRTO	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
7	TEMBARAK	KEMLOKO	2020	2019	2019	2019	-	2017	2019	-	-	-	APBD/RDTB
8	TEMBARAK	GANDU	2020	-	-	-	-	2017	-	-	-	-	-
9	TEMBARAK	GREGES	2020	-	-	-	-	2019	-	-	-	-	-
10	TEMBARAK	DRONO	2020	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-
11	TEMBARAK	BANARAN	2020	-	-	-	-	2017	-	-	-	-	-
12	TEMANGGUNG	BANYUURIP	2020	2017	2017	2017	-	-	-	-	2017	-	PMI/DSB
13	TEMANGGUNG	WALITELON SELATAN	2020	-	-	-	-	2019	-	-	-	-	-
14	TEMANGGUNG	GILINGSARI	2020	2016	2016	2016	-	-	-	-	-	2016	SIMULASI GABUNGAN
15	TEMANGGUNG	KEBONSARI	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	DANA DESA
16	PRINGSURAT	KARANGWUNI	2020	2015, 2017, 2021	2015, 2017, 2021	2015, 2017, 2021	-	2016(2)	2015	2019	-	-	DESTANA/APBN/BNPB DAN DINSOS/KSB(2019) DAN PELATIHAN BPBD 2021, RDTB 2017
17	PRINGSURAT	NGIPIK	2020	2021	2021	2021	-	2019	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
18	PRINGSURAT	SOBOREJO	2020	2015, 2021	2015, 2021	2015, 2021	-	2018	-	-	2015	-	PMI/DSB 2015 DAN PELATIHAN BPBD 2021
19	PRINGSURAT	WONOKERSO	2020	2021	2021	2021	-	2018	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
20	PRINGSURAT	PRINGSURAT	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
21	PRINGSURAT	KEBUMEN	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
22	PRINGSURAT	KUPEN	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
23	PRINGSURAT	GOWAK	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
24	PRINGSURAT	PINGIT	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
25	PRINGSURAT	KLEPU	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
26	PRINGSURAT	NGLOROG	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
27	PRINGSURAT	PAGERGUNUNG	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
28	KALORAN	TLOGOWUNGU	2020	-	-	-	-	2017	-	-	-	-	-
29	KALORAN	TLETER	2020	2019	2019	2019	-	2017, 2017	2019	-	-	-	RDTB/APBD
30	KALORAN	GETAS	2020	2015	2015	2015	-	2016,2017	2015	-	-	-	APBN/DESTANA/BNPB
31	KALORAN	KALIMANGGIS	2020	-	-	-	-	2017	-	-	-	-	-

NO	KECAMATAN	DESA	DESA RAWAN	SOSIALISASI	PELATIHAN	SIMULASI	PLANK EVAKUASI	EWS	RDTB	KAMPUNG SIAGA	DSB	SIMULASI GABUNGAN	KET
32	KALORAN	TEMPURAN	2020	2022	2022	2022	2022	2016, 2022	-	-	-	-	EWS PROV (2022)
33	KALORAN	KEBLUKAN	2020	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-
34	KANDANGAN	MARGOLELO	2020	-	-	-	-	2016	-	-	-	-	-
35	KANDANGAN	BLIMBING	2020	-	-	-	-	2017	-	-	-	-	-
36	KANDANGAN	KEDUNGUMPUL	2020	2019	2019	2019	-	2017	2019	-	-	-	APBD/RDTB
37	KANDANGAN	TLOGOPUCANG	2020	2015	2015	2015	-	2016	2015	-	-	-	APBD/RDTB
38	KANDANGAN	KEDAWUNG	2020	-	-	-	-	2016,2017	-	-	-	-	-
39	KANDANGAN	GESING	2020	2020	2020	2020	-	-	2020	-	-	-	APBD DESA
40	KEDU	KUTOANYAR	2020	2015	2015	2015	-	-	-	-	2015	-	PMI/DSB
41	KEDU	KUNDISARI	2020	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-
42	KEDU	BOJONEGORO	2020	2021	2021	2021	-	2019	-	-	-	-	2021 ANGGARAN DESA
43	KEDU	TEGALSARI	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	2021 ANGGARAN DESA
44	PARAKAN	PARAKAN WETAN	2020	2017	2017	2017	-	-	-	-	-	2017	SIMULASI GABUNGAN
45	PARAKAN	WATUKUMPUL	2020	-	-	-	-	2017	-	-	-	-	-
46	PARAKAN	RINGINANOM	2020	-	-	-	-	2017	-	-	-	-	-
47	PARAKAN	CATURANOM	2020	2021, 2016	2021, 2016	2021, 2016	-	2017	2021	-	-	2016	RDTB/APBD DAN SIMULASI GABUNGAN (2016) EWS (2017)
48	PARAKAN	GLAPANSARI	2020	2015	2015	2015	-	-	-	-	2015	-	PMI/DSB
49	NGADIREJO	DLIMOYO	2020	2015	2015	2015	2017	-	-	-	2015	-	PMI/DSB
50	NGADIREJO	PURBOSARI	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	NGADIREJO	CAMPURSARI	2020	-	-	-	2017	-	-	-	-	-	-
52	NGADIREJO	TEGALREJO	2020	2021	2021	2021	2017	2018	2021	-	-	-	APBD/RDTB
53	NGADIREJO	GIRIPURNO	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	NGADIREJO	KATEKAN	2020	2021	2021	2021	2017	2018	-	-	-	-	PELATIHAN 2021 DANA DESA
55	NGADIREJO	BANJARSARI	2020	-	-	-	2017	-	-	-	-	-	-
56	NGADIREJO	PRINGAPUS	2020	-	-	-	2017	-	-	-	-	-	PLANK EVAKUASI
57	NGADIREJO	GEJAGAN	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	ANGGARAN DESA 2021
58	JUMO	PADURESO	2020	2021	2021	2021	-	2018	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
59	JUMO	JOMBOR	2020	2021	2021	2021	-	2016	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
60	JUMO	JAMUSAN	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
61	JUMO	KERTOSARI	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
62	JUMO	GUNUNGEMPOL	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
63	JUMO	KETITANG	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
64	TRETEP	BONJOR	2020	2016	2016	2016	-	2016	2016	-	-	-	APBD/RDTB

NO	KECAMATAN	DESA	DESA RAWAN	SOSIALISASI	PELATIHAN	SIMULASI	PLANK EVAKUASI	EWS	RDTB	KAMPUNG SIAGA	DSB	SIMULASI GABUNGAN	KET
65	TRETEP	TEMPELSARI	2020	-	-	-	-	2016	-	-	-	-	-
66	TRETEP	CAMPUREJO	2020	2016	2016	2016	-	2019	-	2016	-	-	APBN/ DINSOS/KSB
67	CANDIROTO	CANDIROTO	2020	2021, 2015	2015	2015	-	-	-	-	-	2015	SIMULASI GABUNGAN
68	CANDIROTO	LEMPUYANG	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	-
69	CANDIROTO	CANGGAL	2020	2015, 2021	2015, 2021	2015, 2021	2017, 2018	2018	-	-	2015	-	PMI/DESA SIAGA BENCANA
70	CANDIROTO	KENTENGSARI	2020	2021	2021	2021	2017, 2018	2019	-	-	-	-	2021 ANGGARAN DESA
71	CANDIROTO	NGABEYAN	2020	2021	2021	2021	2017	-	-	-	-	-	-
72	CANDIROTO	BANTIR	2020	2021	2021	2021	2018	-	-	-	-	-	-
73	CANDIROTO	BATURSARI	2020	2021, 2015	2015, 2021	2015, 2021	-	-	-	-	-	2015	SIMULASI GABUNGAN
74	CANDIROTO	MUNENG	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	-
75	CANDIROTO	PLOSOGADEN	2020	2021	2021	2021	-	2019	-	-	-	-	-
76	CANDIROTO	SIDOHARJO	2020	2017, 2015, 2021	2017, 2015, 2021	2017, 2015, 2021	2018	2018	2017	-	2015	-	RDTB/APBD(2017) PMI(2015)
77	CANDIROTO	MUNTUNG	2020	2021	2021	2021	2018	-	-	-	-	-	SOSIALISASI DAN PELATIHAN DESA
78	KRANGGAN	NGROPOH	2020	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-
79	KRANGGAN	PENDOWO	2020	-	-	-	-	2017	-	-	-	-	-
80	KRANGGAN	KLEPU	2020	-	-	-	-	2019	-	-	-	-	-
81	KRANGGAN	KEMLOKO	2020	-	-	-	-	2017	-	-	-	-	-
82	KRANGGAN	GENTAN	2020	-	-	-	-	2017	-	-	-	-	-
83	KRANGGAN	PURWOSARI	2020	2017	2017	2017	2018	2017	2017	-	-	-	RDTB/APBD
84	TLOGOMULYO	LOSARI	2020	2021	2021	2021	2021	2017	2021	-	-	-	APBD/RDTB PLANG APBD PROV 6 BH(4 JALUR EVAK, 2 TITIK KUMPUL)
85	TLOGOMULYO	TLILIR	2020	-	-	-	-	2017	-	-	-	-	-
86	TLOGOMULYO	LEGOKSARI	2020	2014	2014	2014	-	-	-	-	-	2014	PMI DSB
87	TLOGOMULYO	PAGERSARI	2020	-	-	-	-	2017	-	-	-	-	-
88	SELOPAMPANG	TANGGULANOM	2020	2020, 2017, 2021	2020, 2017, 2021	2020, 2017, 2021	-	2017	2020	-	2017	-	APBD/RDTB (2020) DAN PMI (2017)2021 ANGGARAN DESA DAN SOSIALISASI BPBD 2021
89	SELOPAMPANG	JETIS	2020	2021	2021	2021	-	2017	-	-	-	-	-
90	SELOPAMPANG	SALAMREJO	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	-
91	SELOPAMPANG	NGADITIRTO	2020	2017, 2021	2017, 2021	2017, 2021	2018	2017	2017	-	-	-	APBD/RDTB(2017) DAN PELATIHAN 2021 MUSREN
92	SELOPAMPANG	BULAN	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	-
93	SELOPAMPANG	KACEPIT	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	-

NO	KECAMATAN	DESA	DESA RAWAN	SOSIALISASI	PELATIHAN	SIMULASI	PLANK EVAKUASI	EWS	RDTB	KAMPUNG SIAGA	DSB	SIMULASI GABUNGAN	KET
94	SELOPAMPANG	GAMBASAN	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	-
95	SELOPAMPANG	BUMIAYU	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	-
96	SELOPAMPANG	PLUMBON	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	-
97	BANSARI	BANSARI	2020	2015	2015	2015	2016	-	-	-	-	2015	SIMULASI GABUNGAN
98	BANSARI	MOJOSARI	2020	-	-	-	2016	2018	-	-	-	-	-
99	BANSARI	REJOSARI	2020	-	-	-	2016	-	-	-	-	-	-
100	BANSARI	GUNUNGSARI	2020	-	-	-	2016	-	-	-	-	-	-
101	BANSARI	BALESARI	2020	-	-	-	2016	-	-	-	-	-	-
102	BANSARI	PURBOREJO	2020	-	-	-	2016	-	-	-	-	-	-
103	BANSARI	TLOGOWERO	2020	-	-	-	2016	-	-	-	-	-	-
104	BANSARI	MRANGGEN KIDUL	2020	2017	2017	2017	2016	2016	-	2017	-	-	APBN/DINSOS/KSB
105	BANSARI	MRANGGEN TENGAH	2020	2016	2016	2016	2016	-	-	-	-	2016	SIMULASI GABUNGAN
106	BANSARI	CANDISARI	2020	-	-	-	2016	-	-	-	-	-	-
107	BANSARI	CAMPURANOM	2020	-	-	-	2016	-	-	-	-	-	-
108	BANSARI	GENTINGSARI	2020	-	-	-	2016	-	-	-	-	-	-
109	BANSARI	TANUREJO	2020	-	-	-	2016	-	-	-	-	-	-
110	KLEDUNG	KLEDUNG	2020	-	-	-	2019	-	-	-	-	-	-
111	KLEDUNG	KALIREJO	2020	-	-	-	2019	2019	-	-	-	-	-
112	KLEDUNG	PAPONAN	2020	-	-	-	2019	-	-	-	-	-	-
113	KLEDUNG	JEKETRO	2020	-	-	-	2019	-	-	-	-	-	-
114	KLEDUNG	KWADUNGAN GUNUNG	2020	2016	2016	2016	2019	2019	-	-	-	2016	SIMULASI GABUNGAN
115	KLEDUNG	KWADUNGAN JURANG	2020	2016	2016	2016	2019	-	-	-	-	2016	SIMULASI GABUNGAN
116	KLEDUNG	TLAHAB	2020	2021	2021	2021	2019	2018	2021	-	-	-	APBD/RDTB
117	KLEDUNG	PETARANGAN	2020	2015, 2021	2015,2021	2015, 2021	2019	2016	-	-	2015	-	PMI/DSB, DAN 2021 ANGGARAN DESA
118	KLEDUNG	CANGGAL	2020	-	-	-	2019	2017	-	-	-	-	-
119	KLEDUNG	JAMBU	2020	-	-	-	2019	-	-	-	-	-	-
120	KLEDUNG	KRUWISAN	2020	-	-	-	2019	2017	-	-	-	-	-
121	KLEDUNG	BATURSARI	2020	-	-	-	2019	2018	-	-	-	-	-
122	KLEDUNG	TUKSARI	2020	-	-	-	2019	2017	-	-	-	-	-
123	BEJEN	BANJARSARI	2020	2021	2021	2021	-	2018	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
124	BEJEN	JLEGONG	2020	2021	2021	2021	-	2017	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
125	BEJEN	PRANGKOKAN	2020	2021	2021	2021	-	2019	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
126	BEJEN	TANJUNG SARI	2020	2021	2021	2021	-	2018	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
127	BEJEN	PETUNG	2020	2015,2021	2015,2021	2015,2021	-	-	-	-	2015	-	PMI/DSB, PELATIHAN BPBD 2021
128	BEJEN	BEJEN	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021

NO	KECAMATAN	DESA	DESA RAWAN	SOSIALISASI	PELATIHAN	SIMULASI	PLANK EVAKUASI	EWS	RDTB	KAMPUNG SIAGA	DSB	SIMULASI GABUNGAN	KET
129	BEJEN	CONGKRANG	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
130	BEJEN	KEBONDALEM	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
131	BEJEN	SELOSABRANG	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
132	BEJEN	DUREN	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
133	BEJEN	NGALIYAN	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	PELATIHAN BPBD 2021
134	BEJEN	KEMUNING	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	ANGGARAN DESA 2021 DAN PELATIHAN 2021 BPBD
135	WONOBOYO	REJOSARI	2020	2013	2013	2013	-	-	-	-	-	2013	PMIDSB
136	WONOBOYO	WONOBOYO	2020	-	-	-	-	2019	-	-	-	-	-
137	WONOBOYO	KEBONSARI	2020	2016	2016	2016	2018	2016 (APBD), 2019 (APBD)	2016	-	-	-	APBD/RDTB
138	WONOBOYO	PESANTREN	2020	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-
139	WONOBOYO	CEMORO	2020	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-
140	WONOBOYO	TENING	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	ANGGARAN DESA 2021
141	GEMAWANG	GEMAWANG	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	-
142	GEMAWANG	MUNCAR	2020	2015, 2015, 2021	2015, 2015, 2021	2015, 2015, 2021	-	2016 (2)	2015	-	2015	-	DESTANA/APBN/BNPB DAN PMI /DSB
143	GEMAWANG	KEMIRIOMBO	2020	2021	2021	2021	-	2016	-	-	-	-	-
144	GEMAWANG	NGADISEPI	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	-
145	GEMAWANG	KREMPONG	2020	2021	2021	2021	-	2017	-	-	-	-	-
146	GEMAWANG	SUCEN	2020	2021	2021	2021	-	2017	-	-	-	-	-
147	GEMAWANG	KARANGSENENG	2020	2021	2021	2021	-	2019	-	-	-	-	-
148	GEMAWANG	BANARAN	2020	2016, 2021	2016, 2021	2016, 2021	-	2016 (APBD), 2015 (APBN)	2016	-	-	-	APBD/RDTB
149	GEMAWANG	KALIBANGER	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	-
150	GEMAWANG	JAMBON	2020	2021	2021	2021	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			147	94	94	94	45	85	18	3	11	9	

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung, 2021

4.6.3 Fasilitasi Perubahan Iklim

Dalam upaya melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, berikut beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung :

4.6.3.1 Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Perubahan iklim global yang terjadi disebabkan karena terganggunya keseimbangan energi antara bumi dan atmosfer. Keseimbangan tersebut dipengaruhi antara lain oleh peningkatan gas-gas asamarang atau karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄) dan nitrous oksida (NO) yang lebih dikenal dengan gas rumah kaca (GRK).

Perubahan iklim global tersebut telah mendorong sektor pemerintahan untuk berperan aktif dalam upaya penurunan emisi GRK. Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah capaian kinerja penurunan emisi GRK tahun 2021 sebesar 6.028,02 ton CO₂eq (CO₂ *equivalen*) yang berasal dari sektor pengelolaan limbah. Kabupaten Temanggung dalam konteks perubahan iklim menghasilkan GRK dari kegiatan ekonomi, utamanya dari kegiatan penggunaan energi, industri, pertanian, peternakan, kehutanan dan pengelolaan limbah.

Pada tahun 2018 Kabupaten Temanggung memulai untuk melakukan inventarisasi GRK dan ditindaklanjuti pada Tahun 2020 melalui *updating* data dan analisis. Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan pelibatan unsur dari berbagai pemangku kepentingan dan mempertimbangkan karakteristik, potensi emisi serta prioritas rencana pembangunan daerah. Pelibatan OPD di Kabupaten Temanggung sejak dari awal proses sampai dengan akhir dimaksudkan sebagai upaya menjaga kualitas dan akurasi data sumber emisi GRK.

Emisi GRK Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan emisi Tahun 2018. Emisi di Tahun 2019 termasuk kategori tinggi dikarenakan keberadaan data tentang sektor peternakan, lahan dan pertanian (terutama pada sub sector perubahan lahan yang tinggi). Emisi Kabupaten Temanggung berfluktuatif dengan emisi tertinggi pada tahun 2019 sebesar 2.746,1 Gg CO₂e. Sektor AFOLU (*Agriculture, Forestry, and Land Use*) berkontribusi paling besar terhadap emisi GRK di Kabupaten Temanggung disusul oleh sektor pengadaan dan penggunaan energi, pengelolaan limbah, kemudian IPPU (*Industrial Process and Product Use*). Berikut merupakan sumber yang menjadi prioritas dalam sistem inventarisasi GRK, yaitu: 1) Transportasi, 2) Industri Pengolahan, 3) Ternak, 4) Pengolahan limbah cair, 5) N₂O langsung dari pengolahan tanah, 6) Pengolahan Sawah, 7) Pembakaran Biomassa, 8) N₂O Tak langsung dari pengolahan tanah dan 9) Limbah Padat.

4.6.3.2 Sabuk Gunung

Sabuk Gunung merupakan gerakan konservasi penanaman pohon di lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Prahu. konservasi ini merupakan upaya

menanggulangi kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dinilai kritis. terdapat 13.000 hektare lahan di lereng Gunung Sumbing, Sindoro, Prahu masuk masuk dalam kategori lahan kritis mengakibatkan banyak mata air yang mulai mati dan berkurang debitnya. Sehingga hal ini banyak permintaan bantuan air bersih ke desa-desa yang terus meningkat setiap tahunnya.

Mulai akhir tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menanam pohon konservasi sekurangnya ada 500 ribu pohon dan dari non pemerintah 220 ribu pohon. Kebutuhan riil pohon untuk penanaman ini di atas 15 juta bibit pohon untuk seluruh Kabupaten Temanggung, sebagai upaya dalam penataan lingkungan hidup sehingga dengan konservasi lahan, diharapkan dapat meminimalkan polusi dan pencemaran lainnya, sehingga bumi ini menjadi lestari.

4.7 Kebijakan dan Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai secara kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Ketentuan umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, jenis pelayanan dasar di daerah dapat terlaksana. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

Penyusunan laporan dalam penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Materi muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar; dan penerima pelayanan dasar.

4.7.1 SPM Pendidikan

Realisasi pelaksanaan SPM Urusan Pendidikan di Kabupaten Temanggung tahun 2022 s.d Triwulan II sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7

Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022 Triwulan II

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET SPM	REALISASI CAPAIAN SPM	REALISASI CAPAIAN (%)
			JML ORG YANG AKAN TERLAYANI	JML ORG YANG TERLAYANI	
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	113.583	105.494	92,88
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	9.943	2.537	25,52
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	23.499	19.117	81,35

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui, realisasi capaian jenis pelayanan dasar Pendidikan Dasar belum dapat mencapai 100%. Hal tersebut dikarenakan masih ada penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah atau sekolah di luar daerah Kabupaten Temanggung.

Selain itu, pelayanan dasar PAUD juga belum mencapai 100%. Belum optimalnya pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini disebabkan karena sebagian besar satuan pendidikan anak usia dini dikelola oleh masyarakat dengan kemampuan manajerial dan finansial yang sangat terbatas, serta adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa pendidikan anak usia dini tidak penting dan biayanya mahal.

4.7.2 SPM Kesehatan

Realisasi pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Temanggung berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan tahun 2022 s.d Triwulan II dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022 Triwulan II

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET SPM	REALISASI CAPAIAN SPM	REALISASI CAPAIAN (%)
			JML ORG YANG AKAN TERLAYANI	JML ORG YANG TERLAYANI	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	10.733	3.719	34,65
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	10.221	3.660	35,81
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal essensial sesuai standar	3.604	3.568	99,00
4	Pelayanan kesehatan balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50.445	16.565	32,84
5	Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95.485	0	0
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Setiap warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	513.251	169.942	33,11
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	109.846	45.580	41,49
8	Pelayanan kesehatan penderita	Setiap penderita hipertensi mendapatkan	220.899	51.314	23,23

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET SPM	REALISASI CAPAIAN SPM	REALISASI CAPAIAN (%)
			JML ORG YANG AKAN TERLAYANI	JML ORG YANG TERLAYANI	
	hipertensi	pelayanan Kesehatan sesuai standar			
9	Pelayanan kesehatan penderita DM (Diabetes Melitus)	Setiap penderita DM mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar.	10.578	5.044	47,68
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ berat	Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.978	661	33,42
11	Pelayanan kesehatan pada orang terduga Tuberkulosis	Setiap orang terduga tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8.483	2.237	26,37
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Setiap orang dengan risik Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12.896	2.677	20,76

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 Triwulan II, dari total sasaran ibu hamil sebanyak 10.733, sudah terdapat 3.719 ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan dalam meningkatkan layanan antenatal sesuai standar yaitu dengan pendampingan ibu hamil yang mempunyai faktor resiko kehamilan, pemberian pelayanan ANC sampai dengan nifas sesuai standar secara optimal dan adanya sosialisasi perencanaan kehamilan sehat kepada masyarakat.

Selanjutnya untuk cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar baru mencapai 35,81% dengan sasaran masih data estimasi dan Dinas Kesehatan terus meningkatkan upaya-upaya untuk layanan bersalin sesuai standar yaitu di fasilitas kesehatan dan ditangani oleh tenaga penolong persalinan.

Kemudian untuk cakupan bayi baru lahir telah mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar mencapai 99,00%. Hal ini didukung dengan tersedianya fasilitas kesehatan yang lengkap (Rumah Sakit; Puskesmas, Klinik) sebagai fasilitas layanan kesehatan bayi baru lahir di

Kabupaten Temanggung termasuk tersedianya puskesmas PONED (Ngadirejo, Pringsurat; Gemawang; Bejen) untuk mempermudah akses layanan kesehatan.

Sedangkan persentase anak usia pendidikan dasar yang Mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar masih 0% dikarenakan dalam perhitungan untuk capaian skrining panak usia pendidikan dasar dilakukan pada akhir tahun.

Pada tahun 2022 Triwulan II tercapai 33,11% untuk pelayanan wajib mendapatkan skrining kesehatan bagi warga Negara usia 15-59 tahun. Merespon capaian ini, Dinas Kesehatan terus berupaya meningkatkan layanan skrining dengan pengaktifan kembali posyandu untuk penjarangan deteksi. Hal ini diimbangi dengan aktivasi kegiatan Posyandu lansia; peningkatan kemampuan kader lansia dan melibatkan lintas sektor terkait untuk berpartisipasi dalam kegiatan di Posyandu lansia. Upaya inovatif tersebut dimaksudkan untuk merespons capaian pelayanan kesehatan bagi lansia yaitu sebesar 41,49%.

Di tahun 2022 Triwulan II tercatat baru 23,23% penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Upaya yang akan ditingkatkan oleh Dinas Kesehatan untuk mencapai target yaitu mendorong pelaksanaan deteksi dini dan penemuan kasus hipertensi melalui kerjasama lintas program yang ada di Puskesmas; mendorong peningkatan pelayanan kasus hipertensi sesuai standar serta menghimpun data dari faskes swasta di wilayah kerja Puskesmas.

Selain itu dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 Triwulan II terdapat 26,37% orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar. Dinas kesehatan juga berupaya memaksimalkan kegiatan investigasi kontak pasien TBC untuk dilakukan pemeriksaan terduga; pembentukan DPPM (Distrik Public Private Mix) untuk pencatatan pelaporan kasus TB baik klinik swasta maupun pemerintah, dan koordinasi antara koalisi profesi TBC sebagai peningkatan jejarin pelayanan program TBC

4.7.3 SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Temanggung tahun 2022 sesuai yang diamanatkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal s.d Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9

Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022 Triwulan II

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET SPM	REALISASI CAPAIAN SPM	REALISASI CAPAIAN (%)
			JML ORG YANG AKAN TERLAYANI	JML ORG YANG TERLAYANI	
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	269.331	254.563	94,52
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh pengolahan air limbah untuk limbah domestik	196.536	186.365	94,82

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik mencapai angka 94%. Upaya untuk meningkatkannya adalah dengan mencanangkan program jamban keluarga sehat dan akan digiatkan pendanaan untuk SR (Sambungan Rumah).

4.7.4 SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Realisasi pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Temanggung tahun 2022 s.d Triwulan II sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.10

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022 Triwulan II

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET SPM	REALISASI CAPAIAN SPM	REALISASI CAPAIAN (%)
			JML ORG YANG AKAN TERLAYANI	JML ORG YANG TERLAYANI	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni korban bencana	0	0	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	Jumlah warga negara terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan	0	0	100%

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET SPM	REALISASI CAPAIAN SPM	REALISASI CAPAIAN (%)
			JML ORG YANG AKAN TERLAYANI	JML ORG YANG TERLAYANI	
	Daerah	rumah layak huni			

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di tahun 2022 sampai triwulan II tidak ada rumah kena bencana dan rumah yang terdampak relokasi yang harus ditangani sehingga capaian indikator sebesar 100%.

4.7.5 SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi pelaksanaan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Temanggung tahun 2022 s.d Triwulan II dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.11
Realisasi Pelaksanaan SPM
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2022 Triwulan II

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET SPM	REALISASI CAPAIAN SPM	REALISASI CAPAIAN (%)
			JML ORG YANG AKAN TERLAYANI	JML ORG YANG TERLAYANI	
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	960	0	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	597.024	597.024	100
3	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	406.594	406.594	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	620	620	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	20	9	45

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian pelayanan ketentraman dan ketertiban umum adalah 100%. Hal tersebut Satpol PP dalam melaksanakan penertiban dan penegakan Perda selalu mengedepankan persuasif dan humanis, sehingga tidak ada gesekan ataupun benturan yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun luka-luka.

Selanjutnya untuk pelayanan informasi rawan bencana telah mencapai 100% yang artinya seluruh warga telah mendapat layanan. Media yang digunakan untuk kegiatan SPM pelayanan informasi rawan rencana adalah media sosial, sosialisasi tiap kecamatan, surat edaran ke desa dan pelatihan.

Untuk persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana capaiannya adalah sebesar 100%. Data tersebut diambil dari data desa yang sudah pernah diberi layanan berupa pelatihan dan mitigasi bencana. Sedangkan data evakuasi korban bencana diambil dari data korban bencana yang berhasil diberi layanan penyelamatan dan evakuasi baik mengungsi, luka-luka maupun yang meninggal dunia.

Dari data tabel diatas, untuk capaian layanan SPM Sub urusan kebakaran kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemadam Kebakaran pada Tahun 2022 Triwulan II baru tercapai 45% dikarenakan kasus kebakaran banyak terjadi di luar Wilayah WMK. Untuk tahun 2022 sampai dengan triwulan II jumlah kebakaran mencapai 20 kasus dan yang masuk WMK 9 kasus, sehingga capaian layanan kebakaran mencapai 45%.

4.7.6 SPM Sosial

Realisasi pelaksanaan SPM Urusan Sosial di Kabupaten Temanggung tahun 2022 s.d Triwulan II sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial dapat di lihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.12
Realisasi Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Tahun 2022 Triwulan II

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET SPM	REALISASI CAPAIAN SPM	REALISASI CAPAIAN (%)
			JML ORG YANG AKAN TERLAYANI	JML ORG YANG TERLAYANI	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	164	164	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	46	46	100

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET SPM	REALISASI CAPAIAN SPM	REALISASI CAPAIAN (%)
			JML ORG YANG AKAN TERLAYANI	JML ORG YANG TERLAYANI	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	117	117	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis rehabilitasi di luar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	46	46	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	153	153	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk SPM Sosial, capaiannya hingga triwulan II sudah mencapai angka 100%. Tercapainya target tersebut dikarenakan telah terjalin koordinasi untuk pelayanan yang lebih maksimal dengan instansi terkait, dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga dan komunitas-komunitas yang memiliki kepedulian dalam penanganan masalah sosial seperti BAZNAS, Gerakan Mari Berbagi (GMB), Berbagi Informasi Temanggung (BIT), dan komunitas lainnya.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja Daerah

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 serta seiring dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah. RKPD disusun dengan menyinkronkan perencanaan dan penganggaran melalui tiga langkah yaitu pertama, melanjutkan implementasi *money follows* program, dengan cara mengintegrasikan sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan. Kedua, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, pemerintah provinsi maupun pusat. Ketiga, memperkuat kendali program dengan melakukan pengendalian, monitoring serta evaluasi.

Tahapan penyusunan program merupakan langkah teknokratis dalam menterjemahkan analisis dan metodologi perumusan sasaran pembangunan daerah. Indikasi rencana program disusun untuk menjabarkan sasaran pembangunan daerah dan dalam rangka pencapaian indikator sasaran serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pemerintah pusat menyatakan bahwa upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah di tahun 2022 ini ditempuh dengan menetapkan 7 prioritas nasional dalam RKP 2022. Tema yang diusung dalam RKP 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Seiring dengan RKP 2022 yang ditetapkan pemerintah pusat, maka RKPD Kabupaten Temanggung menyelaraskan program prioritasnya sesuai dengan program prioritas dalam RKP 2022. Keterkaitan antara program prioritas RKPD Kabupaten Temanggung dengan prioritas RKP 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.1
Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional dalam RKP
Tahun 2022

No	Prioritas Nasional RKP 2022	Jumlah Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	4	5		6
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	12	36.625.090.410	16.882.051.200	- DKPPP - Dinbudpar - DPM - Dinkopdag - Bagian Pembangunan - Bagian Perekonomian - BPKPAD
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	8	98.802.600.000	8.384.442.800	- DPUPR - Bappeda - Dinkopdag
3	Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing	12	254.172.887.961	210.979.748.835	- BKPSDM - Dindikpora - Dinpusip - Dinbudpar - Dinkopdag - Dinkes
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	22	377.041.900.407	689.903.466.271	- Inspektorat - Bappeda - Dinbudpar - BPKPAD - BKPSDM - Bagian Umum - Bagian Hukum - Bagian Pemerintahan - Bagian Ortala - Bagian Kesra - Kominfo - Dindukcapil - Dindikpora
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	3	1.021.541.268.661	505.759.019.024	- DPUPKP - Dindikpora - Dinkes
6	membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	10	49.399.703.918	11.290.831.261	- BPBD - DPRKPLH
7	Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.	11	4.843.276.766	6.115.443.388	- Satpol PP Dan Damkar - Bakesbangpol - DPM - Dinkopdag - Dinperinaker
JUMLAH		72	1.842.426.728.123	1.491.201.245.279	

Sumber: Bappeda, data diolah, 2022.

Tabel 5.2

Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Agenda Prioritas Penguatan
Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Tahun 2022

No	Prioritas Nasional RKP 202	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1	Penguatan Pilar Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian kondisi baik	2.985.000.000	277.147.900	DKPPP
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan produktivitas Padi	9.195.715.600	11.258.485.800	DKPPP
			Peningkatan produktivitas Ubi kayu			
			Produktivitas bawang putih			
			Produktivitas bawang merah			
			Produktivitas cabai rawit			
			Produktivitas cabai besar			
			Produktivitas kentang			
			Produktivitas durian			
			Produktivitas jambu biji			
			Produktivitas tembakau			
			Produktivitas Kopi Robusta			
			Produktivitas Kopi Arabika			
Produktivitas Cengkeh						
Produktivitas Vanili						
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Tingkat ketersediaan Protein per Kapita	426.757.000	111.432.000	DKPPP	

No	Prioritas Nasional RKP 202	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase obyek wisata yang berkembang	465.000.000	328.188.000	Dinbudpar
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase desa wisata unggulan	1.167.421.360	590.940.000	
		Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan jumlah wisatawan	416.000.000	129.096.000	Dinbudpar
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	100.000.000	75.000.000	DPM
			Persentase ketersediaan SDM bidang penanaman modal dan perizinan yang terlatih			
			Nilai Realisasi Investasi			
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	6.499.020.450	656.660.000	Dinkopdag
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	14.077.997.000	2.769.690.500	Bagian Pembangunan
			Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi			Bagian Perekonomian
			Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP			BPKPAD
			Persentase pelaksanaan kegiatan yang selesai tepat waktu			Bagian Pembangunan

No	Prioritas Nasional RKP 202	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu			
			Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu			
			Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan			
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	110.000.000	290.000.000	DPM
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	700.000.000	369.695.000	DPM
			Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan			
			Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan			
		Program Pengembangan Ekspor	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan	482.179.000	25.716.000	Dinkopdag
Jumlah Pagu Anggaran Mendukung PN Agenda 1				36.625.090.410	16.882.051.200	

Sumber: Bappeda, data diolah, 2022.

Tabel 5.3
Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Agenda Prioritas Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan Tahun 2022

No	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	Program Pengembangan Permukiman	Persentase penerangan jalan di kawasan permukiman	100.000.000	75.000.0000	DPUPR
		Program Penataan Bangunan Gedung	persentase gedung pemerintah kondisi baik	3.200.000.000	3.178.000.000	DPUPR
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Cakupan RTH Publik	3.650.000.000	777.859.000	DPUPR
		Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	13.111.000.000	2.218.544.000	DPUPR
			Persentase kawasan kumuh perkotaan			
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentase cakupan perumahan yang proporsi PSU sesuai ketentuan PERDA	50.000.000		DPUPR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	586.999.600	252.741.600	DPUPR
			Persentase kawasan strategis yang dikembangkan			
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang sumber daya alam	470.000.000	704.559.700	Bappeda
			Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi			
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	2.955.983.900	502.738.500	Dinkopdag		
	Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi					

No	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			peruntukan pedagang			
			Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar			
			Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan			
Jumlah Pagu Anggaran Mendukung PN Agenda 2				98.802.600.000	8.384.442.800	

Sumber: Bappeda, data diolah, 2022.

Tabel 5.4
Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Agenda Prioritas
SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun 2022

No	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
3	SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APK SD sederajat	239.934.460.561	199.541.495.876	Dindikpora
			Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A			
			Persentase APM SD sederajat			
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A			
			Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik			
			Persentase SD terakreditasi minimal B			
			Angka kelulusan SD			
			Angka putus sekolah SD sederajat			
			Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik			
			Persentase APK SMP sederajat			
			Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/			

No	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Paket B			
			Persentase APM SMP sederajat			
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/ SMPLB/MTs/ Paket B			
			Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat			
			Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik			
			Persentase SMP terakreditasi minimal B			
			Angka kelulusan SMP			
			Angka putus sekolah SMP sederajat			
			Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik			
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)			
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)			
			Persentase TK terakreditasi minimal B			
			Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik			
			Persentase angka melek huruf usia ≥15 tahun			
			Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan			
			Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah			
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	820.000.000	620.009.200	Dindikpora

No	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentase gugus depan yang aktif	500.000.000	400.000.000	Dindikpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	6.575.422.100	3.090.420.989	Dindikpora
	Persentase prestasi olahraga					
	Persentase atlet berprestasi					
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	3.440.005.700	150.414.500	Dinpusip
			Persentase perpustakaan yang aktif			
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Cakupan Naskah Kuno Kabupaten Temanggung dan Koleksi Nasional yang dilestarikan	4.999.600	4.996.000	Dinpusip
		Program Pelestarian dan Pengelolaan cagar budaya	Persentase pelestarian cagar budaya	200.000.000	180.179.620	Dinbudpar
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase pelestarian sejarah	80.000.000	26.316.000	Dinbudpar
		Program kepegawaian daerah	Persentase Penyusunan Formasi Pegawai	793.000.000	413.759.800	BPKPSDM
			Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS Tepat Waktu			
			Persentase Penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu			
			Persentase Ketersian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas			
			Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas			
			Persentase Pelanggaran disiplin ASN			
			Persentase Penyelesaian kasus			

No	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			pelanggaran disiplin ASN			
			Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian			
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	175.000.000	10.480.000	Dinkopdag
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	150.000.000	5.040.900.000	Dinkes
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rumah tangga sehat (PHBS Rumah tangga) strata utama dan paripurna	1.500.000.000	1.500.776.850	Dinkes
Jumlah Pagu Anggaran Mendukung PN Agenda 3				254.172.887.961	210.979.748.835	

Sumber: Bappeda, data diolah, 2022.

Tabel 5.5
Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Agenda Prioritas
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Tahun 2022

No	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
4	Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	553.799.996	461.203.750	Inspektorat
			Nilai maturitas SPIP			
			Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)			
			Persentase tindak lanjut aduan <i>Whistle blowing</i> , Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi			

No	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Nilai Survey Penilaian Integritas			
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	765.000.000	593.580.000	Bappeda
			Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu			
		Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	970.000.000		Bappeda
			Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok pelestari dan pecinta bahasa/ sastra yang aktif	8.862.999.800	7.826.948.000	Dinbudpar
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	69.999.900	-	Dinbudpar
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	61.763.378.800	423.645.992.756	BPKPAD
			Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD			
			Persentase dokumen penganggaran tepat waktu			
			Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu			

N o	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase realisasi keuangan			
			Cakupan kondisi keuangan daerah			
			Opini BPK atas LKPD			
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	3.219.999.400	3.088.268.500	BKPAD
			Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja			
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	1.690.000.000	1.171.955.200	BKPAD
			Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu			
			Prosentase pemutakhiran obyek pajak			
			Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu			
			Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah			
			Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu			
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penyusunan Formasi Pegawai	793.000.000	413.759.800	BKPSDM
			Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS Tepat Waktu			
			Persentase Penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu			
			Persentase Ketersian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas			
			Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi			

N o	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas			
			Persentase Pelanggaran disiplin ASN			
			Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN			
			Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian			
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Pengawas yang memiliki Kompetensi Diklat Kepemimpinan	1.700.000.000	5.044.000.000	BKPSDM
			Persentase ASN yang memiliki kompetensi Teknis dan Fungsional sesuai jabatannya			
		Program Administrasi Umum	Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LkjIP	24.833.006.050		- Bagian Ortala - Bagian Hukum - Bagian Umum - Bagian Humas
			Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti			
			Persentase peningkatan pengunjung website			
			Persentase jumlah kegiatan pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi			
			Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah			
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	42.225.862.400	38.920.536.200	- Bagian Pemerintahan - Bagian Kesra - Bagian Hukum
			Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir			

N o	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu			
			Cakupan Kecamatan Tertib Admistrasi			
			Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegunaan kondisi baik			
			Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati			
			Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH			
			Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi			
			Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi			
		Program Administrasi umum	Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LkjIP	24.833.006.050		Bagian Ortala Bagian Humas Bagian Umum
			Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti			
			Persentase peningkatan pengunjung website			
			Persentase jumlah kegiatan Pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi			
			Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah			
		Program Informasi dan	Persentase PPID badan publik yang aktif	4.289.020.000	2.977.682.800	Dinkominfo

N o	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Komunikasi Publik	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif			
			Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran			
		Program Aplikasi Informatika	Persentase ketersediaan akses internet publik	2.788.638.000	2.157.038.825	Dinkominfo
			Persentase ketersediaan jaringan intranet			
			Persentase sistem informasi yang terintegrasi			
			Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal			
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat penilaian persiapan/ pengelolaan resiko keamanan informasi	175.000.000	84.999.800	Dinkominfo
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Prosentase penanganan aduan masyarakat	399.999.4500	302.983.600	Inspektorat
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	80.000.000	-	Dindikcapi 1
			Persentase kepemilikan KTP el			
			Presentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)			
			Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu			
		Program Pencatatan Sipil	presentase kepemilikan akta kelahiran	80.000.000	-	Dindikcapi 1
			presentase penerbitan akta kematian			
			Cakupan pelayanan akta perkawinan dan perceraian tepat waktu			

No	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase Sarana prasarana Adminduk dalam kondisi baik Presentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan Presentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	1.075.320.000	1.131.650.175	Dindikcapi 1
		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APK SD sederajat Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A Persentase APM SD sederajat Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik Persentase SD terakreditasi minimal B Angka kelulusan SD sederajat Angka putus sekolah SD sederajat Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik Persentase APK SMP sederajat Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B Persentase APM SMP sederajat Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	239.934.460.561	199.541.495.876	Dindikpora

N o	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik			
			Persentase SMP terakreditasi minimal B			
			Angka kelulusan SMP sederajat			
			Angka putus sekolah SMP sederajat			
			Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik			
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)			
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)			
			Prosentase TK terakreditasi minimal B			
			Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik			
			Persentase angka melek huruf usia ≥ 15 tahun			
			Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan			
			Rasio Guru Keagamaan terhadap anak usia sekolah			
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Prosentase pelatih olahraga bersertifikat	6.575.422.100	3.090.420.989	Dindikpora
			Persentase prestasi olah raga			
			Persentase atlet berprestasi			
	Jumlah Pagu Anggaran Mendukung PN Agenda 4			377.041.900.407	690.452.516.271	

Sumber: Bappeda, data diolah, 2022.

Tabel 5.6
Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Agenda
Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar Tahun 2022

No	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
5	Infrastruktur untuk ekonomi dan Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	406.754.447.500	42,206,242,500	DPUPR
			Persentase jembatan kabupaten kondisi baik			
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu	374.852.360.600	306.217.523.148	Dinkes
			Angka kematian bayi			
			Prevalensi balita gizi buruk			
			Presentase rumah tangga yang memiliki jamban			
			Presentase puskesmas yang sarprasnya sesuai standar			
			Ketersediaan obat sesuai kebutuhan			
			Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar			
			Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar			
			Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan			
			Presentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan			
			Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar			
			Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani			
Angka Kematian Neonatal (AKN)						

No	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			
			Angka Kematian Balita			
			Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
			Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
			Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
			Presentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Cakupan rawat jalan)			
			Presentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama			
			Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
			Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
			Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
			Presentase orang terduga TBC			

No	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar			
			Penanganan KLB 1x24 jam			
			Angka penemuan kasus Malaria			
			Incident rate DBD (Demam Berdarah Dengue)			
			Angka penemuan kasus baru Kusta			
			Desa atau kelurahan UCI			
			Proporsi anak umur 1 tahun diimunisasi campak			
			Prevalensi gizi kurang pada anak balita (0-60 bulan)			
			Prevalensi stunting pada anak baduta (0-24 bulan)			
			Bayi umur < 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif			
			Prevalensi anemia pada ibu hamil			
			Desa bebas rawan gizi			
			Rumah Sehat			
			Indeks kinerja RSUD			
			Cakupan nilai akreditasi RSUD			
			Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit			
		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APK SD sederajat	239.934.460.561	199.541.495.876	Dindikpora
			Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A			
			Persentase APM SD sederajat			
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A			
			Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik			
			Persentase SD terakreditasi			

No	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			minimal B			
			Angka kelulusan SD sederajat			
			Angka putus sekolah SD sederajat			
			Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik			
			Persentase APK SMP sederajat			
			Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/ SMPLB/MTs/ Paket B			
			Persentase APM SMP sederajat			
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/ SMPLB/MTs/ Paket B			
			Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat			
			Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik			
			Persentase SMP terakreditasi minimal B			
			Angka kelulusan SMP sederajat			
			Angka putus sekolah SMP sederajat			
			Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik			
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)			
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)			
			Persentase TK terakreditasi minimal B			
			Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik			

No	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase angka melek huruf usia ≥ 15 tahun			
			Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan			
			Rasio Guru Keagamaan terhadap anak usia sekolah			
Jumlah Pagu Anggaran Mendukung PN Agenda 5				1.021.541.268.661	505.759.019.024	

Sumber : Bappeda, data diolah, 2022.

Tabel 5.7
Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Agenda Prioritas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Tahun 2022

No	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
6	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan desa tangguh bencana	4.883.712.518	2.986.294.961	BPBD
			Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana			
			Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana			
			Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana			
			Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana			
			Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana			
		Program penanggulangan kebakaran	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	1.913.143.800		BPBD

No	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)			
			Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten			
			Persentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi			
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Prosentase Rekomendasi Izin Penyimpanan LB3	20.000.000	10.000.000	DPRKPLH
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	41.213.792.300	6.042.326.400	DPRKPLH
			Cakupan layanan persampahan			
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	50.000.000	35.000.000	DPRKPLH
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	1.292.199.6000	758.102.400	DPRKPLH
			Indeks Kualitas Udara			
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	1.559.999.700	1.330.526.200	DPRKPLH
			Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung			
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	29.999.800	-	DPRKPLH
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	250.000.000	93.580.000	DPRKPLH

No	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH di terbitkan oleh Pemkab		35.001.300	DPRKPLH
Jumlah Pagu Anggaran Mendukung PN Agenda 6				49.399.703.918	11.290.831.261	

Sumber : Bappeda, data diolah, 2022.

Tabel 5.8
Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Agenda Prioritas Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Tahun 2022

No	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
7	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	1.095.000.000	1.232.000.000	Satpol PP Damkar
			Rasio PPNS			
			Rasio Linmas per RT			
		Program penguatan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	68.000.000	48.381.100	Bakesbangpol
			Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan			
		Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	1.411.687.750	1.365.387.250	Bakesbangpol
Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik						
Persentase keterwakilan perempuan di DPRD						

No	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		budaya politik				
		Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	290.000.000	538.045.640	Bakesbangpol
		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	756.000.000	1.016.999.998	Bakesbangpol
			Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba			
			Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba			
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan online	402.589.200	1.799.629.400	DPM
			Persentase perijinan yang bebas calo			
			Persentase perijinan yang diterbitkan tepat waktu			
		Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	290.000.000	10.000.000	Dinkopdag
		Program Hubungan Industrial	Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	160.000.000	50.000.000	Dinperinaker
			Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai			

No	Prioritas Nasional RKP 2022	Program Prioritas Kabupaten Temanggung	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Perubahan APBD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			UMK			
			Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial			
			Persentase perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama			
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	95.000.000	60.000.000	Dinkopdag
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	170.000.000	145.000.000	Dinperinaker
	Tingkat setengah pengangguran					
	Persentase tenaga kerja formal					
		Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	394.999.816	-	Dinperinaker
	Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru					
	Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang					
Jumlah Pagu Anggaran Mendukung PN Agenda 7				4.843.276.766	6.265.443.388	

Sumber : Bappeda, data diolah, 2022.

5.1.1 Deskripsi Program Pembangunan dari Kerangka Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS)

Selain mendukung program prioritas Agenda Pembangunan nasional, kebijakan pembangunan daerah juga menerapkan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan prioritas pada kegiatan yang berdaya ungkit besar pada pemulihan ekonomi atau reformasi sosial untuk daya tahan masyarakat paska pandemi *Covid-19*. Gambaran kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.9

Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dalam Mendukung Prioritas Tahun 2022

No	Kebijakan/ Prioritas Daerah Tematik	Program Pendukung	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana dan Stakeholders
1	2	3	4	5
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 : PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN, REFORMASI SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
a	Optimalisasi Reformasi Birokrasi (<i>Good Governance</i>)	1. Program Kepegawaian Daerah	Persentase penyusunan formasi pegawai	BKPSDM
			Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	BKPSDM
			Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	BKPSDM
			Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	BKPSDM
			Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	BKPSDM
			Persentase Pelanggaran disiplin ASN	BKPSDM
			Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	BKPSDM
			Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian	BKPSDM
		2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM
		3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	<u>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</u>	Bappeda
			<u>Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan</u>	Bappeda
			<u>Penelitian dan</u>	Bappeda

No	Kebijakan/ Prioritas Daerah Tematik	Program Pendukung	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana dan Stakeholders
1	2	3	4	5
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 : PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN, REFORMASI SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
			<u>Pengembangan Partisipasi Masyarakat</u>	
			<u>Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</u>	Bappeda
		4. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	Inspektorat
			Nilai maturitas SPIP	Inspektorat
			Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Inspektorat
			Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	Inspektorat
			Nilai Survey Penilaian Integritas	Inspektorat
		5. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai maturitas SPIP	Inspektorat
			Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Inspektorat
			Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	Inspektorat
			Nilai Survey Penilaian Integritas	Inspektorat
			Prosentase penanganan aduan masyarakat	Inspektorat
		6. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Bappeda
			Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Bappeda
			Monitoring Program dan Daerah Kegiatan Perangkat Daerah	Bappeda
		7. Program	Koordinasi Penyusunan	Bappeda

No	Kebijakan/ Prioritas Daerah Tematik	Program Pendukung	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana dan Stakeholders
1	2	3	4	5
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 : PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN, REFORMASI SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda
		8. Program	Penyusunan perubahan	BPKPAD

No	Kebijakan/ Prioritas Daerah Tematik	Program Pendukung	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana dan Stakeholders
1	2	3	4	5
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 : PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN, REFORMASI SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
		Pengelolaan Keuangan Daerah	KUA dan Perubahan PPAS	
			Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	BPKPAD
			Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	BPKPAD
			Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	BPKPAD
			Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	BPKPAD
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKPAD
			Koordinasi Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPAD
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	BPKPAD
			Pelaksanaan Pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKPAD
		9. Program Aplikasi Informatika	Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e- government</i> dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkominfo
			Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e- government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkominfo
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinkominfo
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	Dinkominfo
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinkominfo
		10. Program Penyelenggaraan Persandian	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan	Dinkominfo

No	Kebijakan/ Prioritas Daerah Tematik	Program Pendukung	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana dan Stakeholders
1	2	3	4	5
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 : PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN, REFORMASI SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
		untuk Pengamanan Informasi	Non Elektronik Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinkominfo
		11. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan ketersediaan data makro daerah	Dinkominfo
		12. Program Pencatatan Sipil	Pencatatan, penata usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dindukcapil
			Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan sipil pengumpulan data kependudukan	Dindukcapil
		13. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dindukcapil
		14. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pelaksana Koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Badan Kesbangpol
		15. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Fasilitasi pengembangan kawasan investasi dan kebijakan penanaman modal	DPM
			Pengkajian potensi investasi pariwisata	DPM
			Pengkajian potensi investasi UMKM	DPM
			Pengkajian potensi investasi pertanian	DPM
			Pengembangan potensi unggulan daerah	DPM
		16. Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan	DPM
			Sosialisasi kebijakan Penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan Peraturan Perizinan	DPM
			Diseminasi promosi investasi	DPM
		17. Program	Fasilitasi percepatan	DPM

No	Kebijakan/ Prioritas Daerah Tematik	Program Pendukung	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana dan Stakeholders
1	2	3	4	5
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 : PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN, REFORMASI SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
		Pelayanan Penanaman Modal	<p>pelayanan perizinan</p> <p>Peningkatan pelayanan perizinan satu pintu</p> <p>Penyempurnaan sarana dan prasarana perizinan</p> <p>Fasilitasi Pengaduan dan advokasi</p>	<p>DPM</p> <p>DPM</p> <p>DPM</p>
		18. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<p>Penyelenggaraan Temu Usaha</p> <p>Pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan perizinan</p> <p>Monev PATEN</p> <p>Monev dan Pelaporan LKPM</p>	<p>DPM</p> <p>DPM</p> <p>DPM</p> <p>DPM</p>
		19. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<p>Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</p> <p>Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</p> <p>Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</p> <p>Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LkjIP</p> <p>Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah</p> <p>Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah</p>	<p>Bagian Organisasi</p> <p>Bagian Organisasi</p> <p>Bagian Organisasi</p> <p>Bagian Organisasi</p> <p>Bagian Forkompim</p> <p>Bagian Pembangunan, Bagian PBJ</p>
		20. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<p>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</p> <p>Fasilitasi Bantuan Hukum</p> <p>Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</p> <p>Penataan Administrasi Pemerintahan</p> <p>Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</p> <p>Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri</p> <p>Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</p> <p>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial</p> <p>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>Bagian Hukum</p> <p>Bagian Hukum</p> <p>Bagian Hukum</p> <p>Bagian Pemerintahan</p> <p>Bagian Pemerintahan</p> <p>Bagian Pemerintahan</p> <p>Bagian Kesra</p> <p>Bagian Kesra</p> <p>Bagian Kesra</p>

No	Kebijakan/ Prioritas Daerah Tematik	Program Pendukung	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana dan Stakeholders
1	2	3	4	5
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 : PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN, REFORMASI SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
		21. Program Pengelolaan Arsip	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Dinpusip
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinpusip
		22. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD
			Pembahasan rancangan peraturan daerah	Sekretariat DPRD
			Penyelenggaraan Kajian Perundang undangan	Sekretariat DPRD
			Fasiliasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	Sekretariat DPRD
			Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD
			Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD
			Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD
		23. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	Satpol PP Damkar
			Rasio linmas per RT	Satpol PP Damkar
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	Satpol PP Damkar
		24. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	Satpol PP Damkar
			Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>)	Satpol PP Damkar
			Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	Satpol PP Damkar
			Persentase aparaturnya yang memenuhi standar kualifikasi	Satpol PP Damkar
		25. Program Penanggulangan Bencana	Cakupan desa tangguh bencana	BPBD
			Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	BPBD
			Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat	BPBD

No	Kebijakan/ Prioritas Daerah Tematik	Program Pendukung	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana dan Stakeholders
1	2	3	4	5
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 : PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN, REFORMASI SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
			bencana	
			Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	BPBD
			Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	BPBD
			Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	BPBD
		26. Program Perekonomian dan Pembangunan		Bagian Pembangunan, Bagian PBJ
b	Penanggulangan Kemiskinan terdampak covid 19	1. Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos
		2. Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinsos
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Dinsos
		3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Dinsos
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos
			Pembinaan Lanjut Usia Terlantar Potensial	Dinsos
		4. Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinsos
		5. Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja	Dinperinaker
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinperinaker
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dinperinaker
			Job Fair/Bursa Kerja	Dinperinaker

No	Kebijakan/ Prioritas Daerah Tematik	Program Pendukung	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana dan Stakeholders
1	2	3	4	5
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 : PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN, REFORMASI SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
		6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag
			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag
		7. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koordinasi dan Singkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinkopdag
			Pemantauan harga stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Dinkopdag
			Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Dinkopdag
		8. Program Pengembangan Ekspor	Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten/kota	Dinkopdag
		9. Program Standardisasi dan Perlindungan konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Dinkopdag
			Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Dinkopdag
		10. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dinperinaker
		11. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda

No	Kebijakan/ Prioritas Daerah Tematik	Program Pendukung	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana dan Stakeholders
1	2	3	4	5
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 : PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN, REFORMASI SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
			Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda
		12. Program Pemasaran Pariwisata	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Dinbudpar
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Dinbudpar
		13. Program Pengendalian	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian	DPPPAPPKB

No	Kebijakan/ Prioritas Daerah Tematik	Program Pendukung	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana dan Stakeholders
1	2	3	4	5
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 : PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN, REFORMASI SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
		Penduduk	Lapangan dan Pelayanan KB	
		14. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DPPPAPPKB
			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DPPPAPPKB
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	DPPPAPPKB
			Pembinaan Terpadu Kampung KB	DPPPAPPKB
		15. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPPAPPKB
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPPAPPKB
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	DPPPAPPKB
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPPAPPKB
		16. Program Pengelolaan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air	DPUPR

No	Kebijakan/ Prioritas Daerah Tematik	Program Pendukung	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana dan Stakeholders
1	2	3	4	5
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 : PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN, REFORMASI SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
		Sumber Daya Air (SDA)	Rehabilitasi/Pemeliharaan /Pembinaan Petani Pemakai Air	DPUPR
			Penyusunan DED Irigasi	DPUPR
			Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi	DPUPR
			Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	DPUPR
			Fasilitasi DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi	DPUPR
		17. Program Kawasan Permukiman	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	DPRKPLH
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DPRKPLH
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	DPRKPLH
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	DPRKPLH
			Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	DPRKPLH
		18. Program Penanggulangan Bencana	Penanganan pasca Bencana Kabupaten	BPBD
		19. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan jamban keluarga	Dinas Kesehatan
			Pembangunan septic tank	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		20. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	DKPPP
			Sarana Pendukung Lumbung Pangan Masyarakat - Lantai Jemur	DKPPP
			Sarana Pendukung Lumbung Pangan Masyarakat - Rice Milling Unit (RMU)	DKPPP
			Fasilitasi dan distribusi akses pangan	DKPPP
		21. Program Peningkatan	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari	DKPPP

No	Kebijakan/ Prioritas Daerah Tematik	Program Pendukung	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana dan Stakeholders
1	2	3	4	5
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 : PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN, REFORMASI SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
		Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tani pekarangan Pemberdayaan lumbung Pangan masyarakat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Pengisian gudang cadangan pangan dalam antisipasi kerawanan pangan Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA Pendampingan P2KP	DKPPP DKPPP DKPPP DKPPP DKPPP
		22. Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian
		23. Program Penataan Desa	Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah	Dinpermades
		24. Program Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Bantuan siswa miskin SMP/MTs Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin Bantuan siswa miskin masuk sekolah Fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora
		25. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumah Ibadah dan Sarpras Pendidikan, Keagamaan Kondisi Baik	Bagian Kesra
c	Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak covid 19	1. Program Promosi Penanaman Modal 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyelenggaraan matchmaking dan pameran investasi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan	DPM Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

No	Kebijakan/ Prioritas Daerah Tematik	Program Pendukung	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana dan Stakeholders
1	2	3	4	5
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 : PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN, REFORMASI SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
			Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	
		3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinperinaker
		4. Program Pengembangan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinbudpar
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dinbudpar
		5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	DPRKPLH
		6. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
		7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Upaya Khusus Mendukung Ketahanan Pangan	DKPPP
		8. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengembangan Kawasan Hortikultura	DKPPP
			Pengembangan Tanaman Kopi	DKPPP
			Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi Unggul	DKPPP
			Pengembangan Padi Organik	DKPPP
			Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Jagung	DKPPP

No	Kebijakan/ Prioritas Daerah Tematik	Program Pendukung	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana dan Stakeholders
1	2	3	4	5
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 : PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN, REFORMASI SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
			Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat	DKPPP
			Pengembangan Buah unggulan	DKPPP
			Pengadaan Alat Pertanian Perkebunan dan Pelatihan pendidikan	DKPPP
			Pengembangan Sistem pembenihan Mandiri Tanaman Perkebunan	DKPPP
			Pengembangan Sistem Pembenihan Buah Unggulan	DKPPP
			Fasilitasi Pengembangan Informasi Pertanian Perkebunan dan Hortikultura (Statistik Pertanian)	DKPPP
			Pengelolaan Database Pertanian	DKPPP
			Perawatan Kebun dinas dan Kebun entres	DKPPP
			Optimalisasi Kebun Pemda	DKPPP
			Intensifikasi Tanaman Cengkeh	DKPPP
			Introduksi dan Diversifikasi Komoditas Pertanian berpotensi	DKPPP
		9. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian (PSP)	DKPPP
			Fasilitasi DAK Pertanian	DKPPP
			Fasilitasi Temu Usaha pelaku pasar Komoditas Hortikultura	DKPPP
			Fasilitasi Temu Usaha pelaku pasar Komoditas Perkebunan	DKPPP
			Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian (PSP)	DKPPP
			Diseminasi Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Tanaman Pangan	DKPPP
			Diseminasi Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	DKPPP
			Promosi atas hasil produksi Tanaman Hortikultura	DKPPP
			Promosi atas hasil produksi Tanaman	DKPPP

No	Kebijakan/ Prioritas Daerah Tematik	Program Pendukung	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana dan Stakeholders
1	2	3	4	5
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 : PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN, REFORMASI SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
			Perkebunan	
			Peningkatan mutu Hasil Produksi dan pasca panen Hortikultura	DKPPP
			Peningkatan mutu Hasil Produksi dan pasca panen Perkebunan	DKPPP
			Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	DKPPP
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian	DKPPP
		10. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Hama Tikus	DKPPP
			Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan	DKPPP
			Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Hortikultura	DKPPP
			Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Menunjang Sistem Manajemen Lingkungan Pertanian di Daerah Tembakau	DKPPP
		11. Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kinerja Penyuluhan	DKPPP
			Fasilitasi Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Teknologi Pertanian	DKPPP
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	DKPPP
			Visualisasi dan Display Hasil Penyuluhan	DKPPP
			Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani	DKPPP
		12. Program Penanggulangan Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BPBD
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk	BPBD

No	Kebijakan/ Prioritas Daerah Tematik	Program Pendukung	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana dan Stakeholders
1	2	3	4	5
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 : PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN, REFORMASI SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
			Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	BPBD
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten Temanggung	BPBD
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana di Kabupaten Temanggung	BPBD
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana di Kabupaten Temanggung	BPBD
d	Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup	1. Program Penataan Bangunan Gedung	Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	DPUPR
			Sarpras Kelurahan Bidang Keciaptakaryaan	DPUPR
		2. Program Penyelenggaraan Jalan	Perencanaan Peningkatan Jalan Kabupaten	DPUPR
			Perencanaan Pembangunan Jalan (Ban-Keu)	DPUPR
			Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten	DPUPR
			Perencanaan Pemeliharaan Jalan (DAK)	DPUPR
			Fasilitasi Dana APBN Kebinamargaan	DPUPR
			Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	DPUPR
			Perencanaan Peningkatan Jembatan	DPUPR
			Perencanaan Pembangunan Jembatan	DPUPR
			Pengadaan Tanah Pemerintah	DPUPR
			Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten	DPUPR
			Fasilitasi DAK Jalan Penugasan	DPUPR
			Fasilitasi DAK Jalan Reguler	DPUPR
			Peningkatan Jalan	DPUPR

No	Kebijakan/ Prioritas Daerah Tematik	Program Pendukung	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana dan Stakeholders
1	2	3	4	5
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 : PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN, REFORMASI SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
			Kabupaten	
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten	DPUPR
			Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional I Temanggung	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional II Parakan	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional III Ngadirejo	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional IV Kranggan	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional V Kandangan	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional VI Tembarak	DPUPR
			Penggantian Jembatan	DPUPR
			Pelebaran Jembatan	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional I Temanggung	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional II Parakan	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional III Ngadirejo	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional IV Kranggan	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional V Kandangan	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional VI Tembarak	DPUPR
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	DPUPR

No	Kebijakan/ Prioritas Daerah Tematik	Program Pendukung	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana dan Stakeholders
1	2	3	4	5
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 : PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN, REFORMASI SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
		3. Program Pengembangan Permukiman	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	DPUPR
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	DPUPR
			Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	DPUPR
		4. Program Kawasan Permukiman	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	DPRKPLH
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DPRKPLH
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	DPRKPLH
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	DPRKPLH
		5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan
			Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan
		6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Program Mitigasi Perubahan Iklim Kabupaten Temanggung (Proklim)	DPRKPLH
			Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	DPRKPLH
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	DPRKPLH
			Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	DPRKPLH
			Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	DPRKPLH
			Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH

No	Kebijakan/ Prioritas Daerah Tematik	Program Pendukung	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana dan Stakeholders
1	2	3	4	5
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 : PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN, REFORMASI SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
		7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Koordinasi Adiwiyata	DPRKPLH
			Fasilitasi Lingkungan Bersih Sehat (LBS)	DPRKPLH
		8. Program Pengelolaan Persampahan	Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung	DPRKPLH
			Operasi dan Pemeliharaan alat angkut sampah dan listrik	DPRKPLH
			Peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R	DPRKPLH

Sumber : Bappeda, data diolah, 2022

5.2 Pendanaan Daerah

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2022 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok, arah kebijakan tahun ke lima pembangunan RPJMD tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yaitu penguatan ekonomi kerakyatan, reformasi sosial dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga berdasarkan permasalahan dan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah.

5.2.1 Kegiatan Prioritas Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang

Program dan kegiatan prioritas yang direncanakan dalam RKPD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Bidang Pendidikan

- Program Pengelolaan Pendidikan
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dana BOS, rehab sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pendidik dan penyelenggaraan proses belajar nonformal/kesetaraan. Program ini dilakukan dalam rangka menangani anak usia sekolah tidak sekolah untuk peningkatan rata-rata lama sekolah.

2) Bidang Kesehatan

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan rumah sakit dan puskesmas, operasional rumah sakit dan puskesmas, penyediaan alat kesehatan/penunjang medik, pelayanan jaminan kesehatan. Program ini dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian balita, prevalensi balita gizi buruk, prevalensi stunting dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kapasitas SDM di bidang kesehatan. Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat.
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan pengawasan obat, makanan dan minuman sesuai standar kesehatan. Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan farmasi sesuai standar.

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan irigasi. Program ini dilakukan dalam rangka menangani adanya jaringan irigasi yang rusak dan kurang berfungsi optimal sehingga terwujud ketersediaan air guna peningkatan kualitas produksi pertanian.
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan. Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan cakupan akses masyarakat terhadap air minum.

- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan dan pemeliharaan drainase. Program ini dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan drainase pada masyarakat.
- Program Pengembangan Permukiman
Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman. Program ini dilakukan dalam rangka mencapai cakupan rumah tangga dan lingkungan layak huni.
- Program Penataan Bangunan Gedung
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Implementasi SIMBG dan rehab gedung. Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan bangunan gedung yang layak sesuai standar dan sesuai dengan kepentingannya.
- Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan. Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan bangunan sesuai dengan kondisi lingkungannya sehingga terjaga stabilitas bangunan dan keamanan bangunan serta pelestarian lingkungan.
- Program Penyelenggaraan Jalan
Program ini diarahkan pada kegiatan rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, serta kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi dan penggantian jembatan. Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kondisi jalan dan jembatan sehingga mendukung perekonomian masyarakat.
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan RRTR dan penegakan hukum bidang penataan ruang. Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan penataan ruang sesuai dengan peruntukannya.
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan sosialisasi dan informasi terkait jasa konstruksi. Program ini dalam rangka menyediakan informasi jasa konstruksi yang update.

4) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

➤ Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan rumah susun. Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan rumah susun yang bersih, sehat dan layak huni sehingga tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

➤ Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan perbaikan dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan rumah yang layak huni sehingga tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

5) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

➤ Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Program ini dilakukan dalam rangka menurunkan angka kriminalitas dan peningkatan cakupan penegakan perda.

➤ Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan aparatur pemadam kebakaran, pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana. Program ini dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta kesiapsiagaan terkait terjadinya bencana.

➤ Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana. Program ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya bencana serta kesiapsiagaan terjadinya bencana, dilaksanakan oleh Satpol PP Damkar. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Penanganan Pasca bencana dan Respon Cepat Darurat Bencana dilaksanakan oleh BPBD. Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

6) Bidang Sosial

➤ Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat. Program ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

➤ Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial, dan kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan bagi pemerlu perlindungan sosial. Program ini dilakukan dalam rangka peningkatan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial.

➤ Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, dan perlindungan anak anak terlantar. Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi anak-anak terlantar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

➤ Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, bantuan makanan dan sandang. Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan.

➤ Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan. Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan taman makam pahlawan yang bersih dan tertata.

b. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

1) Bidang Tenaga Kerja

➤ Program Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja. Program ini dilakukan untuk peningkatan pelatihan berbasis kompetensi.

➤ Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia. Program ini dilakukan untuk optimalisasi kesempatan kerja dalam menyerap lapangan kerja.

➤ Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah. Program ini dilakukan untuk mewujudkan harmonisasi di hubungan industrial dan mencegah kasus demo.

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

➤ Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan. Program ini dilakukan dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan dan implementasi PUG di semua sektor kehidupan.

➤ Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan sinkronisasi dan koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan kegiatan fasilitasi layanan rujukan bagi korban. Program ini dilakukan dalam rangka menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan.

➤ Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga. Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga.

➤ Program Pemenuhan Hak Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak. Program ini dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak anak sehingga anak tumbuh berkembang dengan optimal.

➤ Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan sinkronisasi dan koordinasi perlindungan terhadap anak dan kegiatan pendampingan bagi anak korban kekerasan. Program ini dilakukan dalam rangka penurunan kasus kekerasan terhadap anak.

3) Bidang Pangan

- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan infrastruktur lumbung pangan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program ini diarahkan pada kegiatan pengadaan cadangan pangan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan petani.
- Program Pengawasan Keamanan Pangan
Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan pangan segar untuk meningkatkan kedaulatan pangan.

4) Bidang Pertanahan

- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Program ini diarahkan pada kegiatan Akes Reforma Agraria di Desa Ketitang Kecamatan Jumo. Reforma Agraria ini untuk mengatasi persoalan umum di bidang agraria, sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan yang melibatkan berbagai stakeholder. Kegiatan ini juga melibatkan pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan UMKM untuk kemakmuran rakyat melalui penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset.

5) Bidang Lingkungan Hidup

- Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada kegiatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyimpanan dan pengelolaan limbah B3 untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program ini diarahkan pada kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- Program Pengelolaan Persampahan
Program ini diarahkan pada kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA untuk meningkatkan prosentase angka sampah yang tertangani.

6) Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- Program Pendaftaran Penduduk
Program ini diarahkan pada kegiatan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk dan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Program Pencatatan Sipil
Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- Program Penataan Desa
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana desa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen desa

- Program Kerjasama antar Desa
Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen desa.
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan desa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen desa.
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
Program ini diarahkan untuk kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen desa.

8) Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- Program Pengendalian Penduduk
Program ini diarahkan untuk kegiatan penyediaan data dan informasi keluarga untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Program ini diarahkan pada kegiatan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB untuk meningkatkan cakupan akseptor KB
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB untuk meningkatkan cakupan akseptor KB

9) Bidang Perhubungan

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Program ini diarahkan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

10) Bidang Komunikasi Dan Informatika

- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan media informasi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Program Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

11) Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

➤ Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi

Program ini diarahkan untuk Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan prosentase kopeehat.

➤ Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro

Program ini diarahkan pada pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro untuk meningkatkan UKM aktif

➤ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan usaha mikro

Program ini diarahkan pada pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro untuk meningkatkan jumlah UKM aktif. Program ini dalam rangka penguatan peran UMKM yang belum optimal dan peningkatan usaha mikro yang naik kelas serta perlunya upaya peningkatan UKM aktif dalam pembangunan daerah.

12) Bidang Penanaman Modal

➤ Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota. Program ini dalam rangka penguatan upaya keras terkait ketersediaan SDM bidang PM dan perizinan yang terlatih.

➤ Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatanPelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal. Program ini dalam rangka peningkatan ketersediaan informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan.

➤ Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatanPenyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan

Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu pelayanan perizinan online, perijinan yang bebas calo, dan perijinan yang diterbitkan tepat waktu.

➤ Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan, pengaduan masyarakat yang terselesaikan, dan tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan.

13) Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

➤ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu organisasi pemuda yang aktif.

➤ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota dan kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan. Program ini dalam rangka peningkatan prestasi olahraga yang belum optimal.

➤ Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu gugus depan yang aktif

14) Bidang Statistik

➤ Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah. Program ini dalam rangka peningkatan ketersediaan data statistik sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.

15) Bidang Persandian

- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dalam rangka peningkatan sarana prasarana keamanan informasi dan peningkatan SDM di bidang persandian sehingga terwujud keamanan informasi.

16) Bidang Kebudayaan

- Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya, kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, dan kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan. Program ini dalam rangka peningkatan kelompok seni budaya yang produktif.

- Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional. Program ini dalam rangka melestarikan kesenian tradisional.

- Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal. Program ini dalam rangka pelestarian cagar budaya dan sejarah lokal yang belum optimal.

- Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya. Program ini dalam rangka pelestarian cagar budaya dan sejarah lokal yang belum optimal.

17) Bidang Perpustakaan

- Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat. Program ini dalam rangka peningkatan pertumbuhan pengunjung dan peminjam di perpustakaan.

- Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno. Program ini dalam rangka

peningkatan pengelolaan naskah kuno dan koleksi nasional yang dilestarikan di Kabupaten Temanggung.

18) Bidang Kearsipan

➤ Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis, kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, dan kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini dalam rangka peningkatan indeks manajemen kearsipan.

➤ Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu arsip vital konvensional yang dialihmediakan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Bidang Kelautan dan Perikanan

➤ Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Perikanan Tangkap. Program ini dalam rangka peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum.

➤ Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dan kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan. Program ini dalam rangkapeningkatan swasembada pada ikan konsumsi.

➤ Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitupeningkatan lokasi penebaran benih ikan.

➤ Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitutersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan.

2) Bidang Pariwisata

➤ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata. Program ini dalam rangka pengembangan destinasi wisata yang belum optimal.

➤ Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata. Program ini dalam rangka peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung dan peningkatan lama tinggal wisatawan yang masih rendah.

➤ Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Program ini dalam rangka Peningkatan desa wisata yang naik klasifikasi dan Peningkatan pelaku ekonomi kreatif.

3) Bidang Pertanian

➤ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme. Program ini dalam rangka Peningkatan produktivitas tanaman pangan, peningkatan produktivitas tanaman hortilkultura dan tanaman perkebunan, peningkatan berbagai macam komoditas pertanian seperti tembakau dan kopi, dan peningkatan produktivitas ternak ruminansia dan ternak unggas.

➤ Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi Usaha Tani, dan Rumah Potong Hewan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama

➤ Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitupeningkatan pengawasan produk hewan

dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat dan penanganan penyakit hewan.

- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu pengendalian bencana pertanian
- Program Penyuluhan Pertanian
Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu kelompok tani yang naik kelas.

4) Bidang Perdagangan

- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program ini diarahkan pada kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
Program ini dalam rangka Peningkatan pedagang kaki lima dan pedagang pasar yang menempati ruang sesuai peruntukannya, peningkatan manajemen pengelolaan pasar, dan peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan.

5) Bidang Perindustrian

- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi. Program ini dalam rangka masih terjadinya fluktuasi harga pada hortikultura.
- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera ulang.
- Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian Ijin Usaha Industri. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase pembinaan industri penghasil cukai

6) Bidang Transmigrasi

- Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase calon transmigran yang mendapatkan pembekalan

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

➤ Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Fasilitasi dan Koordinasi Hukum serta Fasilitasi Kerja Sama Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir, Prosentase Pelaporan SPM, Perangkat Daerah tepat Waktu, Cakupan Kecamatan Tertib Adminsitasi, Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegamaan kondisi baik, Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati, Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH, Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi, dan Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi.

➤ Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi, Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi, Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP, Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu, Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan, Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan, Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa, Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu, dan Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah.

2) Sekretariat DPRD

➤ Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dan Fasilitasi Tugas DPRD. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda, Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana, dan Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu.

- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, SDA dan Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Perekonomian, SDA dan Infrastruktur. Program ini dilakukan dalam rangka diperlukannya peningkatan keoptimalan persentase ketercapaian kinerja pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan.

2) Keuangan

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan

Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program ini dilaksanakan dalam rangka diperlukannya peningkatan indeks pengelolaan keuangan daerah (IKPD);

➤ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, Penagihan Pajak Daerah dan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak, Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu, Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu, Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah dan Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu

3) Kepegawaian

➤ Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Program ini dilaksanakan dalam rangka belum optimalnya indeks profesionalitas ASN dan diperlukannya penerapan sistem merit secara optimal dalam pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Temanggung.

4) Pendidikan dan Pelatihan

➤ Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Program ini dilaksanakan dalam rangka Belum optimalnya indeks profesionalitas ASN dan diperlukannya peningkatan pengikutsertaan ASN dalam diklat.

5) Penelitian dan Pengembangan

➤ Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; Sosial dan Kependudukan; dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Program ini dilaksanakan

dalam rangka belum adanya sumber daya manusia khususnya fungsional peneliti bidang penelitian dan pengembangan.

f. Unsur Pengawasan Urusan pemerintahan

1) Inspektorat Daerah

➤ Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. Program ini dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan indeks persepsi anti korupsi dan perlunya peningkatan optimalisasi maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

➤ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Pendampingan dan Asistensi. Program ini dilaksanakan dalam rangka diperlukannya peningkatan pengawasan baik perencanaan, keuangan maupun penyelenggaraan kinerja.

g. Unsur Kewilayahan

1) Kecamatan

➤ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan dan Persentase realisasi penerimaan PBB.

➤ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan pada kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang meliputi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu, Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik dan Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif.

➤ Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penanganan laporan kejadian.

➤ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah meliputi Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase tempat ibadah kondisi baik.

➤ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan dan Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu.

h. Unsur Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

➤ Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan meliputi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Program ini dilakukan dalam rangka upaya pembentukan FKUB di Kecamatan.

➤ Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya meliputi Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Program ini dilaksanakan dalam rangka perluasan terhadap sekolah dan desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan

serta sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

➤ **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial meliputi Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah, Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

5.2.2 Pagu Indikatif Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang

Berikut adalah rekapitulasi pagu indikatif pada setiap program berdasarkan urusannya di RKPD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Secara rinci untuk penjabaran program beserta indikator kinerja dan pagunya dituangkan dalam lampiran RKPD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Tabel 5.10
Rencana Pembiayaan Per Urusan Per Program RKPD Perubahan Tahun 2022

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.719.387.699.882,00	1.213.834.243.589,00	
101	PENDIDIKAN			649.638.182.006,00	637.763.801.298,00	
101.02.00	Program Pengelolaan Pendidikan			239.934.460.561,00	199.541.495.876,00	Dindikpora
		Persentase APK SD sederajat	%	106,23	106,23	
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A		0,96	0,96	
		Persentase APM SD sederajat	%	97,90	97,90	
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/ SDLB/MI/ Paket A		0,97	0,97	
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	79,00	79,00	
		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	96,57	96,57	
		Angka kelulusan SD sederajat	%	100,00	100,00	
		Angka putus sekolah SD sederajat	%	0,04	0,04	
		Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	52,81	52,81	
		Persentase APK SMP sederajat	%	98,52	98,52	
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	%	1,00	1,00	
		Persentase APM SMP sederajat	%	87,14	87,14	
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	%	1,06	1,06	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	98,30	98,30	
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	94,42	94,42	
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	94,39	94,39	
		Angka kelulusan SMP sederajat	%	100,00	100,00	
		Angka putus sekolah SMP sederajat	%	0,22	0,22	
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	62,98	62,98	
		Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100,00	100,00	
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	76,02	76,02	
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	38,91	38,91	
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100,00	100,00	
		Persentase TK terakreditasi minimal B	%	50,22	50,22	
		Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	46,52	46,52	
		Persentase angka melek huruf usia \geq 15 tahun	%	98,61	98,61	
		Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	%	97,09	97,09	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100,00	100,00	
		Rasio Guru Keagamaan terhadap anak usia sekolah		15,80	15,80	
101.03.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			409.703.721.445,00	438.222.305.422	Dindikpora
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	
102	KESEHATAN			513.426.729.502,00	452.268.437.991,00	
102.02.00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			374.852.360.600,00	306.217.523.148	Dinkes
		Angka kematian ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	71,50	71,50	
		Angka kematian bayi	Per 1000 kelahiran hidup	12,20	12,20	
		Prevalensi balita gizi buruk	%	0,50	0,50	
		Presentase rumah tangga yang memiliki jamban	%	82,84	82,84	
		Presentase puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	%	95,00	95,00	
		Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	97,80	97,80	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
		Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	% minimal	100,00	100,00	
		Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	% maksimal	100,00	100,00	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	% maksimal	100,00	100,00	
		Presentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	% maksimal	100,00	100,00	
		Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100,00	100,00	
		Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	%	70,00	70,00	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)	% minimal	7,00	7,00	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	% minimal	100,00	100,00	
		Angka Kematian Balita	Maksimal per 1000 KH	13,80	13,80	
		Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	
		Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	% minimal	100,00	100,00	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
		Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	% minimal	100,00	100,00	
		Presentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Cakupan rawat jalan)	%	43,00	43,00	
		Presentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama	%	50,00	50,00	
		Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	
		Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	
		Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100,00	100,00	
		Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	%	100,00	100,00	
		Penanganan KLB 1x24 jam	%	100,00	100,00	
		Angka penemuan kasus Malaria	per 1000 penduduk	<1	<1	
		Inciden rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	per 1000 penduduk (di IKP per 100.000 penduduk)	<20	<20	
		Angka penemuan kasus baru Kusta	per 1000 penduduk	<1	<1	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
		Desa atau kelurahan UCI	%	100,00	100,00	
		Proporsi anak umur 1 tahun diimunisasi campak	%	95,00	95,00	
		Prevalensi gizi kurang pada anak balita (0-60 bulan)	% maksimal	15,50	15,50	
		Prevalensi stunting pada anak baduta (0-24 bulan)	% maksimal	27,50	27,50	
		Bayi umur < 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	% maksimal	80,00	80,00	
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	% maksimal	20,00	20,00	
		Desa bebas rawan gizi	%	100,00	100,00	
		Rumah Sehat	%	81,50	81,50	
		Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	100,00	100,00	
		Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	%	52,00	52,00	
		Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	100,00	
102.03.00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			150.000.000,00	5.040.900.000	Dinkes
		Tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	97,00	97,00	
102.04.00	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman			420.000.000,00	495.836.000,00	Dinkes
		Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi	%	62,00	62,00	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
		Cakupan penggunaan obat rasional di puskesmas	%	77,00	77,00	
		Pengawasan makanan dan minuman di pasar tradisoinal	%	100,00	100,00	
		Persentase sarana pelayanan mendapatkan ijin kesehatan	%	100,00	100,00	
		Produksi industri rumah tangga	%	100,00	100,00	
102.05.00	Program Pemberdayaan masyarakat Bidang kesehatan			1.500.000.000,00	1.500.776.850	Dinkes
		Rumah tangga sehat (PHBS Rumah tangga) strata utama dan paripurna	%	83,07	83,07	
102.06.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			136.504.368.902,00	139.013.401.993	Dinkes
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	
103	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			494.337.933.502,00	71.784.082.877,00	
103.02.00	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			35.047.500.000,00	4.268.950.000,00	DPUPR
		Cakupan area layanan daerah irigasi	%	96,90	96,90	
		Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	58,32	58,32	
103.03.00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			16.374.563.000,00	6.727.550.000,00	DPUPR
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	88,00	88,00	
103.04.00	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			3.000.000.000,00	2.532.400.000,00	DPUPR

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
103.05.00	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			4.125.000.000,00	2.717.885.000,00	DPUPR
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100,00	100,00	
103.06.00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase			4.889.720.404,00	2.213.827.840,00	DPUPR
		Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%	49,00	49,00	
103.07.00	Program Pengembangan Pemukiman			100.000.000,00	75.000.000,00	DPUPR
		Persentase Desa terfasilitasi kegiatan Bankeu/Hibah	%	100,00	100,00	
103.08.00	Program Penataan Bangunan Gedung			3.200.000.000,00	3.178.000.000,00	DPUPR
		Persentase gedung pemerintah kondisi baik	%	77,50	77,50	
103.09.00	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya			3.650.000.000,00	777.859.000	DPUPR
		Persentase Trotoar kondisi baik	%	61,00	61,00	
103.10.00	Program penyelenggaraan jalan			406.754.447.500,00	42.206.242.500,00	DPUPR
		Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	%	84,85	84,85	
		Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	%	93,43	93,43	
103.11.00	Program Pengembangan Jasa Konstruksi			75.000.000,00	27.859.000,00	DPUPR
		Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	%	90,00	90,00	
103.12.00	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			586.999.600,00	252.741.600	DPUPR
		Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	%	88,00	88,00	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
103.13.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			16.534.702.998,00	12.056.052.937	DPUPR
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	
104	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			13.535.000.000,00	2.438.971.990,00	
104.02.00	Program Pengembangan Perumahan			424.000.000,00	220.427.990,00	DPRKPLH
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	6,35	6,35	
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	86,78	86,78	
104.03.00	Program Kawasan Permukiman			13.111.000.000,00	2.218.544.000,00	DPRKPLH
		Persentase rumah layak huni	%	88,87	88,30	
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	18,50	18,75	
		Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100,00	100,00	
		Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100,00	100,00	
105	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			15.859.426.251,00	11.850.381.677	
105.02.00	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum			1.095.000.000,00	1.082.000.000,00	Satpol PP-Damkar
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	100,00	100,00	
		Rasio Linmas per RT	Rasio	1,62	1,62	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	100,00	100,00	
105.03.00	Program Penanggulangan Bencana			4.883.712.518,00	2.986.294.961	BPBD
		Cakupan desa tangguh bencana	%	9,52	9,52	
		Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100,00	100,00	
		Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100,00	100,00	
		Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	%	78,30	78,30	
		Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	%	100,00	100,00	
		Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	%	100,00	100,00	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	100,00	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
105.04.00	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			2.150.974.600,00	1.988.390.800,00	Satpol PP-Damkar
		Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	%	60,81	60,81	
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%	69,80	69,80	
		Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	%	43,00	43,00	
		Persentase aparaturnya yang memenuhi standar kualifikasi	%	43,00	43,00	
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	
105.05.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			7.729.739.133,00	5.793.695.916,00	Satpol PP-Damkar
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	
106	SOSIAL			32.590.428.621,00	32.898.282.756,00	
106.02.00	Program Pemberdayaan Sosial			15.708.571.000,00	311.600.000,00	Dinsos
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100,00	100,00	
106.03.00	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			20.000.000,00	14.714.000,00	Dinsos
		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100,00	100,00	
106.04.00	Program Rehabilitasi Sosial			2.345.400.000,00	1.817.814.000	Dinsos

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100,00	100,00	
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100,00	100,00	
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100,00	100,00	
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100,00	100,00	
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	%	1,22	1,22	
106.05.00	Program perlindungan dan jaminan sosial			5.423.096.500,00	22.003.548.500	Dinsos
		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100,00	100,00	
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	75,00	75,00	
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	85,00	85,00	
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%	10,10	10,10	
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan	%	48,00	48,00	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
		dasar				
106.06.00	Program Penanganan Bencana			3.931.800.000,00	4.018.679.000	Dinsos
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100,00	100,00	
106.07.00	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			99.999.900,00	65.664.000,00	Dinsos
		Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100,00	100,00	
106.08.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.664.263.256	4.666.263.256	Dinsos
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			590.980.112.362,00	152.645.315.426,00	
207	TENAGA KERJA			8.640.086.448,00	5.858.591.457,00	
207.03.00	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja			394.999.816,00	0	Dinperinaker
		Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	62,00	62,00	
		Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru atau bekerja	%	40,00	40,00	
		Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	%	40,00	40,00	
207.04.00	Program Penempatan Tenaga Kerja			170.000.000,00	145.000.000	Dinperinaker
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	62,00	62,00	
		Tingkat setengah pengangguran	%	5,80	5,80	
		Persentase tenaga kerja formal	%	30,00	30,00	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
207.05.00	Program Hubungan Industrial			160.000.000,00	50.000.000,00	Dinperinaker
		Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	78,00	78,00	
		Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	56,00	56,00	
		Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	%	40,00	40,00	
		Persentase perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100,00	100,00	
207.06.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			7.915.086.632,00	5.663.591.457	Dinperinaker
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	
208	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK			500.000.000,00	601.800.000,00	
208.02.00	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			70.000.000,00	75.000.000,00	DPPPAPPKB
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,33	2,33	
		Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan dokumen perencanaan	%	45,71	45,71	
208.03.00	Program Perlindungan Perempuan			40.000.000,00	187.497.000	DPPPAPPKB
		Pravelensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,011	0,011	
		Persentase perempuan korban kekerasan	%	0,012	0,012	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
208.04.00	Program Peningkatan Kualitas Keluarga			290.000.000,00	25.000.000,00	DPPPAPPKB
		Persentase desa sayang ibu dan bayi	%	41,52	41,52	
		Persentase rumah sakit sayang ibu dan bayi	%	100,00	100,00	
208.06.00	Program Pemenuhan Hak Anak / PHA)			90.000.000,00	50.000.000,00	DPPPAPPKB
		Presentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	50,00	50,00	
208.07.00	Program perlindungan Khusus Anak			10.000.000,00	264.303.000,00	DPPPAPPKB
		Presentase anak korban kekerasan	-	0,011	0,011	
209	PANGAN			27.432.516.356,00	22.600.686.937,00	
209.02.00	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan			25.000.000,00	0,00	DKPPP
		Rasio ketersediaan pangan	%	100,00	100,00	
209.03.00	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			426.757.000,00	111.432.000,00	DKPPP
		Persentase peningkatan Desa pelaksana program ketahanan pangan	%	24,22	24,22	
209.04.00	Program Penanganan Kerawanan Pangan			50.000.000,00	40.716.000,00	DKPPP
		Rasio lumbung pangan masyarakat	%	52,00	52,00	
209.05.00	Program Pengawasan Keamanan Pangan			49.999.960,00	40.000.000,00	DKPPP
		Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90,00	90,00	
209.06.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			26.880.759.396,00	22.408.538.937	DKPPP
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
210	PERTANAHAN			20.000.000,00	0,00	
02.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100,00	100,00	DPRKPLH
211	LINGKUNGAN HIDUP			58.372.314.701,00	21.036.224.736,00	
211.02.00	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	60,50	60,50	DPRKPLH
		Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100,00	100,00	
211.03.00	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Angka	46,00	46,00	DPRKPLH
		Indeks Kualitas Udara	Angka	85,00	85,50	
211.04.00	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	74,33	74,33	DPRKPLH
		Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	%	0,067	0,067	
		Cakupan RTH Publik	%	0,07	0,07	
211.05.00	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	%	90,00	90,00	DPRKPLH
211.06.00	Program Pembinaan dan			100.000.000,00	35.001.300,00	DPRKPLH

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
	Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	90,00	90,00	
211.08.00	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	26,75	26,75	DPRKPLH
211.09.00	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	66,67	66,67	DPRKPLH
211.10.00	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	DPRKPLH
211.11.00	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	%	36,70	36,70	DPRKPLH
		Cakupan layanan persampahan	%	52,00	52,00	
211.12.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	DPRKPLH
212	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			7.667.553.874,00	8.636.770.178,00	
212.02.00	Program Pendaftaran			80.000.000,00	0,00	Dindukcapil

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
	Penduduk	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	97,30	97,30	
		Persentase kepemilikan KTP el	%	98,60	98,60	
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	67,00	67,00	
		Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%	100,00	100,00	
212.03.00	Program Pencacatan Sipil			80.000.000,00	0,00	Dindukcapil
	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	73,00	73,00		
	Persentase penerbitan akta kematian	%	98,00	98,00		
	Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	%	100,00	100,00		
	Cakupan pelayanan akta perkawinan dan perceraian tepat waktu	%	100,00	100,00		
212.04.00	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan			1.075.320.000,00	1.131.650.175,00	Dindukcapil
	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	40,00	40,00		
	Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	80,00	80,00		
212.05.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			6.432.233.874,00	7.505.120.003,00	Dindukcapil
	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00		
213	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			381.179.585.005,00	7.999.143.361,00	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
213.02.00	Program penataan Desa			364.287.325.000,00	40.000.000,00	Dinpermades
		Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	%	35,00	35,00	
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa	%	35,00	35,00	
213.03.00	Program Peningkatan Kerjasama Desa			925.160.000,00	0,00	Dinpermades
		Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan	%	100,00	100,00	
213.04.00	Program Administrasi Pemerintahan Desa			2.391.728.905,00	3.949.999.900,00	Dinpermades
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	80,00	80,00	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	80,00	80,00	
		Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	80,00	80,00	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	%	100,00	100,00	
		Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	%	83,00	83,00	
		Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	%	10,00	10,00	
		Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	%	83,00	83,00	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
213.05.00	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat			8.837.005.700,00	474.000.000,00	Dinpermades
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	%	30,00	30,00	
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	%	29,00	29,00	
		Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%	10,00	10,00	
213.06.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.738.365.400,00	3.535.143.461,00	Dinpermades
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	
214	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			13.316.066.000,00	14.213.218.122,00	
214.02.00	Program pengendalian penduduk			105.000.000,00	209.350.000,00	DPPPAPPKB
		Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan	%	100,00	100,00	
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	%	9,51	9,51	
		Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	2,05	2,05	
		Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19th)	%	26,50	26,50	
214.03.00	Program Pembinaan Keluarga Berencana /KB)			6.474.798.000,00	6.224.537.000,00	DPPPAPPKB
		Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	75,87	75,87	
		Persentase kepesertaan KB aktif	%	75,87	75,87	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	48,87	48,87	
		Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	%	33,90	33,90	
214.04.00	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)			2.170.086.000,00	4.015.940.000,00	DPPPAPPKB
		Indeks pembangunan keluarga	%	45,00	45,00	
214.05.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.566.182.000,00	3.763.391.122,00	DPPPAPPKB
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	
215	PERHUBUNGAN			20.544.544.400,00	19.359.118.154,00	
215.02.00	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			14.359.800.000,00	14.102.427.000,00	Dinhub
		Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadahi	%	37,68	37,68	
		Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	98,18	98,18	
		Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	%	99,53	99,53	
		Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	%	25,00	25,00	
		Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	%	50,00	50,00	
		Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	%	60,87	60,87	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
		Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	87,18	87,18	
		Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	100,00	100,00	
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	85,71	85,71	
		Persentase Penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	%	12,91	12,91	
215.03.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			6.184.744.400,00	5.256.691.154,00	Dinhub
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	
216	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			10.672.639.510,00	8.904.523.642,00	
216.02.00	Program Informasi Dan Komunikasi Publik			4.289.020.000,00	2.977.682.800,00	Dinkominfo
		Persentase PPID badan publik yang aktif	%	18,00	18,00	
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	25,00	25,00	
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100,00	100,00	
216.03.00	Program aplikasi informatika			2.788.638.000,00	2.157.038.825,00	Dinkominfo
		Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	100,00	100,00	
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	40,00	30,00	
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	55,00	50,00	
		Persentase ketersediaan akses internet publik	%	100,00	100,00	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
216.04.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.594.981.510,00	3.769.802.017,00	Dinkominfo
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	
217	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			23.083.941.003,00	15.103.384.168,00	
217.03.00	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi			34.999.800,00	0,00	Dinkopdag
		Persentase koperasi aktif	%	20,00	20,00	
217.04.00	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			20.000.000,00	0,00	
217.05.00	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			89.999.800,00	461.220.000,00	Dinkopdag
		Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	%	37,50	37,50	
217.06.00	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			175.000.000,00	10.480.000,00	Dinkopdag
		Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	%	25,00	25,00	
217.07.00	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan usaha mikro UKM			180.000.000,00	126.280.000,00	Dinkopdag
		Persentase usaha mikro aktif	%	34,00	34,00	
217.08.00	Program Pengembangan UMKM			884.999.999,00	0,00	Dinkopdag
		Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha	%	0,72	0,72	
217.01.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			21.698.941.404,00	14.505.404.168,00	Dinkopdag

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
	Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	
218	PENANAMAN MODAL			5.605.077.000,00	6.294.124.490,00	
218.02.00	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			100.000.000,00	75.000.000,00	DPM
		Nilai realisasi investasi	Miliar	520,00	520,00	
		Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10,00	10,00	
		Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100,00	100,00	
218.03.00	Program Promosi Penanaman Modal			110.000.000,00	290.000.000,00	DPM
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100,00	100,00	
218.04.00	Program Pelayanan Penanaman Modal			402.589.200,00	1.799.629.400,00	DPM
		Persentase pelayanan perizinan online	%	100,00	100,00	
		Persentase perijinan yang bebas calo	%	100,00	100,00	
		Persentase perijinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95,00	95,00	
218.05.00	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			700.000.000,00	369.695.000,00	DPM
		Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Perizinan yang diterbitkan	%	100,00	100,00	
		Persentase Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100,00	100,00	
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100,00	100,00	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
218.06.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.292.487.800,00	3.759.800.090,00	DPM
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	
219	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			7.895.422.100,00	4.110.430.189,00	
219.02.00	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			820.000.000,00	620.009.200,00	Dindikpora
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	76,90	76,90	
219.03.00	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			6.575.422.100,00	3.090.420.989,00	Dindikpora
		Prosentase pelatih olahraga bersertifikat	%	34,50	34,50	
		Persentase prestasi olah raga	%	56,40	56,40	
		Persentase atlet berprestasi	%	20,00	20,00	
219.04.00	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan			500.000.000,00	400.000.000,00	Dindikpora
		Presentase gugus depan yang aktif	%	90,10	90,10	
220	STATISTIK			295.000.000,00	127.832.000,00	
220.01.00	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			295.000.000,00	127.832.000,00	Dinkominfo
		Cakupan ketersediaan data makro daerah	%	100,00	100,00	
221	PERSANDIAN			175.000.000,00	84.999.800,00	
221.02.00	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			175.000.000,00	84.999.800,00	Dinkominfo
		Tingkat penilaian persiapan/ pengelolaan resiko keamanan informasi	%	1,00	1,00	
222	KEBUDAYAAN			17.757.810.465,00	14.839.128.465,00	
222.02.00	Program Pengembangan Kebudayaan			8.862.999.800,00	7.826.948.000,00	Dinbudpar
		Persentase kelompok seni budaya yang produktif	%	72,58	72,58	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
222.03.00	Program Pengembangan Kesenian Tradisional			69.999.900,00	0,00	Dinbudpar
		Persentase kelompok kesenian yang produktif	%	26,09	26,09	
222.04.00	Program Pembinaan Sejarah			80.000.000,00	26.316.000,00	Dinbudpar
		Persentase pelestarian Sejarah Lokal	%	5,38	5,38	
222.05.00	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya			200.000.000,00	180.179.620,00	Dinbudpar
		Persentase pelestarian cagar budaya	%	4,66	4,66	
222.06.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			8.544.810.765,00	6.805.684.845,00	Dinbudpar
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	
223	PERPUSTAKAAN			7.685.557.300,00	3.742.755.977,00	
223.02.00	Program Pembinaan Perpustakaan			3.440.005.700,00	150.414.500,00	Dinpusip
		Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	%	35,00	35,00	
		Persentase perpustakaan yang aktif	%	35,35	35,35	
223.03.00	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno			4.999.600,00	4.996.000,00	Dinpusip
		Cakupan naskah kuno Kabupaten Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarikan	%	75,00	75,00	
223.04.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.240.552.000,00	3.742.755.977,00	Dinpusip
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
224	KEARSIPAN			136.998.200,00	42.050.000,00	
224.02.00	Program Pengelolaan Arsip			116.998.400,00	40.050.000,00	Dinpusip
		Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	29,07	29,07	
224.03.00	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip			19.999.800,00	2.000.000,00	Dinpusip
		Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	%	40,00	40,00	
III	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN			26.698.349.950,00	15.901.117.900,00	
325	KELAUTAN DAN PERIKANAN			891.209.140,00	611.384.000,00	
325.01.00	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			0,00	0,00	DKPPP
		Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	20,00	20,00	
325.02.00	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			759.188.200,00	560.000.000,00	DKPPP
		Produktivitas ikan nila	kg/m2	5,40	5,40	
		Produktivitas ikan lele	kg/m2	12,60	12,60	
		Produktivitas ikan mas	kg/m2	5,80	5,80	
325.03.00	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan			78.547.900,00	51.384.000,00	DKPPP
		Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	%	33,00	33,00	
325.04.00	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			53.473.040,00	0,00	DKPPP
		Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	%	100,00	100,00	
326	PARIWISATA			2.048.421.360,00	1.048.224.000,00	
326.02.00	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			465.000.000,00	328.188.000,00	Dinbudpar
		Persentase obyek wisata yang berkembang	%	37,50	37,50	
326.03.00	Program Pemasaran Pariwisata			416.000.000,00	129.096.000,00	Dinbudpar
		Pertumbuhan jumlah wisatawan	%	20,00	20,00	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
		Lama tinggal wisatawan	hari	1,00	1,00	
326.04.00	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			1.167.421.360,00	590.940.000,00	Dinbudpar
		Persentase Peningkata Desa Wisata	%	10,03	10,03	
		Persentase Desa Wisata Naik Klasifikasi	%	5,00	5,00	
		Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	2,00	2,00	
327	PERTANIAN			13.346.536.100,00	12.811.395.400,00	
327.02.00	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian			9.195.715.600,00	11.258.485.800,00	DKPPP
		Produktivitas padi	kwintal/ha	63,15	63,15	
		Produktivitas jagung	kwintal /ha	45,95	45,95	
		Produktivitas Ubi Kayu	kwintal /ha	339,70	339,70	
		Produktivitas bawang putih	kwintal/ha	79,45	79,45	
		Produktivitas bawang merah	kwintal /ha	80,00	80,00	
		Produktivitas cabai rawit	kwintal /ha	55,00	55,00	
		Produktivitas cabai besar	kwintal /ha	69,40	69,40	
		Produktivitas tembakau	kwintal/ ha	6,75	6,75	
		Produktivitas kopi robusta	kwintal/ ha	7,20	7,20	
		Produktivitas kopi arabika	kwintal/ ha	6,90	6,90	
		Produktifitas Cengkeh	kwintal/ ha	2,35	2,35	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
		Produktivitas Vanili	kwintal/ha	2,93	2,93	
		Produktivitas ternak sapi	Kg/Ekor	177,40	177,40	
		Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,70	13,70	
		Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,70	13,70	
		Produktivitas ternak ayam ras pedaging	Kg/Ekor	0,75	0,75	
		Produktivitas ternak ayam ras petelur	Kg/Ekor	10,88	10,88	
		Produktivitas ternak ayam buras	Kg/Ekor	0,70	0,70	
327.03.00	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian			2.985.000.000,00	277.147.900 ,00	DKPPP
		Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	76,50	76,50	
327.04.00	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			215.679.000,00	249.998.500,00	DKPPP
		Persentase penanganan penyakit hewan	%	85,00	85,00	
		Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	70,00	70,00	
327.05.00	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			390.000.000,00	621.495.200,00	DKPPP
		Persentase pengendalian bencana pertanian	%	40,25	40,25	
327.07.00	Program Penyuluhan Pertanian			560.141.500,00	404.268.000,00	DKPPP
		Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	0,83	0,83	
330	PERDAGANGAN			3.823.162.900,00	773.454.500,00	
330.02.00	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			2.955.983.900,00	502.738.500,00	Dinkopdag
		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	%	67,00	50,00	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	60,00	60,00	
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%	90,00	90,00	
		Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	%	32,00	32,00	
330.03.00	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting			290.000.000,00	10.000.000,00	Dinkopdag
		Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	%	68,37	68,37	
330.04.00	Program Pengembangan ekspor			482.179.000,00	25.716.000,00	Dinkopdag
		Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan	%	2,32	2,32	
330.05.00	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen			95.000.000,00	60.000.000,00	Dinkopdag
		Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	Unit	90,00	90,00	
330.01.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			0,00	175.000.000,00	Dinkopdag
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	
331	PERINDUSTRIAN			6.499.020.450,00	656.660.000,00	
331.02.00	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri			6.499.020.450,00	656.660.000,00	Dinperinaker
		Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	33,00	33,00	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
331.03.00	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota			0,00	0,00	Dinperinaker
		Prosentase pembinaan industri penghasil cukai	%	4,77	4,77	
331.03.00	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			0,00	0,00	Dinperinaker
332	TRANSMIGRASI			90.000.000,00	0,00	
332.02.00	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi			90.000.000,00	0,00	Dinperinaker
		Persentase calon transmigran yang mendapatkan pembekalan	%	100,00	100,00	
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			140.877.708.101,00	120.523.132.906,00	
401	SEKRETARIAT DAERAH			91.721.856.101,00	71.330.764.945,00	Sekda
401.02.00	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			42.225.862.400,00	38.920.536.200,00	Bag. Pemerintahan
		Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir	%	100,00	100,00	
		Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	%	100,00	100,00	
		Cakupan Kecamatan Tertib Adminstrasi	%	100,00	100,00	
		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	88,00	88,00	
		Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	%	30,00	30,00	
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100,00	100,00	
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	%	90,00	90,00	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	%	75,00	75,00	
401.03.00	Program Perekonomian dan Pembangunan			14.077.997.000,00	2.769.690.500,00	
		Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100,00	100,00	Bag. Perekonomian
		Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%	100,00	100,00	Bag. Perekonomian
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	66,67	66,67	Bag. Perekonomian
		Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	%	100,00	100,00	Bag. Pembangunan
		Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu	%	100,00	100,00	Bag. PBJ
		Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	%	100,00	100,00	Bag. PBJ
		Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	50,00	50,00	Bag. PBJ indikator baru
		Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu	%	100,00	100,00	Bag. Pembangunan
		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	92,00	92,00	Bag. Pembangunan
401.04.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			35.417.996.701,00	29.640.538.245,00	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
	Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	Bag. Umum
		Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah	%	100,00	100,00	Bag. Umum
		Persentase Perangkat Daerah berpredikat B dalam penyusunan LKJIP	%	70,20	70,20	Bag. Umum
		Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100,00	100,00	Bag. Umum
402	SEKRETARIAT DPRD			49.155.852.000,00	49.192.367.961,00	
402.02.00	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			20.130.384.529,00	16,574,135,793,00	Setwan
		Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	%	26,67	26,67	
		Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100,00	100,00	
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	57,00	57,00	
402.01.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			29.025.467.471,00	32,618,232,168,00	Setwan
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			95.434.683.600,00	461.603.275.823,00	
501	PERENCANAAN			8.372.898.550,00	6.516.932.458,00	
501.02.00	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			765.000.000,00	593.580.000,00	Bappeda
		Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang	%	100,00	100,00	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
		tepat waktu				
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	90,00	90,00	
501.03.00	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			1.065.000.000,00	704.559.700,00	Bappeda
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	%	90,00	90,00	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	90,00	90,00	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	%	90,00	90,00	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	%	90,00	90,00	
501.04.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			6.542.898.550,00	5.218.792.758,00	Bappeda
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	
502	KEUANGAN			78.973.069.300,00	445.269.133.711,00	
502.02.00	Program pengelolaan			61.763.378.800,00	445.269.133.711,00	BPKPAD

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
	Keuangan daerah	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	100,00	100,00	
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	89,96	89,96	
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100,00	100,00	
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100,00	100,00	
		Persentase realisasi keuangan	%	93,00	93,00	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	90,00	90,00	
		Opini BPK atas LKPD	-	WTP	WTP	
502.03.00	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			3.219.999.400,00	3.088.268.500,00	BPKPAD
	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	86,31	86,31		
	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	98,90	98,90		
502.04.00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			1.690.000.000,00	1.171.955.200,00	BPKPAD
	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	0,96	0,96		
	Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100,00	100,00		
	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100,00	100,00		
	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	90,00	90,00		

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	95,00	95,00	
502.05.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			12.299.691.100,00	17.362.917.255,00	BPKPAD
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	
503	KEPEGAWAIAN			5.663.715.750,00	4.455.325.054,00	
503.02.00	Program Kepegawaian Daerah			793.000.000,00	413.759.800,00	BPKSDM
		Persentase penyusunan formasi pegawai	%	100,00	100,00	
		Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	%	100,00	100,00	
		Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	%	100,00	100,00	
		Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	%	80,00	80,00	
		Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	%	47,00	47,00	
		Persentase Pelanggaran disiplin ASN	%	0,20	0,20	
		Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	%	90,00	90,00	
		Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian	%	95,00	95,00	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
		Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	%	100,00	100,00	
503.03.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.870.715.750,00	4.041.565.254,00	BPKSDM
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	
504	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1.700.000.000,00	5.044.000.000,00	
504.02.00	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			1.700.000.000,00	5.044.000.000,00	BPKSDM
		Persentase Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Pengawas yang memiliki Kompetensi Diklat Kepemimpinan	%	32,00	32,00	
		Persentase ASN yang memiliki kompetensi Teknis dan Fungsional sesuai jabatannya	%	13,50	13,50	
505	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			725.000.000,00	317.884.600,00	
505.02.00	Program penelitian dan pengembangan			725.000.000,00	317.884.600,00	Bappeda
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	%	100,00	100,00	
		Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	%	60,00	60,00	
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			5.561.305.377,00	5.653.177.402,00	
601	INSPEKTORAT DAERAH			5.561.305.377,00	5.653.177.402,00	
601.02.00	Program Penyelenggaraan Pengawasan			553.799.996,00	461.203.750,00	Inspektorat
		Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	%	100,00	100,00	
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada	%	42,00	42,00	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
		tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi				
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	17,00	17,00	
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	31,00	31,00	
601.03.00	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi			399.999.450,00	302.983.600,00	Inspektorat
		Nilai maturitas SPIP	Angka	3,15	3,15	
		Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	40,00	20,00	
		Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100,00	100,00	
		Nilai Survey Penilaian Integritas	Angka	81,77	81,57	
		Prosentase penanganan aduan masyarakat	%	100,00	100,00	
601.04.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.888.990.052,00	4.888.990.052,00	Inspektorat
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	
VII	UNSUR KEWILAYAHAN			86.662.821.610,00	72.893.983.088,00	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
701	KECAMATAN			86.662.821.610,00	72.893.983.088,00	
701.02.00	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan Publik			1.480.812.441,00	1.999.804.398,00	Kecamatan
	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	100,00	100,00		
	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100,00	100,00		
701.03.00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			23.213.381.950,00	20.061.597.092,00	Kecamatan
	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100,00	100,00		
701.04.00	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			443.632.725,00	264.000.000,00	Kecamatan
	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100,00	100,00		
701.05.00	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			299.373.226,00	13.200.000,00	Kecamatan
	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	80,00	80,00		
701.06.00	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			452.139.195,00	168.000.000,00	Kecamatan
	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%	1,00	1,00		
	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100,00	100,00		
701.07.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			60.773.482.073,00	50.400.581.598,00	Kecamatan
	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00		
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			6.655.511.390,00	5.883.260.282,00	
801	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			6.655.511.390,00	5.883.260.282,00	
801.02.00	Program Penguatan Ideologi			68.000.000,00	48.381.100	Badan Kesbangpol

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
	Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	62,00	62,00	
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	10,00	10,00	
801.03.00	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			1.411.687.750,00	1.365.387.250	Badan Kesbangpol
Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya		%	87,00	87,00		
Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik		%	30,00	30,00		
Persentase keterwakilan perempuan di DPRD		%	30,00	30,00		
801.04.00	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			19.200.000,00	21.999.748	Badan Kesbangpol
Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan		%	100,00	100,00		
801.05.00	Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya			2.514.045.640,00	538.045.640	Badan Kesbangpol
Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi		%	100,00	100,00		
801.06.00	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			756.000.000,00	1.016.999.998	Badan Kesbangpol
Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah		%	100,00	100,00		
Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba		%	10,00	10,00		

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022		Penanggung jawab
				Penetapan	Perubahan	
		Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	35,00	35,00	
801.07.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			1.886.578.000,00	2.892.446.546	Badan Kesbangpol
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100,00	100,00	
JUMLAH TOTAL				2.672.258.192.272	1.786.789.232.460	

Sumber: Bappeda, data diolah, 2022.

5.3 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Proyeksi belanja daerah Kabupaten Temanggung RKPD tahun 2022, APBD Tahun 2022, dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2022 secara lengkap terinci pada tabel berikut:

Tabel 5.11
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Perubahan RKPD Tahun 2022

URAIAN	RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022
BELANJA DAERAH	2.672.463.192.272	1.989.495.211.214	2.052.292.052.816
1. Belanja Operasi	1.428.093.881.017	1.307.704.266.468	1.359.559.373.221
a. Belanja Pegawai	739.391.968.467	739.391.968.467	749.539.637.482
b. Belanja Barang dan Jasa	596.743.700.700	478.624.923.407	511.945.675.489
e. Belanja Hibah	73.869.224.350	71.791.892.276	73.951.472.750
f. Belanja Bantuan Sosial	18.088.987.500	17.895.482.318	24.122.587.500
2. Belanja Modal	810.693.425.259	248.830.058.750	271.020.244.399
a. Belanja Tanah	0		0
b. Belanja Peralatan dan Mesin	122.244.020.200	100.338.640.919	109.857.757.698
c. Belanja Bangunan dan Gedung	422.163.962.808	120.463.234.991	114.143.415.361
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	236.558.429.000	22.356.765.340	41.374.421.340
e. Belanja modal aset tetap lainnya	29.727.013.251	5.671.417.500	5.644.650.000
f. Belanja modal aset lainnya			0
3. Belanja TidakTerduga	17.320.650.000	17.320.650.000	5.357.199.200
4. Belanja Transfer	416.355.235.996	415.640.235.996	416.355.235.996
a. Belanja Bagi Hasil	6.901.000.000	6.901.000.000	6.901.000.000
b. Belanja Bantuan Keuangan	409.454.235.996	408.739.235.996	409.454.235.996

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung pada Perubahan RKPD Tahun 2022 disebabkan karena:

- a. Penyesuaian prioritas belanja berdasarkan kemampuan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2022;
- b. Penyesuaian belanja pada kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus berdasarkan penetapan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- c. Penyesuaian belanja pada kegiatan yang bersumber dana dari Dana Bagi Hasil Pajak Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi berdasarkan ketetapan alokasi Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dilakukan karena menjadi dasar dalam proses penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2022 sampai dengan triwulan II, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan. Perubahan RKPD Tahun 2022 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen PPAS sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2022 dan Perubahan APBD Kabupaten Temanggung tahun 2022.

Implementasi semua program pembangunan daerah Kabupaten Temanggung akan terwujud apabila didukung komitmen semua pihak sehingga terwujud pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung pada tahun 2022.

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022

BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG



website
bappeda.temangungkab.go.id



email
bappeda@temangungkab.go.id



instagram
[@bappedatemangungkab](https://www.instagram.com/bappedatemangungkab)



whatsapp
62896 1635 2800



youtube
BAPPEDA TEMANGGUNG